PERLAWANAN BURUH PEREMPUAN

Pengalaman Yasanti dalam Mendampingi Buruh Perempuan

Penyunting:
Istiatun
Titik Istiyawatun Khasanah



GRARIA
A
9

yayasan
annisa swasti

Yayasan Annisa Swasti (Yasanti) adalah sebuah organisasi nirlaba yang mempunyai kepedulian terhadap perempuan, khususnya buruh perempuan. Didirikan pada tanggal 28 September 1982. Mempunyai visi terwujudnya kehidupan masyarakat yang demokratis, bebas dari ketidakadilan jender, mempunyai kesempatan dan kemampuan dibidang politik, ekonomi, sosial budaya. Adapun misi Yasanti adalah sebagai berikut yang pertama, mendorong usaha-usaha mewujudkan kehidupan berorganisasi buruh yang independen dan demokratis, yang kedua, menumbuhkan kesadaran kritis komunitas buruh khususnya buruh perempuan melalui pengorganisasian, pendidikan dan advokasi.

PUST

yayasan annisa swasti

Global Fund for Women

ISBN 978-602-98659-0-5



PERLAWANAN BURUH PEREMPUAN

Pengalaman Yasanti dalam Mendampingi Buruh Perempuan

Penyunting:
Istiatun
Titik Istiyawatun Khasanah

Editor:
Haye Stanslaus
Nur Hardini

yayasan annisa swasti

Global Fund for Women

Perpustakaan nasional R.I. : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Perlawanan buruh perempuan : pengalaman Yasanti dalam mendampingi buruh perempuan/ penyunting, Istiatun, Titik Istiyawatun Khasanah, editor, Haye Stanslaus, Nur Hardini. -- Yogyakarta : Yayasan Annisa Swasti (Yasanti), 2011
xiii, 150 hlm.; 21 cm

Diterbitkan atas kerjasama dengan The Global Fund for Women USA
ISBN 978-602-98659-0-5

I. Tenaga kerja wanita. I. Istiatun. II. Titik Istiyawatun Khasanah. III. Haye Stanslaus. IV. Nur Hardini

331.4

PERLAWANAN BURUH PEREMPUAN
Pengalaman Yasanti Dalam Mendampingi Buruh Perempuan

Cetakan Pertama
April 2011

Penanggung Jawab
Amin Muftiyanah

Penyunting
Istiatun
Titik Istiyawatun Khasanah

Editor
Haye Stanslaus
Nur Hardini

Cover
Sihans

Diterbitkan oleh
Yayasan Annisa Swasti (YASANTI)
bekerja sama dengan *The Global Fund For Women* USA
Alamat: Jalan Puntodewo DK VII No 1
Jomegatan RT 11/RW 22 Ngestiharjo Kasihan Bantul
Yogyakarta, 55182 Indonesia
Telp./fax: +62-274-375908
E-mail: yasanti_yogya@yahoo.com
Website: www.yasanti.or.id

ISBN: 978-602-98659-0-5

KATA PENGANTAR

Yasanti melakukan program pengorganisasian buruh, khususnya buruh perempuan yang bekerja di sektor industri di kawasan industri Ungaran, Jawa Tengah, di mulai sejak tahun 1982. Latar belakang Yasanti melakukan program ini adalah karena masuknya investor asing secara besar-besaran dalam perusahaan industrialisasi di Indonesia dan adanya strategi penawaran buruh industri murah oleh pemerintah Indonesia. Hal ini antara lain mengakibatkan adanya kenyataan di lapangan bahwa pelibatan jumlah buruh dalam jumlah besar dengan kondisi upah minim, kurang adanya peralatan keselamatan kerja, tidak adanya sarana makan minum, minimnya sarana transportasi, jam kerja panjang, minimnya jaminan kesehatan. Adanya paham patriarki, jumlah perempuan lebih besar tetapi pendidikan perempuan lebih rendah. Salah satu dampaknya adalah kondisi buruh perempuan lebih buruk daripada buruh laki-laki karena adanya diskriminasi, upah lebih rendah, oleh karenanya pembelaan terhadap buruh perempuan harus dilakukan dengan segera dan mendesak. Minimnya lembaga yang melakukan pengorganisasian dan advokasi terhadap hak-hak buruh, khususnya di kawasan industri Ungaran, Jawa Tengah, menjadikan kondisi buruh perempuan tidak terorganisir dengan baik.

Kondisi di atas merupakan latar belakang Yasanti mela-

kukan pengorganisasian buruh perempuan di kawasan industri Ungaran, Jawa Tengah. Dalam rangka melakukan pengorganisasian, Yasanti menggunakan berbagai strategi dengan menyesuaikan kondisi sosial politik yang ada dan menyesuaikan kondisi wilayah di mana Yasanti melakukan pengorganisasian buruh perempuan. Strategi pengorganisasian yang dilakukan antara lain melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: (1) Pemetaan wilayah yang akan dijadikan wilayah pengorganisasian buruh yang meliputi profil perusahaan, jumlah buruh perempuan yang bekerja di perusahaan tersebut, kondisi kerja seperti upah, keselamatan kerja, organisasi buruh yang ada, jam kerja, asal daerah buruh, tempat tinggal buruh, sarana kesehatan buruh, dan persoalan-persoalan yang dihadapi buruh. Pemetaan wilayah ini dilakukan dengan cara kunjungan lapangan ke kawasan industri, asrama atau tempat tinggal buruh, dinas-dinas terkait untuk mendapatkan data-data industri yang ada, kelurahan, dan lain-lain. (2). Pemilihan wilayah pengorganisasian. Kriteria yang akan dijadikan wilayah pengorganisasian antara lain: perusahaan yang mayoritas buruhnya adalah buruh perempuan seperti pabrik garmen dan tekstil, roti, dan perusahaan-perusahaan padat karya yang mayoritas buruhnya perempuan. (3). Membangun kontak person. Antara lain membangun kontak person dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitar perusahaan seperti RT, RW, aparat kelurahan, buruh baik yang tinggal di asrama perusahaan maupun yang kos di rumah penduduk, terlibat atau menghadiri kegiatan yang diadakan oleh institusi masyarakat yang ada di sekitar perusahaan atau yang diadakan oleh buruh

seperti pengajian, 17 Agustusan, pertemuan PKK, dan lain-lain. (4) Melalui kontak person, baik buruh maupun masyarakat, Yasanti melibatkan mereka untuk terlibat kegiatan yang diadakan Yasanti, baik yang sifatnya kegiatan keterampilan maupun pengembangan wawasan. (5) Pertemuan reguler yang melibatkan buruh, baik melalui media kegiatan keterampilan atau pertemuan yang sifatnya pengembangan wawasan. (6) Pembentukan kelompok. Seperti kelompok usaha bersama, kelompok keterampilan maupun kelompok-kelompok diskusi. Melalui media kelompok-kelompok ini, Yasanti dan buruh melakukan pertemuan reguler untuk membahas persoalan-persoalan yang dihadapi buruh. (7) Pendidikan dan pelatihan. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas buruh, baik untuk kapasitas keorganisasian maupun wawasan perburuhan dan wawasan yang mendukung advokasi buruh. (8) Penguatan jaringan. Antara lain, menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga baik pemerintah, buruh, non-pemerintah yang memiliki kepedulian untuk memperjuangkan buruh, baik sifatnya finansial, advokasi, maupun pengembangan wawasan buruh, baik lokal, nasional, maupun internasional.

Strategi tersebut adalah yang pernah dilakukan Yasanti. Tentunya dari waktu ke waktu mengalami perubahan sesuai dengan kondisi sosial politik yang ada. Pada awal-awal, Yasanti melakukan pengorganisasian buruh perempuan yaitu tahun 1986–1990-an, ada kebutuhan akan strategi bagaimana buruh perempuan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Strategi yang dilakukan antara lain melalui pengembangan keterampilan yang sifatnya meningkatkan

penghasilan mereka seperti kursus menjahit, tata rias, usaha bersama simpan pinjam, dan lain-lain, tanpa melupakan dan mengaitkan isu-isu perburuhan yang lain. Kondisi sosial politik yang juga tidak mendukung gerakan buruh saat itu, tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan perburuhan secara langsung, sehingga perlu kegiatan *entry-point* dan pendukung yang lain. Sementara, kesadaran buruh akan persoalan dan kesadaran berorganisasi yang masih terbatas, memotivasi Yasanti untuk mencari berbagai strategi yang menarik, sehingga buruh mau berpartisipasi dan aktif dalam kegiatan buruh. Pelatihan dan Pendidikan yang sifatnya klasikal materi yang dibahas lebih terfokus pada pengembangan usaha dan wawasan seperti kewirausahaan, pembukuan, dan latihan dasar kepemimpinan wanita. Jaringan perburuhan yang ada juga masih sangat terbatas, sehingga masih memerlukan waktu yang tidak sedikit untuk mencari pendukung dari lembaga lain, baik secara lokal, national, maupun international, meskipun tahun 1996 Yasanti sudah menjadi anggota *Committee for Asian Women* –salah satu jaringan di ASIA yang *concern* pada isu buruh perempuan.

Pengorganisasian pada periode berikutnya, yaitu 1991–1996-an, ada sedikit pergeseran strategi, yaitu dengan mengurangi kegiatan-kegiatan yang sifatnya kegiatan ekonomi dan keterampilan. Melalui strategi ini, fokus kegiatan diarahkan pada isu perburuhan secara langsung. Mulai ada pertemuan reguler yang dilakukan oleh kelompok-kelompok buruh yang membahas persoalan perburuhan secara langsung seperti undang-undang perburuhan, organisasi buruh (saat itu hanya ada satu serikat buruh, yaitu SPSI),

kesehatan dan keselamatan kerja, kesehatan reproduksi, strategi pengorganisasian buruh, kepemimpinan buruh, dll. Jaringan dengan organisasi buruh yang lain secara nasional juga mulai kuat melalui advokasi bersama tentang isu-isu perburuhan, pendidikan, dan latihan bersama yang diadakan untuk buruh, kampanye bersama tentang upah, studi banding antar-organisasi buruh, dll. Akan tetapi, pada saat Indonesia dilanda krisis ekonomi yang berkepanjangan, yaitu sekitar tahun 1997–1999 buruh banyak yang di PHK, pindah dari perusahaan satu ke perusahaan lain, kondisi gerakan buruh mengalami sedikit kemunduran. Banyak buruh yang aktif dalam gerakan buruh di PHK dan pulang kampung, pindah pekerjaan dan tidak ada komunikasi, sehingga memerlukan waktu lagi untuk mencari kader-kader buruh dan melakukan pendidikan dan pelatihan seperti awal lagi. Gerakan buruh terkesan hilang dan tak terdengar karena kalah dengan gerakan reformasi untuk menjatuhkan presiden saat itu. Baru sekitar tahun 2000-an mulai bangkit lagi dengan isu Undang-undang perburuhan, PPHI, Globalisasi, serikat buruh, dan isu-isu yang lain. Strategi yang dilakukan Yasanti hampir mirip dengan strategi yang dilakukan sebelumnya antara lain melalui diskusi-diskusi perburuhan, baik dilakukan oleh serikat-serikat buruh maupun lembaga-lembaga yang *concern* pada perburuhan, kampanye bersama, penguatan jaringan buruh dengan membentuk jaringan buruh, baik secara lokal, nasional maupun international. Pada periode ini banyak dibentuk serikat-serikat buruh (ada kebebasan berorganisasi dan tidak hanya satu organisasi) yang dibentuk oleh buruh. Pertemuan-pertemuan

yang sifatnya pelatihan, *workshop*, seminar tentang buruh juga banyak dilakukan oleh serikat-serikat buruh.

Pengalaman dalam mengorganisir buruh tersebut dilakukan Yasanti sejak tahun 1982–2007. Merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi Yasanti khususnya dan pada masyarakat lain yang peduli terhadap pengorganisasian buruh umumnya. Oleh karena itu, untuk membagi pengalaman yang sangat berharga ini, Yasanti bermaksud untuk membukukan pengalaman ini dalam bentuk buku. Pengalaman-pengalaman ini tentunya bisa dijadikan referensi untuk melakukan kegiatan yang sama.

Untuk itu, Yasanti sangat berterima kasih kepada kawan-kawan Yasanti yang telah mencurahkan dan menulis pengalamannya. Buku ini sebagian besar disunting dari disertasi Machya Astuti Dewi yang berjudul " *Konteks Global dan Nasional Gerakan Perempuan di Masa Orde Baru: Kelahiran dan Dinamika Gerakan Yasanti*" Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Machya yang telah mengizinkan desertasinya tentang pengalaman Yasanti mendampingi buruh perempuan sebagai bahan penulisan buku ini, Mbak Budi Wahyuni, Mas Haye Stanlaus, Mas Yuli, Titik, Dini, Rima, Iwan, dan teman-teman lainnya atas kontribusi wawasannya, *support* dari *The Global Fund for Women*, juga pihak-pihak yang tidak bisa kami sebutkan di sini sangat membantu diterbitkannya buku ini. Semoga buku ini bermanfaat.

Yogyakarta, Februari 2011

Amin Muftiyanah
Direktur Eksekutif YASANTI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR → v
DAFTAR ISI → xi

Bab 1
KONTEKS GLOBAL DAN NASIONAL KELAHIRAN YASANTI → 1

A. Gerakan-Gerakan Melawan Ketidakadilan → 7
   1. Gerakan Mahasiswa → 7
   2. Kritik Organisasi Non-Pemerintah (Ornop) → 13
   3. Reaksi Aktivis Perempuan → 18
   4. Peluang Pertumbuhan Ornop → 20
   5. Peluang Global: Perhatian Dunia pada Isu Marjinalisasi Perempuan → 23
   6. Dorongan Aktivis Ornop → 28

B. Kelahiran Yasanti → 30
   1. Sejarah Kelahiran → 30
   2. Struktur Organisasi → 31
   3. Aktivitas dan Kelompok Dampingan → 33
   4. Jaringan Kerjasama → 50

Bab 2
DINAMIKA GERAKAN:
DARI PENDEKATAN *WOMEN IN DEVELOPMENT* KE ISU KESEHATAN REPRODUKSI → 55
A. Wacana Keperempuanan Global → 55
   1. Penyebaran Pendekatan *Women in Development* (WID) → 55
   2. Pergeseran ke Pendekatan *Gender and Development* (GAD) → 58
   3. Penyebaran Isu Kesehatan Reproduksi → 62
B. Dinamika Agenda Gerakan Yasanti → 64
   1. Pengaruh Pendekatan WID → 64
   2. Pergeseran Yasanti ke Pendekatan GAD → 74
3. Perhatian Yasanti pada Isu Kesehatan Reproduksi → 75

Bab 3
PERGESERAN STRATEGI GERAKAN → 79
A. Penguatan Isu Hak Asasi Manusia → 79
B. Kebangkitan Kelompok Oposisi dan Isu HAM di Indonesia → 81
C. Pergeseran Strategi Gerakan Yasanti → 85
   1. Latar Belakang Pergeseran → 85
   2. Diskusi Perburuhan: Membuka Kesadaran Buruh → 87
   3. Mobilisasi Aksi Buruh → 90

Bab 4
YASANTI DI TENGAH GERAKAN SOSIAL PASCA-REZIM ORDE BARU:
MERETAS STRATEGI BARU ADVOKASI BURUH → 107

A. Perubahan Sosial Politik dan Strategi Gerakan → 107
B. Kondisi Buruh Perempuan di Tengah Kecamuk Situasi Pasca-Orde Baru → 109
C. Yasanti Pascareformasi: Meretas Strategi Baru Advokasi Buruh Perempuan → 120

DAFTAR PUSTAKA → 123
LAMPIRAN FOTO → 139

Bab 1

KONTEKS GLOBAL DAN NASIONAL KELAHIRAN YASANTI

Konteks global dekade 1970-an dan 1980-an ditandai oleh maraknya fenomena globalisasi gelombang ketiga atau merujuk Gelinas (2003: 9) disebut pula dengan abad perusahaan multinasional (*multinational corporations*). Globalisasi gelombang ketiga sebenarnya bermula pada tahun 1883 ketika raja minyak dunia John D. Rockefeller mendirikan *Standart Oil Trust,* sebuah perusahaan multinasional yang pertama di dunia. Sejak saat itu, perusahaan-perusahaan multinasional Amerika mulai berekspansi ke berbagai negara, sehingga menguasai perekonomian dunia. Era ini menandai lahirnya revolusi industri kedua dengan ciri-ciri penggunaan mesin-mesin bertenaga listrik dan produksi barang secara besar-besaran.

Logika sebagai dasar pemikiran ekspansi globalisasi gelombang ketiga diturunkan dari ideologi neo-liberalisme yang memercayai; (1) arti penting institusi pemilikan privat dan efek distributif dari *expropriation* kemakmuran yang tidak terbatas oleh korporasi-korporasi transnasional; (2)

hukum pasar sebagai mekanisme superior distribusi sumber daya, kekayaan, serta pendapatan; dan (3) perdagangan bebas sebagai mekanisme terbaik untuk menjamin kemakmuran dan peningkatan kesejahteraan individu (Gelinas, 2003: 24).

Segala sesuatu yang memiliki nilai, dalam ekspansi globalisasi gelombang ketiga, menjadi bahan komodifikasi dan komersialisasi sistem ekonomi global. Pengimplementasian proses ini harus diimbangi dengan marjinalisasi kekuasaan dan otoritas negara-negara Dunia Ketiga di dalam pengaturan ekonomi nasional yang hingga dekade 1980-an telah terjadi dalam beberapa gelombang tahapan. *Pertama,* deregulasi sistem keuangan internasional Bretton Woods yang terjadi sejak tahun 1971 dan telah mengubah semua aset keuangan dunia ke dalam kapital spekulatif. Hal ini menandai awal mula globalisasi finansial. *Kedua,* deregulasi ekonomi Dunia Ketiga secara sistematik dan gradual. Tahapan ini dimulai sejak awal tahun 1980-an melalui program-program penyesuaian struktural (*structural adjustment*) di bawah pengawasan IMF dan Bank Dunia. Tujuannya untuk mengintegrasikan negara-negara sedang berkembang ke dalam pasar global. *Ketiga,* deregulasi pasar saham yang terjadi sejak tahun 1986 untuk mengatur deregulasi semua pasar saham di seluruh dunia (Gelinas, 2003: 31).

Bentuk-bentuk pengaturan melalui regulasi sistem perdagangan internasional tersebut telah merampas kekayaan dan merugikan kehidupan masyarakat negara-negara Dunia Ketiga. Dampak globalisasi sistem pertanian modern menurunkan pendapatan petani Dunia Ketiga.

Selain akibat kebijakan devaluasi mata uang, merosotnya kesejahteraan petani tersebut juga disebabkan oleh meningkatnya biaya produksi, mahalnya harga mesin-mesin pertanian, dan anjloknya harga komoditas. Sementara itu, modernisasi sistem pengolahan makanan telah merusak keragaman budaya pangan dan ekonomi pangan lokal. Produk pangan lokal yang diolah secara tradisional (menggunakan tangan) dipertanyakan kelayakannya untuk dikonsumsi. Tangan manusia dianggap sebagai pembawa kuman yang menyebabkan makanan terkontaminasi, sehingga harus digantikan oleh mesin-mesin dan bahan kimia yang dibeli dari perusahaan multinasional (Shiva, 2001: 60-61).

Tragedi kemanusiaan akibat globalisasi neo-liberal di negara-negara berkembang diindikasikan fenomena berikut: (1) 4 sampai 6 milyar penduduk di 127 negara terbelakang berada dalam kondisi kemiskinan yang luar biasa, (2) 49 negara paling terbelakang secara teknologis mengalami kebangkrutan, (3) pendapatan per kapita tiap tahun dari 100 negara di Dunia Ketiga mengalami penurunan dibandingkan keadaan 10, 15, 20 atau bahkan 30 tahun yang lalu, (4) 2,8 milyar penduduk di negara-negara Dunia Ketiga hidup dengan pendapatan kurang dari 2 dollar AS per hari, (5) 1,3 milyar penduduk di negara-negara yang sama bahkan hidup dengan tingkat konsumsi kurang dari 1 dollar AS, (6) 2,6 milyar penduduk dunia tidak memiliki infrastruktur sanitasi yang memadai, dan (7) 1,4 penduduk dunia tidak memiliki akses air minum yang bersih.

Dampak globalisasi gelombang ketiga di Indonesia

menunjukkan gejala serupa. Salah satu gejala itu ditandai oleh terjadinya ketimpangan pendapatan antara penduduk miskin dan penduduk kaya. Pada tahun 1969, penduduk termiskin di Indonesia menikmati 19,5 persen pendapatan nasional. Namun, sepuluh tahun kemudian, yaitu pada tahun 1979, tingkat kesejahteraan justru menurun ketika 40 persen penduduk Indonesia yang tergolong miskin hanya menikmati 14,4 persen pendapatan nasional. Sementara itu, 10 persen lapisan teratas menerima bagian yang cukup besar, yaitu 34 persen dari pendapatan nasional (Rahardjo, 1982: 5).

Kaum perempuan berada pada barisan kelompok masyarakat yang mengalami nasib menyedihkan di tengah laju pembangunan. Asumsi bahwa pembangunan akan memberi keuntungan pada perempuan melalui proses *trickle down* hasil pertumbuhan ekonomi, ternyata merupakan kekeliruan besar. Pembangunan justru berdampak merugikan bagi perempuan karena proses pembangunan tidak menyentuh kelompok perempuan. Sejumlah penelitian tentang dampak pembangunan pertanian bagi perempuan selama dekade 1970-an dan 1980-an menyebutkan bahwa program Revolusi Hijau telah menyebabkan perempuan kehilangan peran mereka dalam proses produksi pangan. Peminggiran peran perempuan di sektor pertanian pada gilirannya mengakibatkan langgengnya posisi ketertindasan perempuan. Sebelum Revolusi Hijau diperkenalkan, perempuan memiliki peran aktif dalam keseluruhan proses produksi pertanian, sejak masa menanam hingga memanen. Namun, pengenalan jenis padi baru varietas unggul dan teknologi baru dalam pro-

gram Revolusi Hijau telah mengubah peran perempuan desa. Kaum perempuan yang semula bertugas menanam padi (*tandur*) dan menyiangi padi, memanen (*ani-ani*) dan menumbuk padi (*nutu*), menjadi kehilangan pekerjaan karena terjadi intensifikasi di bidang pertanian dengan masuknya varietas padi unggul yang cara penanaman dan pemeliharaannya berbeda. Ketika panen tiba, perempuan tidak lagi melakukan *ani-ani* karena padi dipanen dengan cara disabit. Demikian pula kegiatan *nutu* telah digantikan dengan mesin penggilingan padi, sehingga banyak perempuan kehilangan pekerjaan. Program Revolusi Hijau telah mengganti peran perempuan dengan teknologi yang dikontrol oleh kaum laki-laki. Program ini juga diiringi dengan peningkatan peran lembaga formal untuk membantu petani mendapatkan benih, pupuk, kredit, dan informasi pertanian. Kondisi ini semakin mengucilkan petani perempuan karena banyak di antara mereka yang buta huruf dan tidak memiliki hak atas tanah (Smyth, 1993: 123).

Situasi marjinalisasi perempuan di lini pertanian, akibat program Revolusi Hijau yang jelas-jelas bagian dari skema industrialisasi di negara-negara Dunia Ketiga ini, mengakibatkan perempuan harus mencari alternatif lain bagi dirinya untuk bertahan hidup. Pada saat itulah sektor industri yang sepertinya memang telah didesain sedemikian rupa, menjadi alternatif satu-satunya bagi perempuan untuk mendapatkan penghidupan. Bagaimana tidak? Untuk menjalankan proses produksi, perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang banyak dan murah. Meskipun buruh perempuan kurang memiliki keahlian atau keterampilan

dibandingkan buruh laki-laki, banyak perusahaan lebih senang mempekerjakan buruh perempuan karena dianggap lebih mudah untuk dikontrol, lebih teliti, rajin, dan lebih ekonomis karena mau dibayar murah dan jarang melakukan protes yang bisa mengganggu jalannya proses produksi.

Lepas dari situasi marjinalisasi di sektor pertanian, lagi-lagi perempuan harus dihadapkan pada situasi ketidakadilan di sektor industri. Buruh perempuan harus menemui perlakuan eksploitatif dari perusahaan tempat mereka bekerja. Rendahnya pendidikan dan keterampilan yang mereka miliki menyebabkan buruh perempuan menerima upah yang lebih rendah dibanding buruh laki-laki, tidak mendapatkan jaminan keselamatan kerja, pengembangan karier yang terbatas, kondisi pekerjaan yang buruk, namun disertai tuntutan agar mereka tetap produktif dan patuh. Situasi ekspolitasi ini terjadi selain karena buruh perempuan pada saat itu belum memiliki kapasitas memadai, juga disebabkan oleh adanya struktur budaya patriarki, yang menjadikan buruh perempuan pun menjadi kelompok buruh kelas dua setelah buruh laki-laki. Struktur sosial budaya patriarkal ini sepertinya sengaja dilanggengkan oleh perusahaan untuk mengeruk keuntungan lebih banyak. Budaya kepatuhan perempuan dalam struktur sosial budaya patriarkal ini dimanfaatkan perusahaan untuk meredam aksi buruh dan menuntut produktivitas kerja mereka. Fenomena ketidakadilan inilah yang kemudian mendorong segenap elemen gerakan sosial untuk melakukan tindakan-tindakan perlawanan.

A. Gerakan-Gerakan Melawan Ketidakadilan

1. Gerakan Mahasiswa

Ekspansi kapitalisme global yang melahirkan ketidakadilan global dan nasional pada gilirannya melahirkan bentuk-bentuk perlawanan. Di Indonesia perlawanan ini antara lain dimotori oleh para mahasiswa lewat aksi-aksi demonstrasi sepanjang dekade 1970-an yang mengkritik kebijakan Penanaman Modal Asing (PMA) oleh pemerintah. Para aktivis mahasiswa menilai industri-industri yang didukung oleh pemodal raksasa hanya menguntungkan sedikit orang, sementara rakyat tetap berada pada kondisi kemiskinan struktural. Strategi ekonomi nasional yang dikenal dengan istilah *trickle down effect* dikritik mahasiswa sebagai sebuah mimpi besar. Kemarahan mahasiswa antara lain terluapkan saat Pronk, Menteri Pembangunan Belanda, sekaligus Ketua IGGI, berkunjung ke Indonesia pada bulan November 1973. Ia disambut dengan aksi demonstrasi mahasiswa yang menyerukan: "Kami tidak memetik keuntungan dari hasil penanaman modal asing dan bantuan luar negeri dalam bentuk bangunan-bangunan bertingkat dan hotel-hotel, *Coca Cola*, klub malam, dan sejenisnya. Sementara pada waktu yang bersamaan, pengangguran terjadi di mana-mana. Rakyat tidak punya rumah dan tanah, industri-industri kecil mati, hutan dan ladang-ladang minyak dieksploitasi". Pada tanggal 31 Desember 1973, Hariman Siregar, Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia menyatakan bahwa pembangunan ekonomi telah menjadi "mitos politik baru" lewat bentuk-bentuk ekspropriasi tanah dan pemaksaan

penjualan gabah para petani kepada pemerintah, sehingga semakin mempersulit kondisi kehidupan masyarakat desa. Sementara itu, sekelompok kecil orang yang memegang kekuasaan justru memanfaatkan strategi ekonomi pemerintah sebagai sarana untuk menumpuk kekayaan dan memuaskan kebutuhan mereka akan barang-barang mewah (Bresnan, 1993: 140).

Aksi penolakan PMA yang lebih besar berlangsung ketika PM Jepang, Tanaka Kakuei, berkunjung ke Indonesia bulan Januari 1974. Satu bulan sebelum Tanaka berkunjung, para aktivis mahasiswa telah mendatangi Kedubes Jepang dan *outlet-outlet* yang menjual barang-barang produk Jepang sambil membawa spanduk-spanduk bertuliskan kritik bahwa Jepang telah melakukan eksploitasi ekonomi Indonesia. Kritik ini meledak ketika PM Jepang Tanaka Kakuei datang ke Indonesia pada tanggal 15 Januari 1974. Kedatangan Kakuei disambut oleh demonstrasi mahasiswa. Sekelompok mahasiswa berhasil menerobos pasukan keamanan dan masuk ke bandara sementara kelompok mahasiswa yang lain berusaha memblokade jalan yang akan dilewati Kakuei dan rombongan, namun mereka berhasil dihalau oleh tentara. Pagi harinya mahasiswa menggelar aksi di jalanan. Mereka merampas sepeda motor buatan Jepang, mengempeskan ban-bannya, membakar mobil-mobil buatan Jepang, dan melempari jendela *showroom* Toyota Astra, serta merusak hotel tempat Tanaka dan rombongan menginap (Bresnan, 1993: 135). Insiden ini dikenal dengan Peristiwa Lima Belas Januari (Malari) yang berakhir dengan penangkapan dan pemenjaraan beberapa aktivis mahasiswa.

Aksi tersebut mendapatkan reaksi keras dari pemerintah. Melalui Surat Keputusan 028/1974 tentang pelarangan kegiatan politik di kampus, pemerintah menyatakan: (1) larangan kegiatan-kegiatan yang bersifat politik di kampus, (2) pimpinan perguruan tinggi bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berlangsung di kampus, (3) kegiatan yang dilakukan mahasiswa harus diketahui dan disetujui oleh pimpinan perguruan tinggi, termasuk program kerja dan rapat organisasi mahasiswa. Akibat pembatasan-pembatasan itu mahasiswa mencari alternatif kegiatan lain, salah satunya adalah menjadi aktivis organisasi non-pemerintah/ornop (Naipospos, 1996: 27).

Meskipun pemerintah menerapkan pembatasan terhadap aktivitas politik bagi dunia kampus, mahasiswa tidak surut dalam melakukan kritik-kritik terhadap Orde Baru. Lewat Gerakan Anti Kebodohan, mahasiswa melakukan diskusi-diskusi yang mengkritik masalah penegakan hukum, kebijaksanaan ekonomi, perkembangan situasi sosial politik, dan sistem pendidikan nasional. Menurut mahasiswa, rakyat telah "dibodohi" dengan slogan-slogan pembangunan yang justru meminta pengorbanan rakyat banyak. Beberapa contoh kasus yang diangkat oleh mahasiswa adalah masalah penyelesaian kasus Pertamina dan kasus Satelit Palapa yang tidak jelas duduk persoalannya, serta masalah ketimpangan pemerataan pendapatan.

Penilaian kritis mahasiswa diperkuat oleh beredarnya isu tentang "Mafia Berkeley" sebagai julukan terhadap para teknokrat pembangunan alumnus Universitas California di Berkeley Amerika Serikat. Negara Adidaya itu dianggap

sebagai biang kapitalis dunia. Mahasiswa mengkritik kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia karena semakin diarahkan ke dunia kapitalis, sehingga hanya menguntungkan kaum pemodal dan melemahkan posisi golongan ekonomi lemah.

Puncak aksi gerakan mahasiswa terjadi di Bandung pada tanggal 14 Januari 1978 ketika Dewan Mahasiswa ITB mengeluarkan pernyataan sikap menolak Soeharto menjadi Presiden RI kembali. Pada tanggal 16 Januari 1978 mereka mengadakan "apel siaga" yang diisi antara lain dengan pidato Wimar Witoelar (aktivis gerakan mahasiswa 1966) dan pembacaan pernyataan sikap mahasiswa ITB yang "tidak menginginkan Soeharto kembali menjadi Presiden RI". Gerakan menentang pemilihan Soeharto dengan cepat menyebar ke seluruh Indonesia, sehingga ABRI menyatakan siaga penuh dan kodam-kodam meningkatkan kesiapannya.

Untuk meredam aksi mahasiswa, Pangkopkamtib Laksamana Sudomo mengeluarkan surat keputusan mengenai pembekuan kegiatan-kegiatan Dewan Mahasiswa. Pada tanggal 23 Januari 1978, Laksamana Sudomo dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Sjarief Thayeb mengundang para rektor dan meminta agar kampus berada di bawah pengawasan rektor dan para pemimpin Dewan Mahasiswa harus mendaftar pada Kopkamtib. Suara kritis mahasiswa akhirnya dibungkam ketika Daoed Yoesoef yang diangkat oleh Soeharto sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Pembangunan III mengeluarkan peraturan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) pada tahun 1978 yang melarang kegiatan politik di

kampus. Kebijakan NKK membuat mahasiswa tidak lagi memiliki ruang gerak karena tanggung jawab keamanan kampus berada di tangan rektor (Ali, 1995: 29).

Penerapan kebijakan NKK pada tahun 1978 mendorong sebagian aktivis gerakan mahasiswa yang semula melakukan aksi-aksi demonstrasi mengkritik rezim Orde Baru mengalihkan aktivitas mereka. Mereka bergabung dengan ornop yang sudah mapan atau mendirikan ornop sendiri. Bentuk kegiatan baru ini merupakan salah satu alternatif dari dua kecenderungan pengelompokan aktivis mahasiswa untuk tetap mempertahankan kegiatannya. Bentuk kecenderungan yang pertama adalah mereka yang tetap menempatkan kampus sebagai pusat kegiatan mahasiswa dengan berbagai perubahan organisasi maupun orientasi kegiatan. *Kedua* adalah mahasiswa yang berusaha mencari bidang kegiatan baru di luar kampus yang dianggap sebagai lanjutan dari berbagai hal yang pernah diperjuangkan dalam gerakan mahasiswa.

Upaya mahasiswa mengalihkan kegiatan ke luar kampus dapat dibedakan menjadi dua kelompok. *Pertama,* kelompok yang tetap menjadikan mahasiswa sebagai pelaku utama dan kelompok sasaran yang dituju, dalam arti tetap mempertahankan radisi pendidikan tinggi dan budaya "intelektualisme". Termasuk di sini adalah kelompok-kelompok studi dan diskusi yang tumbuh menjamur di kota-kota besar, seperti Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta. Satu kelompok studi kurang lebih terdiri dari 10 orang. Mereka melakukan kegiatan pengisian wawasan sosial dan intelektual, dan secara khusus menyisipkan kader atau sarjana berpandangan kritis dan

memiliki rasa tanggung jawab sosial. Salah satu di antara kelompok studi yang tumbuh menjamur itu adalah Kelompok Studi Proklamasi yang mengadakan diskusi bulanan di kampus Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta. Mereka secara rutin mendiskusikan isu-isu sosial politik, mengundang puluhan aktivis mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta, dan mengundang para pakar terkemuka sebagai pembicara. Diskusi-diskusi itu kemudian dipublikasikan di berbagai surat kabar nasional. Sementara itu, di Yogyakarta ada Kelompok Studi Tehnosofi yang melakukan aktivitas lebih mendalam dengan membentuk jaringan antarkota dengan para aktivis mahasiswa yang lain. Salah satu kegiatan yang pernah dilakukan adalah mengadakan kemah perdamaian pada acara tahun baru 1987 yang dihadiri oleh para aktivis mahasiswa dari seluruh Jawa (Ali, 1989: 47).

Tumbuh suburnya kelompok-kelompok studi mahasiswa turut diperkuat oleh masuknya teori Neo-Marxis dan jalan ke "sosialisme" yang dipopulerkan oleh Arief Budiman pada awal 1980-an. Demikian pula tulisan-tulisan Adi Sasono, Sritua Arief, Dawam Rahardjo, dan Farchan Bulkin membawa mahasiswa kepada teori-teori radikal. Bekal pemahaman baru tersebut mendorong mereka membuat kajian alternatif dan mencari jawab atas perubahan struktural yang mereka inginkan. Mereka yang semula aktif dalam kelompok studi banyak yang kemudian menjadi aktivis ornop (Setiawan, 1994: 41).

Kelompok *kedua* adalah mereka yang menjadikan masyarakat bawah atau rakyat kecil tidak hanya sebagai kelompok sasaran, tetapi juga sebagai kawan dan subjek

perubahan. Termasuk dalam kelompok ini adalah mahasiswa yang mendirikan ornop-ornop dalam bidang teknologi tepat guna, pembinaan kreasi seni, manajemen dan koperasi, serta berbagai yayasan yang bergerak di sektor informasi membantu pedagang kecil dan merintis kegiatan lain seperti kerohanian di masjid. Sebagian mahasiswa yang masuk dalam pengelompokan ini kemudian bekerjasama atau bekerja dalam ornop yang sudah mapan. Beberapa ornop yang didirikan oleh aktivis mahasiswa masa NKK adalah Yayasan Mandiri Pribadi dan Yayasan Kalyanamitra di Jakarta yang bergerak di bidang informasi, Yayasan Mandiri di Bandung yang bergerak di bidang teknologi tepat guna, Yayasan Geni di Salatiga yang terlibat dalam masalah penggusuran tukang becak dan di Yogyakarta ada Kelompok Pinggir Kali yang menangani anak-anak gelandangan, Yayasan Nusantara yang aktif dalam kegiatan pesantren, Yayasan Widyadari yang mengajar masyarakat buta huruf, dan Yayasan Annisa Swasti (Yasanti) yang menaruh perhatian pada pemberdayaan perempuan kelas bawah.

2. Kritik Organisasi Non-Pemerintah (Ornop)

Organisasi non-pemerintah (ornop) merupakan wadah saluran ketidakpuasan terhadap pembangunan Orde baru dalam bentuk yang lebih moderat. Ornop generasi 1970-an dan 1980-an yang oleh Uhlin (1995: 102) disebut sebagai ornop generasi lama dimotori oleh para aktivis dan intelektual yang semula mendukung Soeharto menggantikan Soekarno menduduki kursi presiden, namun kemudian kecewa terhadap rezim Orde Baru.

Kontrol pemerintah yang kuat terhadap partai politik mengakibatkan mereka sengaja tidak memanfaatkan saluran politik melalui partai politik dan memilih menyalurkan kekecewaan terhadap Orde Baru dengan mendirikan organisasi non-pemerintah (ornop) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu keberadaan ornop tidak terpisahkan dari para aktivis mahasiswa karena sebagian besar aktivis ornop adalah mantan aktivis mahasiswa di kota besar yang mendapat akses cukup besar terhadap sumber dana. Para aktivis ini merasa terpanggil untuk memperhatikan lapisan masyarakat bawah yang terpinggirkan oleh pembangunan Orde Baru. Dengan bekerja untuk pembangunan masyarakat mereka dapat menyalurkan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan pembangunan Orde Baru. Beberapa di antara perintis ornop di masa Orde Baru ini adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH, 1971) yang didirikan oleh Adnan Buyung Nasution, Yayasan Indonesia Sejahtera (YIS, 1974) oleh Lukas Hendrata dan Soetrisno KH, Bina Swadaya (1967) oleh Bambang Ismawan dan kawan-kawan, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES, 1971) oleh Nono Anwar Makarim, Ismid Hadad, dan kawan-kawan, Sekretariat Bina Desa (1975) oleh Bambang Ismawan, George Aditjondro, dan kawan-kawan, Lembaga Studi Pembangunan (LSP, 1976) oleh Adi Sasono dan kawan-kawan

Ornop-ornop yang berkembang pada dekade 1970-an dan awal 1980-an mengadopsi wacana demokratik sosial yang sangat dipengaruhi oleh ide-ide negara kesejahteraan

dan kombinasi kesetaraan sosial dan ekonomi pasar dengan menjadikan negara-negara di Eropa Barat Utara sebagai modelnya. Pengadopsian ide-ide demokratik sosial berlangsung melalui interaksi antara aktivis ornop Indonesia dan kaum demokrat sosial di Eropa yang terjalin sejak dekade 1970-an dan meningkat pada dekade 1980-an, terutama melalui jaringan *International NGO Forum on Indonesian Development* (INFID).

Kebanyakan ornop dekade 1970-an dan awal 1980-an bekerja dengan menganut kerangka developmentalisme. Menurut Fakieh (2000: 4), tidak satu pun di antara mereka yang benar-benar menolak konsep dasar dan gagasan pembangunan. Pertanyaan maupun kritik yang mereka ajukan lebih dititikberatkan kepada implikasi metodologis dan teknis pembangunan Orde Baru. Para aktivis ornop pada masa itu mempermasalahkan pendekatan dan metode pembangunan, antara lain dengan mengkritik pola pendekatan *top-down* yang digunakan oleh pemerintah. Mereka mencoba memperkenalkan metodologi yang lebih baik dalam proyek-proyek pemerintah melalui pendekatan *bottom-up* dan partisipasi. Sebagian besar proyek ornop menggunakan teknik dan metode "alternatif" yang berbeda dengan metode dan pendekatan proyek-proyek pembangunan pemerintah, seperti proyek pembangunan industri kecil, proyek pengembangan kerajinan, proyek peningkatan pendapatan, pelayanan kesehatan masyarakat, program keluarga berencana dan pengendalian penduduk, teknologi tepat guna dan proyek pembangunan pedesaan lainnya. Proyek-proyek itu dijalankan dengan menggunakan metodologi alternatif

sebagai ganti pendekatan *top-down* dalam pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah, namun tidak mempersoalkan aspek struktural dan keterkaitan sistemik dari masalah yang sedang diupayakan pemecahannya. Posisi ini menurut Uhlin (1995: 103) merupakan bentuk moderat atas kekecewaan terhadap Orde Baru, sehingga pemerintah melihat keberadaan ornop tidak membahayakan eksistensi rezim.

Sikap moderat ornop generasi lama tercermin dari kegiatan yang dilakukan Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi (LP3ES). Lembaga ini menerbitkan buku-buku dan jurnal tentang permasalahan-permasalahan ekonomi, politik, sosial, dan budaya Indonesia. LP3ES juga melakukan proyek-proyek pembangunan dalam masyarakat kota dan desa, terutama di lingkungan pesantren.

Sebagian besar ornop moderat di Indonesia menjadi anggota INGI (*Inter-NGO Conference on IGGI Matters*) yang dibentuk pada tahun 1985 dan kemudian pada tahun 1988 berubah nama menjadi *International NGO Forum on Indonesia*). Pada tahun 1993 INGI kembali berganti nama menjadi INFID (*International NGO Forum on Indonesian Development*) seiring dengan dibubarkannya IGGI (*Inter-Government Group on Indonesia*). INFID berperan melobi negara-negara donor pemberi bantuan pembangunan Indonesia yang tergabung dalam IGGI (sejak tahun 1992 berganti CGI-*Consultative Group on Indonesia*) agar mereka mendesak pemerintah Indonesia untuk memperhatikan dampak ekonomi dan sosial dari proyek-proyek pembangunan yang dijalankan pemerintah serta memperluas

partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Uhlin, 1995: 106).

Sikap yang lebih keras terhadap Orde Baru ditunjukkan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Lembaga yang didirikan di Jakarta pada tahun 1971 ini menganut konsep "bantuan hukum secara struktural" dalam pengertian bantuan hukum yang dilakukan LBH diarahkan pada upaya-upaya untuk menghapuskan ketidakadilan sosial, ekonomi, dan politik. LBH bukan bertujuan untuk memberikan pembelaan di pengadilan, namun untuk memancing perhatian domestik dan internasional pada pelanggaran HAM di Indonesia dan memobilisasi dukungan dalam mendesakkan reformasi hukum yang diskriminatif terhadap kaum lemah. Beberapa kasus yang pernah diangkat oleh LBH adalah penggusuran ratusan keluarga di Jakarta Selatan karena tanah mereka akan digunakan sebagai lahan pembangunan Taman Mini, pembelaan terhadap demonstran peristiwa Malari, kasus penahanan aktivis mahasiswa pada tahun 1979 dan kasus Tanjung Priok (Uhlin, 1995: 103).

Di tengah melemahnya perekonomian Indonesia pada pertengahan dekade 1980-an karena penurunan harga minyak dunia, posisi ornop dalam berhadap-hadapan dengan pemerintah Indonesia menjadi menguat berkat kemampuan ornop dalam memobilisasi sumber dana asing. Bank Dunia dan negara-negara Barat mulai merangkul organisasi masyarakat dalam melaksanakan program-program pembangunan pemerintah yang mereka danai. Dalam kerangka bantuan dana dari luar negeri, ornop-ornop di Indonesia memainkan peran penting dalam

membantu merencanakan program pembangunan, mengidentifikasi dan memobilisasi kelompok-kelompok masyarakat, serta menjadi lembaga perantara pembawa bantuan dana dari lembaga-lembaga internasional kepada masyarakat. Pengaruh internasional ini melemahkan kontrol pemerintah terhadap ornop (Eldridge, 1989: 38).

3. Reaksi Aktivis Perempuan

Sebagaimana telah disinggung pada bagian sebelumnya bahwa Revolusi Hijau yang diterapkan sejak tahun 1970-an telah menggeser peran perempuan di bidang pertanian untuk digantikan oleh mesin dan laki-laki. Hal itu mendorong petani perempuan mencari pekerjaan lain seperti pekerja rumah tangga, pekerja seks, buruh pabrik, atau berjualan kecil-kecilan karena rendahnya bekal pendidikan yang mereka miliki.

Fenomena feminisasi kemiskinan tersebut akhirnya mendorong para aktivis perempuan mendirikan organisasi perempuan untuk memperjuangkan kepentingan perempuan kelas bawah. Mereka menggunakan pendekatan *Women in Development* (WID) untuk membantu kaum perempuan miskin. Pendekatan WID juga diadopsi oleh rezim Orde Baru pada tahun 1980-an, tidak lama setelah Deklarasi "Dekade untuk Perempuan" tahun 1976-1985 dicanangkan oleh PBB. Pengadopsian pendekatan WID oleh organisasi-organisasi perempuan tidak terlepas dari upaya lembaga donor dalam mendesak pemerintah Indonesia dan ornop-ornop developmentalis agar mengadopsi pendekatan WID. Desakan itu mendorong kalangan ornop developmentalis dan organisasi-organisasi perempuan

melakukan program-program untuk membuka akses yang lebih besar bagi perempuan dalam pembangunan. Mereka memperjuangkan kepentingan gender perempuan desa dan perempuan miskin melalui proyek-proyek *income-generating* dengan mengembangkan kapasitas ekonomi mereka melalui pendidikan dan latihan (Muchtar, 2000: 13).

Sebagian organisasi perempuan, terutama kelompok perempuan yang memiliki hubungan dekat dengan ornop non-perempuan menaruh keprihatinan yang besar pada nasib buruh perempuan yang bekerja pada industri-industri manufaktur berorientasi ekspor (Uhlin, 1995: 121). Kelompok perempuan ini menjadi bagian dari kelahiran gerakan buruh karena mereka aktif memperjuangkan isu-isu buruh, salah satu diantaranya melakukan pengorganisasian buruh. Mereka meluangkan waktu hidup dan tinggal bersama para buruh perempuan untuk memahami kondisi kehidupan dan eksploitasi yang dialami buruh perempuan di pabrik. Namun, mereka menggunakan pendekatan yang berbeda dalam memperjuangkan kepentingan buruh perempuan. Sebagian kelompok perempuan melakukan strategi memberikan latihan keterampilan bagi buruh perempuan agar mereka memiliki penghasilan tambahan dan memiliki bekal keterampilan seandainya tidak lagi bekerja di pabrik. Kelompok yang lain berupaya memandirikan buruh perempuan dengan melakukan penyadaran politik bagi buruh untuk memfasilitasi berdirinya organisasi buruh independen.

4. Peluang Pertumbuhan Ornop

Kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) yang diterapkan oleh rezim Orde Baru pada tahun 1978 menyebabkan pembatasan aktivitas mahasiswa pada kegiatan-kegiatan non-politis. Kondisi ini mendorong sebagian aktivis mahasiswa mencari alternatif kegiatan lain untuk menggantikan aksi-aksi demonstrasi mahasiswa yang sebelumnya sering mereka lakukan sebelum penerapan NKK. Sebagaimana dikemukakan pada bagian terdahulu, ketika aksi demonstrasi mahasiswa dilarang, sebagian aktivis mahasiswa kemudian mencoba mengalihkan perhatian mereka kepada upaya pemberdayaan masyarakat miskin melalui wadah organisasi ornop. Mereka beramai-ramai membentuk ornop atau bergabung dengan ornop yang sudah mapan.

Namun, pengalihan aktivitas mahasiswa pada kegiatan non-politis tidak begitu saja melenyapkan kesadaran sosial mahasiswa. Mereka melakukan diskusi-diskusi kritis melalui kajian-kajian sosial di mushola, masjid atau pusat-pusat studi Islam. Langkah ini merupakan upaya kamuflase untuk menutupi aktivitas kritis mereka di tengah-tengah pembatasan ruang gerak mahasiswa akibat penerapan kebijakan NKK, sekaligus menjadi pilihan kegiatan yang aman dilakukan setelah aksi-aksi demonstrasi mahasiswa dilarang. Salah satu pendiri Yasanti dan kawan-kawan yang tergabung dalam HMI turut mengisi kegiatan di masa NKK dengan berkumpul dan berdiskusi dengan para aktivis ornop. Diskusi berlangsung secara intensif karena sebagian besar aktivis ornop, antara lain Adi Sasono, adalah mantan aktivis HMI. Dalam diskusi-diskusi dengan para aktivis

HMI, Adi Sasono banyak mengangkat teologi keislaman untuk mendorong para mahasiswa aktivis HMI melakukan sesuatu guna membantu masyarakat miskin. Teologi-teologi kefakiran mendekatkan kekufuran, bahwa kemiskinan itu mendekatkan kekafiran menjadi bahan diskusi di dalamnya.

Ketika Dworowati Sosial Institute, sebuah ornop di Yogyakarta, yang didirikan oleh para mantan aktivis PII (Pelajar Islam Indonesia) mengadakan pelatihan Usaha Bersama (UB), Kusyuniati dan kawan-kawannya pun tertarik untuk mengikutinya. Keterlibatan Kusyuniati dan kawan-kawannya di Dworowati membuka jalan untuk memahami gagasan pembangunan masyarakat (*community development*), terutama masyarakat miskin. Mereka terlibat dalam diskusi-diskusi dengan para aktivis ornop senior, terutama Adi Sasono, Dawam Rahardjo, dan Habib Chirzin. Di kalangan mahasiswa, nama Adi Sasono dan Dawam Rahardjo dikenal sebagai tokoh-tokoh pembawa teori-teori ekonomi dan pembangunan radikal melalui kritik-kritik mereka terhadap kapitalisme. Lewat diskusi dengan para mahasiswa, Adi Sasono menggugah para aktivis kampus agar berbuat sesuatu untuk masyarakat.

Dorongan bekerja bersama rakyat juga ditegaskan oleh Habib Chirzin saat Kusyuniati dan kawan-kawannya datang mengunjunginya untuk berdiskusi. Habib Chirzin adalah mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah yang pada waktu itu menjadi konsultan NOVIB sekaligus salah seorang dewan pendiri SEARICE (*Southeast Asian Regional Institute for Community Education*), sebuah ornop di Philipina yang menaruh perhatian pada pembangunan

masyarakat. Dalam diskusi-diskusi itu Habib Chirzin mengajak Kusyuniati dan kawan-kawan untuk mengisi kegiatan di masa NKK dengan bekerja bersama masyarakat (*community development*) yang ia anggap lebih bermakna daripada melakukan aksi demonstrasi. Dari diskusi tersebut, mereka mendapatkan pengetahuan bahwa untuk bekerja bersama masyarakat membutuhkan 3 hal, yaitu (1) *documentation* atau melakukan riset pemihakan atau riset yang berorientasi pada transformasi dengan jalan mendokumentasikan masalah sekaligus berbicara dengan masyarakat, (2) *articulation* atau mengajak masyarakat untuk mengartikulasikan kepentingannya, apa problemnya, kemampuannya, harapan-harapannya, apa yang bisa dilakukan, (3) *organizing*, karena untuk memperbaiki diri dan mengubah nasib atau untuk memperjuangkan kepentingan, mereka harus *well-organized*, tidak bisa sendiri-sendiri

Intensitas diskusi dengan para aktivis ornop melahirkan semangat Kusyuniati dan kawan-kawannya untuk ikut melakukan pemberdayaan masyarakat dengan mendirikan sebuah ornop, menjadikan semangat kemasyarakatan dan semangat teologi mereka untuk mendirikan Yasanti semakin kental. Meskipun pada waktu itu sudah banyak ornop didirikan, namun ornop-ornop tersebut didominasi oleh kaum laki-laki, sehingga ia dan kawan-kawannya berkeinginan membentuk sendiri sebuah ornop yang khusus membela kepentingan perempuan. Meskipun waktu itu sudah punya kesibukan masing-masing dalam organisasi lain, namun mereka menginginkan sesuatu yang baru dengan mendirikan organisasi yang arahnya disepa-

kati secara bersama-sama untuk membantu sesama perempuan. Keterlibatan Kusyuniati dan kawan-kawannya di Dworowati memberi kesempatan yang berharga dalam mempersiapkan pembentukan ornop. Mereka banyak menggali pengalaman dari para aktivis Dworowati tentang tata cara mendirikan ornop

Keberadaan organisasi perempuan sebenarnya bukanlah fenomena baru pada masa itu. Kusyuniati, Noordjanah, dan Kumara Dewi telah lama aktif dalam organisasi perempuan Islam, terutama Nasyiyatul Aisyiyah (NA). Sementara itu, Budi Wahyuni dan Siti Muslimah bukan aktivis NA, namun aktif dalam berbagai organisasi sosial kemasyarakatan. Meskipun demikian, mereka masih memiliki idealisme untuk mendirikan sebuah organisasi perempuan karena menginginkan sesuatu yang berbeda dari kegiatan yang telah mereka ikuti.

5. Peluang Global: Perhatian Dunia pada Isu Marjinalisasi Perempuan

Sebagaimana telah disinggung pada bagian terdahulu, pembangunan di negara-negara berkembang ternyata diikuti oleh peminggiran peran perempuan. Realita tersebut melahirkan pemikiran untuk memajukan kaum perempuan yang terwujud dalam penyelenggaraan Konferensi Perempuan Sedunia di Meksiko tahun 1975. Konferensi ini memberikan sumbangan penting dalam mengubah pandangan tentang peran perempuan dalam pembangunan, yaitu dari pandangan bahwa perempuan adalah penerima bantuan pembangunan yang pasif ke pandangan bahwa perempuan adalah mitra sejajar laki-

laki yang memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Transformasi serupa terjadi dalam pendekatan pembangunan, yaitu munculnya pergeseran dari pandangan bahwa pembangunan dilakukan untuk memajukan perempuan beralih pada pandangan bahwa pembangunan tidak mungkin dilakukan tanpa partisipasi penuh perempuan di dalamnya.

Persoalan marjinalisasi perempuan dalam pembangunan yang sedang menjadi isu global saat itu menjadi bahan perbincangan kaum feminis. Saraswati Sunindyo, seorang feminis, bersama-sama teman-temannya sering mengadakan diskusi informal membahas persoalan-persoalan perempuan. Pada suatu kesempatan diskusi di Dworowati, fenomena global tentang peminggiran peran perempuan dalam pembangunan diangkat sebagai topik diskusi oleh Ann Soetoro, seorang antropolog feminis dari Amerika. Diskusi tersebut membicarakan apa yang dialami oleh perempuan sehari-hari, terutama marjinalisasi perempuan di Indonesia. Dia menceritakan bagaimana dari *ani-ani* menjadi sistem tebasan banyak perempuan dirugikan. Kemudian bagaimana modernisasi batik merugikan pengrajin-pengrajin batik tradisional. Demikian juga ketika bahan tikar diganti dengan plastik, bukan dengan *mendong* lagi. Ternyata dalam industri *craft* maupun pertanian, banyak perempuan terugikan akibat modernisasi teknologi. Dia menggugah kesadaran para peserta pelatihan bahwa kaum perempuan merupakan korban pembangunan

Persoalan marjinalisasi perempuan dalam pembangunan juga banyak diangkat sebagai kajian dalam

berbagai literatur. Realita peminggiran peran perempuan menjadi topik utama dalam studi-studi perempuan pada dekade 1970-an dan 1980-an. Saat itu buku-buku tentang perempuan dan pembangunan sangat mendominasi. Tahun-tahun itu WID ramai didiskusikan, misalnya kapitalisasi perempuan dalam rumah tangga. Di tingkat Asia, tulisan Nolin Heiser tentang buruh perempuan yang dipojokkan dalam industri hilir. Isu yang berkembang saat itu bersifat *development studies*. Akhir 1970-an dan awal 1980-an belum banyak yang bicara mengenai kesetaraan atau *equity*.

Literatur tentang perempuan dan pembangunan yang sering dirujuk sebagai bahan diskusi oleh kaum feminis adalah karya Ester Boserup: *Women's Role in Economic Development* (1970) yang berisi pemikiran tentang perlunya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Boserup mengemukakan gagasan penghapusan ketidakadilan (*inequity*) dalam pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dengan cara melibatkan perempuan sebagai partisipan aktif dalam proses pembangunan, baik dalam peran produktif dan reproduktif. Langkah itu, menurut Boserup, dapat dilakukan dengan cara mengakui nilai-nilai ekonomi dalam setiap pekerjaan perempuan baik yang bergaji maupun tidak dan menekankan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga dan di tempat kerja.

Meskipun wacana kesetaraan gender belum dikenal luas pada waktu itu, diskusi-diskusi tentang marjinalisasi perempuan dan maraknya buku-buku yang membahas tentang isu-isu perempuan serta semangat untuk meman-

dirikan perempuan melalui pengorganisasian semakin memantapkan niat para pendiri untuk mendirikan Yasanti.

Meskipun semangat feminis melandasi keinginan mereka untuk mendirikan Yasanti, kelahiran Yasanti tidak dipengaruhi secara langsung oleh ideologi feminisme yang berkembang di negara-negara Barat karena literatur-literatur feminisme karya penulis Barat belum dikenal luas di Indonesia pada saat itu. Dengan demikian, pendirian Yasanti lebih merujuk pada pembacaan atas karya-karya marjinalisasi perempuan di negara berkembang. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kelahiran Yasanti lebih diilhami oleh pemikiran feminisme yang diadopsi dari pengalaman perempuan di negara-negara berkembang yang terpinggirkan dalam proses pembangunan.

Dengan demikian, pendirian Yasanti tidak secara langsung mengacu pada salah satu tipologi feminisme yang dikenal dalam literatur sosiologi. Sebagaimana lazim dikenal, feminisme dapat dibedakan menjadi paling tidak lima tipologi (Ritzer, 1988: 296-311). *Pertama* adalah feminisme liberal, yaitu feminisme yang menuntut persamaan hak bagi perempuan di bidang hukum, politik, ekonomi, dan pendidikan. *Kedua* adalah feminisme Marxian yang melihat bahwa penindasan kelas merupakan penyebab ketidaksamaan hak antara perempuan dan laki-laki. Ketidakadilan gender akan berakhir ketika kelas pekerja telah berhasil meruntuhkan penindasan kelas melalui perjuangan revolusioner. *Ketiga* adalah feminisme psikoanalitik yang mengemukakan bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi karena ada kebutuhan emosional laki-laki untuk mengontrol perempuan. *Keempat*,

feminisme radikal yang melihat bahwa penindasan gender merupakan penindasan paling mendasar karena menciptakan represi, sadisme dan masochisme, manipulasi dan desepsi. Kaum radikal menyerukan bahwa upaya untuk mengalahkannya harus dimulai dari penyadaran terhadap perempuan, sehingga perempuan menyadari kekuatannya sendiri, menolak tekanan-tekanan patriarkal yang memandang perempuan lemah, tergantung, dan kelas dua. *Kelima* adalah feminisme sosialis yang merupakan penggabungan dari pemikiran feminisme Marxian dan radikal. Menurut feminis sosialis, tatanan sosial yang eksploitatif menjangkau kondisi kehidupan manusia yang lebih luas: tubuh manusia, seksualitas dan keterlibatan dalam pemeliharaan anak dan tugas-tugas domestik yang tidak dibayar. Strategi yang mereka tawarkan adalah melibatkan kelompok-kelompok yang tertindas itu dalam proses penyadaran, sehingga mereka dapat melancarkan upaya-upaya emansipasi (Ritzer, 1988: 311).

Dengan demikian, keinginan pendiri Yasanti bukan didorong oleh hasil pembacaan literatur-literatur feminisme Barat, namun lebih dipengaruhi oleh penyebaran isu global dan nasional tentang marjinalisasi perempuan dalam pembangunan. Pengalaman pendiri Yasanti dengan sesama aktivis perempuan yang kemudian mengasah kepedulian-nya pada penderitaan perempuan kelas bawah menunjukkan bahwa pemahaman tentang ketidakadilan terhadap perempuan yang berkembang di konteks global dan nasional menjadi bingkai yang melahirkan kesadaran bahwa kehidupan sosial telah menempatkan kaum

perempuan dalam posisi marjinal. Perhatian dunia pada isu perempuan dalam pembangunan, sebagaimana tercermin dari berlangsungnya konferensi perempuan sedunia yang membahas isu tersebut, diskusi-diskusi kaum feminis dan maraknya studi-studi tentang marjinalisasi perempuan dalam pembangunan menjadi kesempatan politik untuk melahirkan ornop perempuan yang membela kepentingan perempuan kelas bawah.

6. Dorongan Aktivis Ornop

Semangat pendiri Yasanti untuk membela perempuan kelas bawah juga berkat dorongan dari para aktivis ornop. Dukungan semangat itu antara lain datang dari Habib Chirzin dan Saraswati Sunindyo yang selalu menekankan perlunya pemihakan kepada perempuan. Mereka juga selalu menekankan bahwa kepentingan perempuan juga harus dieksplisitkan, sebab jika tidak perempuan akan selalu diatasnamakan, diwakili, dan diandaikan sudah termasuk di dalam apa yang disebut manusia, padahal mereka diabaikan dan dilupakan.

Gagasan untuk mendirikan Yasanti pada saat keberadaan ornop perempuan berperspektif feminis belum menjadi fenomena yang lazim ditemukan di masyarakat membuat Yasanti menuai kritik dari orang-orang yang tidak bersimpati. Kusyuniati menuturkan bahwa langkahnya bersama-sama kawan-kawannya untuk mendirikan Yasanti ketika itu disikapi secara sinis oleh sebagian orang. Kalangan ornop menilai langkah Kusyuniati dan kawan-kawannya mendirikan Yasanti merupakan bentuk segregasi seksual karena isu feminisme belum berkembang

di Indonesia pada waktu itu.

Pada waktu itu banyak kalangan ornop dan perguruan tinggi menilai Kusyuniati dan kawan-kawannya telah melakukan segregasi sosial secara seksual. Isu feminisme belum berkembang di Indonesia waktu itu dan feminisme dilihat dari kerangka feminisme Eropa pada tahun 1950-an. Padahal, feminisme di Indonesia adalah dalam kerangka patriarki, persamaan dalam kerangka pembangunan, dalam kerangka hak dan martabat, peran-peran sosial, peran-peran politik dan sebagainya, bukan kultural. Di Indonesia secara politik dan ekonomi perempuan adalah sektor yang paling tertindas.

Meskipun gagasan untuk mendirikan Yasanti menuai kritik dari sebagian aktivis ornop, namun dukungan dan dorongan dari para aktivis feminis, terutama Saraswati dan Habib Chirzin membuat Kusyuniati dan kawan-kawannya tidak surut semangat mendirikan ornop perempuan yang dapat memperjuangkan kepentingan perempuan kelas bawah sebagai kelompok yang terpinggirkan dalam pembangunan Orde Baru. Mereka pun akhirnya mendirikan Yasanti pada tahun 1982.

Kelahiran Yasanti yang diilhami dari fenomena marjinalisasi perempuan dalam pembangunan tersebut mengindikasikan terjadinya proses pembingkaian kesepatan global dan nasional sebagai pendorong kelahiran gerakan. Hal itu ditunjukkan oleh munculnya pemikiran Kusyuniati untuk mengajak kawan-kawannya mendirikan ornop pembela kepentingan perempuan setelah pemahaman isu global menyadarkannya bahwa kaum perempuan mengalami keterpurukan akibat proses pem-

bangunan. Kesempatan politik yang membuka peluang kelahiran Yasanti di sini bermakna luas, bukan sekedar politik yang berhubungan dengan lembaga-lembaga politik, elit politik atau negara, namun mencakup isu-isu non-politis dan keberadaan aktor-aktor di masyarakat yang membuka kesempatan bagi kelahiran sebuah gerakan.

Meskipun demikian, konteks politik nasional ikut memberi andil bagi kelahiran Yasanti. Ketika kesadaran akan keterpurukan kondisi perempuan tumbuh, konteks politik nasional turut memberi peluang bagi pertumbuhan organisasi-organisasi non-pemerintah. Yasanti memetik keuntungan dari kondisi politik nasional yang memungkinkan pertumbuhan ornop, terutama karena ketiadaan represi rezim atas pembentukan dan keberadaan ornop. Kondisi semacam itu menjadi kesempatan politik yang membuka peluang bagi kelahiran Yasanti.

B. Kelahiran Yasanti

1. Sejarah Kelahiran

Yayasan Annisa Swasti (Yasanti) didirikan pada tanggal 28 September 1982 di Yogyakarta oleh 8 orang perempuan, yaitu Sri Kusyuniati, Budi Wahyuni, Siti Muslimah Widyastuti, Siti Noordjanah Djohantini, Kumara Dewi Susilowati, Dra. Liliek Haryati, dan Iin Insiah Fakieh. Sebelum bersepakat mendirikan Yasanti, sekelompok perempuan ini telah saling mengenal satu sama lain lewat kegiatan kepramukaan semasa SMP, organisasi pelajar Islam PII, dan organisasi perempuan Islam Nasyiyatul Aisyiyah (NA). Terdorong oleh keprihatinan atas kondisi perempuan yang terpinggirkan dalam proses pembangun-

an mereka tergerak untuk melakukan sesuatu guna membantu kaum perempuan kelas bawah keluar dari keterpurukan mereka.

Rasa keprihatinan itu mendorong Kusyuniati dan kawan-kawannya mendirikan sebuah organisasi perempuan untuk membantu perempuan kelas bawah dengan nama Yayasan Annisa Swasti. Annisa berarti perempuan, swasti berarti mandiri. Organisasi ini didirikan dengan tujuan untuk: *pertama*, mengembangkan aspirasi dan potensi kaum perempuan dan mengembangkan nilai-nilai luhur bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa dan negara Republik Indonesia. *Kedua*, mengembangkan sumber daya manusia dan masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan perempuan agar mampu menjawab tantangan sosial dan ekonomi di masa mendatang. *Ketiga*, bekerjasama dengan lembaga atau organisasi lain yang memiliki maksud dan tujuan yang sama dan sejalan dengan Yasanti.

2. Struktur Organisasi

Sejak kelahirannya hingga saat ini, Yasanti telah mengalami beberapa kali perombakan struktur organisasi. Ketika berdiri pada tahun 1982 struktur organisasi Yasanti terdiri dari ketua (Sri Kusyuniati), wakil ketua (Siti Muslimah Widyastuti), sekretaris (Budi Wahyuni), wakil sekretaris (Kumara Dewi), bendahara (Siti Noordjanah Djohantini), wakil bendahara (Iin Insiah Faqieh), departemen litbang (Liliek Haryati), dan departemen usaha (Susilawati).

Beberapa tahun kemudian aktivitas Yasanti semakin bertambah banyak, sehingga mulai merekrut staf untuk

membantu proses pendampingan buruh perempuan di lapangan dan staf yang melakukan tugas-tugas administratif di kantor. Struktur organisasi akhirnya terbagi menjadi dua, yaitu Badan Pengurus dan Pengurus Harian. Badan Pengurus terdiri dari para pendiri Yasanti, yaitu Sri Kusyuniati, Kumara Dewi, Noordjanah Djohantini, Budi Wahyuni, Siti Muslimah Widyastuti, dan Susilawati yang berperan sebagai pengawas dan kontrol yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan harian. Sementara itu, Pengurus Harian adalah para pengelola yayasan yang sehari-hari terlibat dalam seluruh kegiatan. Pengurus harian terdiri dari ketua harian atau Direktur Pelaksana Harian yang dibantu oleh para staf yang terbagi dalam 4 divisi, yaitu Divisi Aksi dan Advokasi, Divisi Penelitian, Penerbitan dan Dokumentasi, Divisi Pendidikan dan Pelatihan, serta Divisi Kelembagaan dan Keuangan.

Pada tahun 2004, struktur organisasi kembali mengalami perombakan untuk menyesuaikan kebutuhan program Yasanti di lapangan, yaitu membentuk organisasi buruh perempuan yang kuat. Divisi yang semula terbagi menjadi 4 dirombak menjadi 3 divisi. *Pertama* adalah Divisi Penguatan Organisasi di Tingkat Basis yang melakukan pengorganisasian dan penguatan di dalam komunitas dampingan. *Kedua* adalah Divisi Administrasi dan Kesekretariatan yang menangani urusan administratif sebagai penunjang seluruh kegiatan Yasanti. *Ketiga* adalah Divisi Kajian dan Dokumentasi. Divisi kajian menangani penerbitan, pengumpulan informasi, analisis dan pengkajian tentang perburuhan, gender, dan perempuan, serta melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain dalam

rangka advokasi. Sementara itu, divisi dokumentasi melakukan pengelolaan perpustakaan, pembuatan dokumen berupa foto, rekaman proses, *photoslide*, dan pengelolaan *e-mail*.

Hingga saat ini, Yasanti telah mengalami lima periode kepemimpinan. Dua periode kepemimpinan pertama dipegang oleh pengurus yayasan, yaitu Sri Kusyuniati (1982-1993) dan Kumara Dewi (1994-1995). Pada periode berikutnya, kepemimpinan dipegang oleh salah seorang staf, yaitu Nadhroh Assariroh melalui proses pemungutan suara. Assariroh hanya memimpin selama satu tahun (1996-1997) karena memutuskan untuk mengundurkan diri. Setelah itu, kepemimpinan kembali dipegang oleh pengurus yayasan, yaitu Budi Wahyuni selama satu tahun (1997-1998). Sejak tahun 1998 hingga sekarang Yasanti kembali dipimpin oleh yaitu Amin Muftiyanah yang merupakan periode kepemimpinan kelima di Yasanti.

3. Aktivitas dan Kelompok Dampingan

Dalam akte kelahiran Yasanti disebutkan bahwa untuk mencapai maksud dan tujuannya, Yasanti melakukan kegiatan-kegiatan: (1) pendidikan, latihan serta segala upaya dalam arti yang seluas-luasnya demi pengembangan swadaya dan swakarsa perempuan terutama di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, kebudayaan, kesehatan, lingkungan, dan lain sebagainya, (2) di dalam batas-batas kemampuannya, Yasanti bekerjasama dengan pihak-pihak yang dapat memajukan maksud dan tujuan Yasanti, (3) usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan.

Implementasi tujuan-tujuan tersebut diwujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan kelas bawah. Mereka meliputi buruh petani dan ibu rumah tangga di Kulonprogo, buruh industri di Ungaran, pramuniaga di Yogyakarta, remaja putri putus sekolah yang kemudian diganti dengan istilah perempuan pekerja di Yogyakarta, buruh industri di Sukoharjo, dan buruh gendong (*endong-endong*) di pasar Beringharjo dan pasar Giwangan Yogyakarta, serta buruh rumahan di Yogyakarta. Aktivitas dan gambaran masing-masing kelompok dampingan Yasanti dapat disimak sebagai berikut:

3.1. Perempuan Buruh Petani di Kebonrejo, Kulonprogo

Pemberdayaan perempuan di Kebonrejo, Kulonprogo, dimulai pada tahun 1982. Bagi warga Kebonrejo, Kusyuniati, salah seorang pendiri Yasanti, bukanlah orang asing karena ia pernah melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa itu. Di Kebonrejo, Yasanti mendampingi kaum perempuan yang sebagian besar terdiri dari ibu rumah tangga dan buruh petani agar bisa mandiri secara ekonomi melalui kegiatan keterampilan menjahit yang kemudian berkembang menjadi usaha konveksi mukena, celana kolor, seragam sekolah, dan lain sebagainya.

Kegiatan lain yang dikembangkan oleh Yasanti adalah Usaha Bersama (UB) simpan pinjam. Beberapa UB yang terbentuk di Kebonrejo adalah UB Setia Dewi, UB Jujur, UB Sederhana, dan UB Larasati yang memiliki usaha konveksi pakaian, celana, mukena seragam sekolah, dan lain sebagainya. Keanggotaan masing-masing kelompok

berkisar antara 25-56 orang.

Pelaksanaan program UB didukung dengan latihan-latihan kepemimpinan agar kelompok dampingan di Kebonrejo dapat mengelola UB dengan baik. Salah satu latihan yang pernah diberikan Yasanti adalah Latihan Dasar Kepemimpinan Wanita (LDKW) pada tahun 1987 dan 1988 yang dimaksudkan sebagai bekal agar kaum perempuan dapat melakukan kerjasama, komunikasi, memimpin organisasi, dan mendayagunakan modal kelompok. Yasanti juga mengadakan latihan pembukuan untuk anggota kelompok agar mereka dapat mengelola buku kas harian, buku simpanan anggota, buku pinjaman, buku notulen, buku tamu, buku identitas anggota, buku pembelian barang, buku penjualan barang, buku rekapitulasi, buku neraca, buku rugi/laba.

Sejak tahun 1994, Yasanti tidak lagi melakukar pendampingan perempuan di Kebonrejo secara intensif Namun, kelompok-kelompok yang telah terbentuk tetap melakukan kegiatan secara mandiri dan tetap melakukan komunikasi serta tetap menjalin hubungan dalam bentuk konsultasi dan peminjaman modal oleh Yasanti kepada kelompok.

3.2. Buruh Perempuan di Ungaran

Pada tahun 1982, Yasanti bekerja sama dengan Studi Pembangunan (LSP) dan LKBHuWK (Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga) melakukan penelitian tentang tenaga kerja perempuan di sektor formal di kawasan industri Ungaran. Penelitian tersebut diketuai oleh Saraswati Sunindyo. Dari penelitian di

lapangan tersebut, para aktivis Yasanti melihat realita kondisi buruh perempuan sangat memprihatinkan.

Buruh perempuan mendapatkan upah yang lebih rendah dibandingkan buruh laki-laki, mereka tidak mendapatkan jaminan kesehatan dan gizi yang baik, tidak memiliki keterampilan, tidak memahami hak-hak mereka sebagai buruh, serta rawan menghadapi pelecehan seksual. Banyaknya buruh perempuan yang menyerbu pasaran kerja dan rendahnya kualitas dan keterampilan yang mereka miliki mengakibatkan pihak perusahaan dapat dengan leluasa memperlakukan buruh perempuan. Kesulitan memasuki pasar kerja dan rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan posisi buruh perempuan semakin terpojok. Mereka tidak memiliki alternatif lain selain bersikap lunak, menerima upah rendah, kondisi kerja yang buruk, fasilitas kesehatan yang sangat minim dan tidak ada jaminan kesejahteraan. Penindasan, kesewenang-wenangan, dan ketidakadilan telah berlangsung dalam kurun waktu yang lama, sehingga buruh perempuan menghadapinya sebagai suatu kewajaran tanpa berdaya untuk melepaskan diri dari kondisi sulit yang mereka hadapi karena pengetahuan tentang hak-hak buruh sangat rendah

Fenomena marjinalisasi buruh perempuan tersebut mendorong Yasanti untuk membantu buruh perempuan keluar dari keterpurukan mereka. Kusyuniati dan kawan-kawannya meyakini bahwa buruh perempuan sebenarnya memiliki potensi atau kemampuan untuk keluar dari kesulitan yang mereka hadapi. Untuk itulah, sejak akhir tahun 1982, Yasanti membantu buruh perempuan di

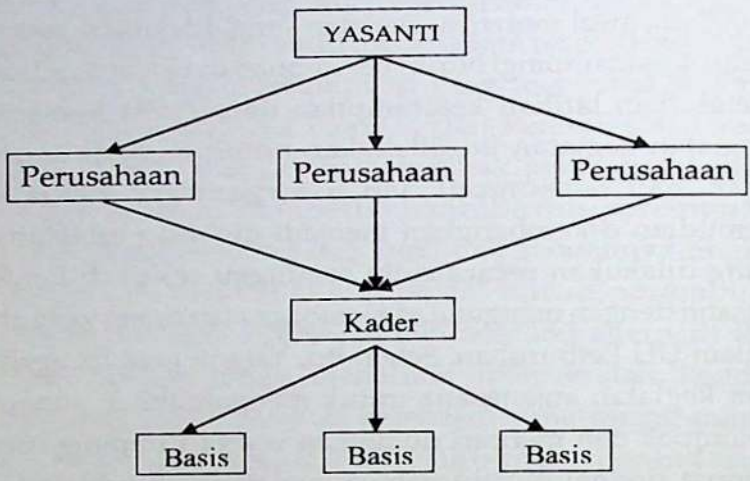
Ungaran memecahkan permasalahan-permasalahan mereka dengan melakukan pengorganisasian buruh untuk memberikan kesadaran akan peranan dan keberadaan buruh, serta memberikan kepercayaan diri sebagai seorang manusia yang memiliki harga diri.

Pada awal mulanya, kegiatan yang dilakukan Yasanti untuk mendampingi buruh perempuan di Ungaran adalah melakukan latihan keterampilan dan Usaha Bersama. Kegiatan-kegiatan ini dilakukan untuk menarik buruh agar mau berkumpul dan berorganisasi. Kegiatan kemudian dikembangkan menjadi diskusi perburuhan yang dilakukan secara rutin seminggu sekali di kantor Yasanti dengan mengundang lembaga atau orang yang ahli dalam UU Perburuhan. Selain itu, Yasanti juga mengadakan kegiatan anjangsana untuk mengakrabkan anggota kelompok dan mencari dukungan warga kampung (desa tempat tinggal buruh) bahwa kegiatan yang dilakukan dalam pertemuan buruh bukanlah kegiatan yang negatif. Acara anjangsana juga diisi dengan diskusi mengenai permasalahan-permasahan kelompok atau permasalahan perusahaan dan terkadang diisi pula dengan pembahasan buku-buku perburuhan. Yasanti juga mengadakan latihan kepemimpinan bagi buruh, latihan teater buruh, dan penyuluhan kesehatan yang pelaksanaannya kerjasama dengan lembaga lain, seperti PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) dan lain sebagainya.

Pengorganisasian buruh di Ungaran dilakukan dengan sistem *getok tular* (pemberitahuan atau ajakan dari mulut ke mulut) dari satu buruh ke buruh lainnya, hingga akhirnya terbentuk beberapa kelompok dengan jumlah

anggota kelompok antara 15-20 orang. Model pengorganisasian buruh di Ungaran dapat disimak pada gambar berikut ini.

Gambar 1.1.
Model Pengorganisasian Buruh di Ungaran



Jumlah kelompok buruh yang menjadi dampingan Yasanti di Ungaran senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Berikut ini adalah tabel tentang jumlah kelompok buruh dan kegiatan yang mereka lakukan bersama Yasanti sejak tahun 1988 hingga 1998.

Tabel 1.2.
Jumlah dan Kegiatan Kelompok Buruh Industri
di Ungaran Tahun 1988-2007

	TAHUN																		
	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07
Jumlah Kelompok	12	10	10	14	9	15	8	6	6	6	6	6	5	5	4	4	4	4	3	2
Kegiatan	Mj UB KK	Mj UB	MJ UB	Mj DP Aj	Mj DP Aj	Mj KT Aj DP	Mj KT Aj Dk DP	Mj KT Aj Dk DP	Mj KT Aj Dk DP	Mj KT Aj Dk DP	Mj KT Aj Dk DP	DP	DP	DP	DP	DP	DP	DP	DP	DP

Keterangan:

Mj	: Menjahit	Aj	: Anjangsana
UB	: Usaha Bersama	KT	: Kursus Tas
KK	: Koperasi Konsumsi	Dk	: Dekorasi
DP	: Diskusi Perburuhan		

Mobilitas buruh yang sangat tinggi menjadi kendala yang dihadapi Yasanti dalam melakukan pengorganisasian buruh di Ungaran. Tidak jarang anggota kelompok yang sudah didampingi Yasanti dan mampu untuk mengembangkan kelompok berhenti di tengah jalan akibat berpindah kerja ke tempat lain, mengikuti suami, atau pulang ke desanya. Hal ini menyebabkan kegiatan yang sudah berjalan, berhenti di tengah jalan atau berkurang anggotanya. Kondisi ini pula yang menyebabkan anggota kelompok dampingan di Ungaran berganti-ganti orang sepanjang waktu, sehingga menyebabkan Yasanti senantiasa harus kembali melakukan pengorganisasian dari awal. Namun, sesuai komitmen Yasanti sebagai ornop perempuan pembela buruh perempuan, hingga saat ini komunitas buruh industri di Ungaran tetap menjadi basis utama aktivitas Yasanti.

Kegiatan yang dilakukan pada saat sekarang adalah penguatan organisasi buruh, penguatan jaringan, lobi, pelatihan, kampanye, *talkshow* di radio, *hearing*, dan lain sebagainya. Hal ini tentu tidak dapat dilakukan pada awal pendampingan Yasanti di Ungaran. Akan tetapi, sesuai dengan perkembangan gerakan buruh yang ada dan dengan adanya kebebasan berserikat, maka peran Yasanti lebih pada mitra yang mendukung sesuai kebutuhan mereka.

3.3. Pramuniaga di Yogyakarta

Seiring dengan perjalanan waktu dalam memberdayakan buruh perempuan di Ungaran, Yasanti mendapati bahwa kehidupan buruh perempuan di sektor niaga tidak berbeda jauh dengan buruh perempuan di sektor industri yang ditandai oleh upah di bawah standar, tidak ada jamsostek, tidak ada jaminan kesehatan dan hak cuti, serta jam kerja yang panjang. Terdorong oleh keprihatinan pada kondisi yang menimpa pramuniaga sejak tahun 1986, Yasanti mengadakan program pendampingan pramuniaga beberapa toko di Jalan Malioboro, Yogyakarta, yaitu pramuniaga Toko Ramai, Toko Liman, dan Toko Samijaya. Kelompok mitra Yasanti kemudian meluas meliputi pramuniaga di Jalan Solo dan Jalan Gejayan (sekarang menjadi Jalan Afandi), Yogyakarta.

Pendampingan pramuniaga dilakukan Yasanti melalui kegiatan-kegiatan keterampilan, yaitu kursus menjahit, kursus mengetik, dan kursus Bahasa Inggris dengan mendatangkan instruktur khusus. Sebagaimana cara yang dilakukan Yasanti di Ungaran, sistem *getok tular* juga digunakan untuk mengajak para pramuniaga mengikuti kegiatan Yasanti. Selain kegiatan-kegiatan kursus, setiap setengah bulan sekali Yasanti bekerjasama dengan LBH mengadakan diskusi UU Perburuhan untuk membahas masalah upah, perjanjian kerja, jam kerja, penyelesaian masalah perselisihan perburuhan, jaminan kerja, dan hak cuti. Diskusi perburuhan juga dilakukan pada acara kursus jika instruktur tidak datang.

Diskusi-diskusi perburuhan membuahkan manfaat positif bagi pramuniaga. Berkat diskusi itu beberapa

pramuniaga sudah mulai berani mencoba menanyakan hak cuti dan perhitungan jam lembur. Demikian pula jika ada pramuniaga yang diperlakukan tidak adil, misalnya, dituduh menghilangkan uang dari toko padahal dia tidak melakukannya, maka pramuniaga tersebut berkonsultasi atau meminta pendapat Yasanti.

Untuk mempermudah komunikasi antarpramuniaga, kelompok-kelompok pramuniaga dampingan Yasanti membentuk forum komunikasi pramuniaga Yogyakarta sebagai sarana pertemuan dan pengumpulan informasi permasalahan-permasalahan perburuhan. Pembentukan forum komunikasi ini juga bertujuan untuk menunjukkan pada masyarakat bahwa profesi pramuniaga tidaklah negatif sebagaimana anggapan masyarakat.

Jumlah kelompok pramuniaga dampingan Yasanti juga mengalami pasang surut seperti tampak pada tabel berikut.

Tabel 1.3.
Jumlah dan Kegiatan Kelompok Pramuniaga di Yogyakarta
Tahun 1987-2007

	TAHUN																		
	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07
Jumlah Kelompok	10	6	3	4	8	4	3	7	9	9	6	4	4	1	-	-	-	-	-	-
Kegiatan	Mj Mg BI UB	Mj Mg BI UB	Mj Mg BI	Mj Mg BI	Mj Mg BI	Mj	Mj BI	Mj DP	Mj BI DP	DP	DP	DP	DP	DP						

Keterangan:

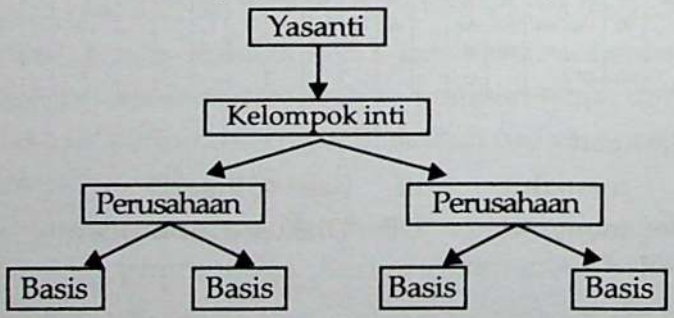
Mj : menjahit
Mg : mengetik
BI : Bahasa Inggris
DP : Diskusi Perburuhan

3.4. Buruh PT Sritex Sukoharjo

Aktivitas pendampingan buruh PT Sritex Sukoharjo berawal pada tahun 1992 ketika para mantan anggota kelompok dampingan dari PT Batamtex Ungaran yang berpindah kerja ke PT Sritex Sukoharjo meminta Yasanti melakukan pendampingan buruh di Sukoharjo. Di tempat kerja yang baru, para mantan buruh PT Batamtex merasakan bahwa mereka juga mendapatkan perlakukan yang tidak memuaskan dari pihak perusahaan, sehingga kemudian meminta Yasanti mendampingi mereka di Sukoharjo. Oleh karena itu, kebanyakan anggota kelompok dampingan Yasanti di Sukoharjo adalah mantan buruh PT Batamtex Ungaran yang di-PHK menyusul aksi demonstrasi buruh di PT Batamtex tahun 1992.

Tidak seperti di Ungaran dan Yogyakarta, media untuk menarik buruh agar mengikuti kegiatan Yasanti tidak dilakukan melalui kursus keterampilan, tetapi melalui media arisan dan UB (simpan pinjam). Kelompok arisan kemudian membentuk kelompok inti. Anggota kelompok inti masing-masing membentuk kelompok baru. Model pengorganisasian buruh di Sukoharjo dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1.4.
Model Pengorganisasian Buruh di Sukoharjo



Kegiatan utama yang dilakukan Yasanti bersama buruh PT Sritex Sukoharjo adalah pertemuan kelompok yang terdiri dari pertemuan kelompok kader dan pertemuan antara kader dengan anggota kelompoknya. Pertemuan kelompok kader (kelompok inti) dilakukan sebulan dua kali di kantor Yasanti Sukoharjo. Pertemuan ini bertujuan untuk menyempurnakan dan mempertajam kemampuan beranalisis kader dalam melihat masalah yang sedang terjadi di perusahaan maupun dalam kelompok yang mereka bentuk. Pertemuan ini juga menjadi forum untuk mendiskusikan atau mengaji ulang peraturan-peraturan pemerintah yang berhubungan dengan perusahaan.

Pertemuan bentuk kedua, yaitu pertemuan masing-masing kader dengan anggota kelompok yang mereka bentuk dilakukan di rumah anggota kelompok secara bergilir. Pertemuan mendiskusikan masalah-masalah perburuhan yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman anggota atau melihat situasi kelompok. Para kader harus berhati-hati dalam menyampaikan pendidikan perburuhan, sebab jika tidak demikian, anggota kelompok akan merasa takut untuk datang lagi dalam pertemuan kelompok karena mengira akan diajak melawan perusahaan atau dikeluarkan dari pekerjaannya karena mengikuti pertemuan kelompok tersebut. Untuk mensosialisasikan masalah perburuhan pada buruh dan masyarakat, serta sebagai kamuflase untuk menutupi kegiatan pengorganisasian, buruh Yasanti mengadakan latihan karawitan dan menari. Latihan ini tidak saja diikuti oleh buruh, tetapi juga oleh masyarakat sekitar. Kegiatan Yasanti beserta jumlah jumlah kelompok dampingan di Sukoharjo sejak

tahun 1992 bisa disimak pada tabel berikut.

Tabel 1.5.
Jumlah dan Kegiatan Kelompok Buruh di Sukoharjo
Tahun 1992-1995

	TAHUN			
	1992	1993	1994	1995
Jumlah Kelompok	5	6	7	5
Kegiatan	DP Adv	DP Aj Tr Kr	DP Kr Aj	DP Aj

Keterangan:
DP : Diskusi Perburuhan
Adv : Advokasi
Aj : Anjangsana
Kr : Karawitan
Tr : Tari

Salah satu kendala yang dihadapi Yasanti di Sukoharjo adalah mobilitas buruh yang sangat tinggi, buruh-buruh yang berasal dari PT Batamtex sudah banyak yang berpindah kerja ke perusahaan-perusahaan lain di Bandung, Jakarta, Ungaran, dan lain-lain, sehingga pencapaian keberhasilan diskusi-diskusi perburuhan untuk memandirikan buruh sulit dilihat. Kendala kedua adalah timbulnya rasa bosan di kalangan buruh akibat kegiatan kelompok yang monoton dan akhirnya mereka tidak aktif lagi dalam kegiatan. Kendala ketiga adalah kesulitan Yasanti untuk mengorganisir buruh perempuan akibat kebanyakan

buruh perempuan tidak tertarik atau takut untuk mengikuti kegiatan diskus. Padahal menurut Perencanaan Strategis (Renstra) Yasanti tahun 1995, sasaran kelompok di Sukoharjo adalah buruh perempuan. Kendala-kendala tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Yasanti untuk melepas pendampingan buruh di Sukoharjo yang dimulai dengan proses *passing out*, yaitu tetap melakukan kegiatan dan komunikasi, namun tanpa PL (Petugas Lapangan) yang tinggal di Sukoharjo. Kegiatan Yasanti di Sukoharjo berakhir pada tahun 1996.

3.5. Remaja Putus Sekolah

Pendampingan remaja putus sekolah berawal pada tahun 1986 ketika Yasanti memutuskan untuk ikut memberdayakan remaja putri putus sekolah sebagai bagian dari tanggung jawab dan kepedulian Yasanti pada kaum perempuan yang tinggal di sekitar kantor Yasanti.

Kegiatan yang dilakukan Yasanti meliputi keterampilan menjahit yang dilakukan seminggu dua kali di kantor Yasanti. Selain itu, Yasanti juga mengadakan kegiatan Usaha Bersama dengan melakukan pertemuan arisan dan simpan pinjam dua kali setiap bulan. Dalam acara pertemuan kelompok, diadakan juga latihan keterampilan yang berhubungan dengan keterampilan praktis sesuai dengan kebutuhan anggota kelompok tersebut. Disamping itu, mereka juga diberikan bekal latihan keberanian dengan berbagai keterampilan berbicara di depan umum, mengelola organisasi, dan hal-hal yang berhubungan dengan kemandirian organisasi.

Keanggotaan kelompok remaja putus sekolah mengalami pasang surut karena anggota menikah atau pindah ke daerah lain. Hingga saat ini, kegiatan kelompok remaja putri putus sekolah masih berjalan. Namun, nama remaja putus sekolah diganti dengan perempuan pekerja. Hal ini disebabkan nama remaja putus sekolah sudah tidak relevan lagi karena anggota kelompok remaja putus sekolah kebanyakan sudah dewasa dan bekerja di berbagai bidang yang ada. Paguyuban merupakan gabungan dari kelompok remaja putus sekolah. Adapun kegiatan paguyuban lebih beragam sesuai dengan kebutuhan terutama materi pertemuan yang tidak saja mendiskusikan mengenai organisasi, tetapi juga mendiskusikan mengenai keadilan gender, kedaulatan pangan, partisipasi politik perempuan, kesehatan reproduksi, dan lain sebagainya.

Tabel 1.6.
Jumlah dan Kegiatan Kelompok Remaja Putri
Putus Sekolah/Paguyuban Perempuan Pekerja
Tahun 1987-2007

	TAHUN																			
	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07
Jumlah Kelompok	8	3	3	2	4	4	4	4	6	12	12	12	12	8	8	7	1	1	1	1	1
Kegiatan	Mj UB	Mj UB	Mj UB	Mj UB	Mj UB	Mj BI	Mj BI	Mj UB	Mj KT UB	K UB	K UB	K UB	K UB	K UB	K UB	K UB	K UB	K UB	K UB	K UB	K UB

Keterangan:

Mj : Menjahit
UB : Usaha Bersama
BI : Bahasa Inggris
KT : Kursus Tas
K : Konveksi

3.6. Buruh Gendong (*Endong-Endong*)

Pendampingan buruh gendong di Pasar Beringharjo, Yogyakarta, dimulai pada tahun 1994. Sebelumnya, Yasanti telah akrab dengan kehidupan buruh gendong karena pernah melakukan penelitian tentang buruh gendong pada tahun 1987. Pengalaman selama melakukan penelitian menyadarkan Yasanti bahwa buruh gendong menanggung pekerjaan berat yang rawan mengganggu kesehatan mereka. Tidak jarang buruh gendong mendapatkan perlakuan kasar dari pedagang atau pembeli yang menggunakan jasa mereka, sementara upah yang mereka dapatkan sangat kecil. Sementara itu, buruh gendong yang masih muda terkadang mengalami pelecehan seksual. Kondisi-kondisi itu mendorong Yasanti memperluas langkah pemberdayaan perempuan dengan melakukan program untuk buruh gendong.

Buruh gendong yang didampingi Yasanti semula hanya meliputi buruh yang tinggal (kos) di daerah ledok Ratmakan dan Cokrodirjan (daerah cekungan di pinggiran Sungai Code) yang terletak di timur laut Pasar Beringharjo. Lama kelamaan, buruh gendong yang tidak tinggal di ledok Ratmakan atau Cokrodirjan juga tertarik untuk mengikuti kegiatan Yasanti, sehingga mereka membentuk kelompok-kelompok sendiri. Pada mulanya kelompok buruh gendong terdiri dari kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan sekitar 20-30 orang. Akan tetapi, mulai tahun 2001 kelompok-kelompok tersebut bergabung dalam paguyuban buruh gendong yang merupakan organisasi baru yang dibentuk atas inisiatif buruh gendong yang ada. Paguyuban tersebut dinamai dengan paguyuban "Sayuk

Rukun" yang berarti adanya kebersamaan dalam berorganisasi menjadi buruh gendong di pasar semakin saling mengenal, membangun solidaritas, dan rukun selalu.

Mulai tahun 2005, Yasanti mulai mendampingi buruh gendong yang bekerja di Pasar Giwangan di mana sebagian besar dari mereka adalah buruh gendong yang bekerja di sekitar Pasar Sriwedari yang dipindahkan ke Giwangan. Adapun kegiatan buruh gendong Pasar Beringharjo biasanya menggunakan lantai dasar Masjid Al-Muttaqien yang terletak di kawasan Pasar Beringharjo. Sedangkan untuk kegiatan buruh gendong Pasar Giwangan menggunakan tempat tinggal (kos) buruh gendong.

Kegiatan yang hingga saat ini masih rutin berlangsung adalah Usaha Bersama simpan pinjam, pemeriksaan kesehatan bekerja sama dengan PKBI Yogyakarta, diskusi mengenai persoalan perempuan, kesehatan reproduksi, pendidikan anak, partisipasi politik, keadilan gender, kemandirian organisasi, spiritualitas, dan lain sebagainya. Adapun jumlah anggota kelompok buruh gendong di Pasar Beringharjo saat ini sekitar 150 orang, sedangkan jumlah buruh gendong di Pasar Giwangan sekitar 90 orang.

3.7. Buruh Rumahan

Pendampingan buruh rumahan dilakukan Yasanti mulai tahun 2008. Hal ini didasari atas banyaknya perempuan yang melakukan pekerjaan di dalam rumah atas usaha sendiri atau melakukan pekerjaan di luar rumah karena mendapat pekerjaan dari orang lain. Sebagian dari mereka adalah dampak adanya sistem *outshorshing* yang diberlakukan perusahaan. Secara umum pekerja rumahan

terdapat di berbagai daerah di Indonesia dan telah memliki wadah organisasi serta jaringan nasional maupun internasional. Untuk tingkat Indonesia, mereka masuk dalam Himpunan Pekerja Rumahan Indonesia yang bermitra dengan Mitra Pekerja Rumahan Indonesia yang juga dinamakan Homenet Indonesia. Homenet sendiri merupakan jaringan Pekerja Rumahan di tingkat internasional.

Buruh rumahan yang didampingi Yasanti dimulai dari pelaksanaan pelatihan kepemimpinan bagi buruh rumahan yang diadakan pada tahun 2008. Tindak lanjut dari kegiatan tersebut dibentuk kelompok buruh rumahan yang melakukan beberapa kegiatan antara lain diskusi, pelatihan, dan kegiatan jaringan. Jumlah buruh rumahan yang mengikuti kegiatan masih sedikit dan baru terbentuk satu kelompok yang beranggotakan 15 orang.

Saat ini Yasanti tetap memfokuskan diri untuk melakukan pendampingan kelompok perempuan pekerja dan buruh di Ungaran, buruh gendong di Pasar Beringharjo dan Giwangan, perempuan pekerja, buruh rumahan, dan pramuniaga di Yogyakarta. Beberapa kelompok dampingan yang lain, yaitu perempuan di Kulonprogo masih melakukan kegiatan secara mandiri. Kondisi kelompok-kelompok perempuan yang didampingi Yasanti bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.7.
Kegiatan dan Status Kelompok Dampingan Yasanti

Nama Kelompok Dampingan	Sejak	Kegiatan	Status saat ini
Perempuan buruh tani Kulonprogo	1982	Menjahit, Usaha Bersama (UB), latihan kepemimpinan, diskusi dls.	Masih aktif 3 kelompok yang berjalan mandiri
Perempuan buruh pabrik di Ungaran	1982	Penelitian, pengorganisasian, diskusi perburuhan, pembelaan kasus, advokasi, pelatihan, kampanye, ketrampilan, usaha bersama, jaringan dll	Masih aktif sampai saat ini (penguatan buruh perempuan)
Perempuan pramuniaga	1986	Penelitian, pengorganisasian, diskusi perburuhan, advoasi, kampanye kursus ketrampilan, mengetik, kursus Bahasa Inggris, dll	Kegiatan berhenti tahun 1996 dan mulai lagi tahun 2008
Perempuan buruh industri di Sukoharjo	1992	Penelitian, pengorganisasian, diskusi perburuhan, pembelaan kasus, advokasi, pelatihan, kampanye, ketrampilan, kesenian karawitan, usaha bersama dll	Kegiatan berhenti tahun 1996
Remaja putri putus sekolah/ pekerja perempuan	1986	Pengorganisasian, pelatihan, Usaha Bersama, diskusi, ketrampilan dll.	Kelompok berjalan secara mandiri
Buruh gendong	1994	Penelitian, Usaha Bersama, usaha alternatif, pemeriksaan kesehatan, diskusi, pelatihan, ketrampilan, keaksaraan fungsional, dll.	Hingga saat ini masih menjadi kelompok dampingan Yasanti
Buruh Ruimahan	2008	Usaha mandiri dan diskusi kelompok	Baru mulai

4. Jaringan Kerjasama

Yasanti memiliki banyak jaringan kerjasama dengan berbagai lembaga, ornop, atau forum yang tersebar di lingkup regional, nasional, maupun lokal (DIY). Kerjasama untuk membentuk jaringan ini telah dilakukan sejak Yasanti berdiri. Dalam jaringan ACFOD, Yasanti pernah diundang untuk menghadiri pertemuan pertama ornop se-Asia-Eropa di Bangkok Thailand tanggal 26-28 Februari 1996. Pertemuan Ornop se-Asia-Eropa membahas agenda tentang hak asasi manusia yang meliputi isu-isu buruh, perempuan, lingkungan, dan kebijakan-kebijakan ekonomi, sosial dan politik dalam lingkup Asia dan Eropa. Dalam pertemuan itu, Yasanti diundang untuk melakukan presentasi

tentang *labour solidarity*. Sebagai ornop perempuan yang peduli dengan persoalan buruh, Yasanti menjadi anggota forum CAW (*Central Asian Women*) dan APWSL (*Asia-Pacific Workers's Solidarity Link* -bagian dari ACFOD yang menangani proyek perburuhan). Yasanti secara rutin selalu hadir dalam pertemuan CAW dan APWSL. Yasanti juga menjadi anggota INGI yang sekarang bernama INFID (*International Forum on Indonesian Development*), sebuah forum beranggotakan ornop-ornop yang tersebar di seluruh Indonesia dan memiliki jaringan internasional sebagai bagian dari upaya untuk menekan pemerintah Indonesia agar memperhatikan kepentingan rakyat dan hak asasi manusia. Akibat menjadi partisipan INFID pada masa pemerintahan Soeharto, Yasanti yang diwakili oleh Kusyuniati pernah dipanggil ke Koramil dan diwajibkan melaporkan seluruh aktivitasnya ke kantor Direktorat Sosial Politik.

Forum lain yang diikuti Yasanti adalah *Global Alliance Against Traffic in Women* (GAATW). Dalam forum ini Yasanti mendapatkan banyak pengalaman dalam menangani kasus perdagangan perempuan. Salah satu pertemuan yang pernah diikuti Yasanti dalam forum GAATW adalah pertemuan untuk membahas perdagangan perempuan, yaitu mengaji konvensi internasional tentang HAM dan mengidentifikasi serta mendokumentasikan kasus-kasus perdagangan perempuan.

Di tingkat nasional, Yasanti menjadi anggota Walhi (Wahana Lingkungan Hidup), GAKTPI (Gerakan Anti Kekerasan terhadap Perempuan Indonesia), dan jaringan ornop antarburuh. Keanggotaan dalam WALHI sudah

diikuti sejak tahun 1980-an. Keikutsertaan dalam GAKTPI dilakukan sejak gerakan ini terbentuk pada tahun 1998 sebagai reaksi atas aksi kekerasan terhadap perempuan pada peristiwa kerusuhan Mei tahun 1998. Sementara itu, jaringan ornop antarburuh Jakarta-Yogyakarta-Surabaya sudah diikuti sejak tahun 1980-an. Saat ini, jaringan antar-ornop buruh sedang membentuk Sindikasi Gerakan Buruh Independen (SGBI) untuk memperkuat jaringan kerjasama dalam menangani persoalan-persoalan buruh.

Di tingkat lokal (DIY), Yasanti adalah salah satu pendiri dan anggota Forum LSM DIY yang berdiri pada tahun 1986. Yasanti senantiasa aktif mengikuti aksi-aksi yang dilakukan forum LSM DIY. Yasanti ikut menyampaikan pernyataan forum tentang kebebasan buruh untuk berorganisasi yang disampaikan ke DPR-RI dalam acara dengar pendapat pada tanggal 4 Oktober 1995 bersama-sama dengan LBH, Format, Fatayat NU, Prakarsa, Lapera, LPBHN, dan Forum Bumi. Yasanti juga mengambil bagian dalam kampanye kesetaraan gender yang diadakan Forum LSM DIY pada tanggal 14 Januari 1996 serta menjadi anggota Komite Anti Kekerasan terhadap Perempuan (KAKP) yang dibentuk pasca-Konferensi Beijing. Belakangan, Yasanti juga berpartisipasi dalam forum penanganan korban kekerasan terhadap perempuan DIY, menjadi anggota tim koordinasi pembangunan berperspektif gender, mengikuti kegiatan di Jaringan Perempuan Yogyakarta, Aji Damai, dan lain sebagainya.

Pertemuan-pertemuan yang dilakukan di jaringan maupun forum dirasa sangat penting karena dapat membuka pintu untuk melakukan jaringan regional dan inter-

nasional. Hal ini menjadi akses agar Yasanti dapat mengambil kesempatan yang ada di dunia internasional, nasional, dan lokal dalam melakukan pengembangan lembaga. Jaringan juga dirasa penting untuk pengayaan informasi dan pengayaan teman seperjuangan yang diharapkan dapat memberikan dukungan bagi langkah-langkah advokasi Yasanti.



Bab 2

DINAMIKA GERAKAN: DARI PENDEKATAN *WOMEN IN DEVELOPMENT* KE ISU KESEHATAN REPRODUKSI

A. Wacana Keperempuanan Global

1. Penyebaran Pendekatan *Women in Development* (WID)

Sejarah penyebaran pendekatan WID bermula ketika pada awal dekade 1970-an sekelompok perempuan praktisi pembangunan di Washington yang tergabung dalam *Women's Committee of the Washington D.C. Chapter of the Society for International Development* memperkenalkan istilah *Women in Development* (WID). Pengalaman-pengalaman yang mereka dapatkan selama bertugas dalam misi pembangunan di luar negeri telah mendorong mereka untuk menolak konsep *trickle down* dalam teori pembangunan karena proses pembangunan ternyata tidak memperbaiki status dan hak-hak perempuan, namun justru merugikan kehidupan perempuan. Terinspirasi oleh

pemikiran Ester Boserup tentang peran penting perempuan dalam pembangunan ekonomi, sekelompok praktisi Amerika ini kemudian membangun jaringan dengan perempuan di lembaga-lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa dan para akademisi perempuan yang memiliki minat dalam penelitian tentang dampak proses pembangunan bagi kaum perempuan. Mereka juga berhasil memengaruhi pemerintah Amerika Serikat, sehingga mengeluarkan *The Percy Amendment* bagi Undang-Undang Bantuan Luar Negeri pada tahun 1973 yang menetapkan perhatian khusus kepada perempuan dalam program pembangunan internasional. Amandemen Amerika Serikat ini memengaruhi Perserikatan Bangsa-Bangsa, sehingga pada tahun 1975, PBB mengeluarkan kebijakan "Dasawarsa untuk Perempuan 1976-1985". Sejak saat itu, berbagai kebijakan diadopsi ke dalam kehidupan kaum perempuan Dunia Ketiga (Fakieh, 2000: 96).

Pendekatan WID dilandasi oleh pandangan kaum feminis liberal bahwa keterpurukan perempuan berakar dari stereotip peran perempuan sebagaimana dikehendaki laki-laki, diinternalisasikan dan disosialisasikan kepada kaum perempuan. Keterpurukan yang dialami kaum perempuan dapat dihapuskan melalui pendobrakan stereotip tersebut, antara lain dengan memberikan pendidikan yang lebih baik bagi anak perempuan, mengeluarkan UU yang anti diskriminasi atau dengan memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk masuk ke dalam pasaran tenaga kerja (Razavi dan Miller, 1995: 9).

Menurut pendekatan, WID perempuan adalah

anggota masyarakat yang produktif. Perempuan bukanlah agen yang pasif dalam pembangunan, justru sebaliknya perempuan berperan aktif dalam pembangunan ekonomi. Namun, keterbatasan akses dan kontribusi perempuan di bidang ekonomi telah menyebabkan perempuan memiliki status yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Untuk memperbaiki status perempuan berhadap-hadapan dengan laki-laki, serta agar perempuan dapat memberikan sumbangan positif bagi pembangunan, maka perempuan perlu diintegrasikan ke dalam sektor ekonomi (Razavi dan Miller, 1995: 11).

Strategi pengintegrasian perempuan ke dalam sektor ekonomi dilakukan melalui proyek-proyek *income-generating*, misalnya industri rumah tangga yang memproduksi makanan kecil atau usaha konveksi pakaian. Proyek *income-generating* ditujukan untuk memperbaiki pendapatan kaum perempuan miskin guna memenuhi kebutuhan pokok, yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, dan bahan bakar. Kesempatan bagi perempuan untuk terlibat dalam proyek-proyek *income-generating* membuka akses ke sumber-sumber produktif yang semula didominasi oleh laki-laki, seperti tanah dan kredit (Mosse, 2003: 203, 205).

Pendekatan WID menyebar di negara-negara berkembang berkat kampanye yang dilakukan secara intensif oleh ilmuwan atau akademisi, advokat, dan para praktisi, yaitu laki-laki dan perempuan yang bekerja di berbagai lembaga yang menaruh perhatian pada pengintegrasian perempuan dalam pembangunan. Dalam konteks Indonesia, para praktisi ini, yang bekerja secara intensif dengan lembaga-lembaga donor, menekan ornop-ornop develop-

mentalis di Indonesia untuk menaruh perhatian pada isu-isu perempuan dan menggunakan pendekatan WID dalam program-program mereka. Sebagai respon atas tuntutan lembaga donor, banyak ornop developmentalis kemudian mengadakan program-program perempuan, mempekerjakan staf perempuan, membentuk kelompok-kelompok perempuan di komunitas yang mereka dampingi dan membentuk departemen perempuan dalam organisasi ornop. Pada saat yang bersamaan, organisasi-organisasi perempuan mulai bermunculan. Organisasi-organisasi ini menggunakan perspektif WID dalam program-program mereka untuk membantu kelompok-kelompok perempuan miskin dengan meningkatkan kemampuan ekonomi mereka melalui pendidikan dan pelatihan (Muchtar, 2000: 6-7).

2. Pergeseran ke Pendekatan *Gender and Development* (GAD)

Sejak akhir 1970-an, pendekatan WID mulai mendapatkan kritikan. Pendekatan WID dianggap kurang memerhatikan sifat hubungan subordinasi yang lebih mendasar, meskipun pendekatan ini telah berupaya melepaskan subordinasi terhadap perempuan. Kelemahan pendekatan WID terletak pada pandangannya bahwa akar masalah subordinasi terhadap perempuan adalah kurangnya akses perempuan pada sumber daya produktif. Pandangan semacam itu mengabaikan persoalan relasi gender yang justru menjadi penghambat utama akses perempuan ke sumber-sumber produktif. Kritik tersebut melahirkan pendekatan baru yang dikenal dengan sebutan *Gender and Development* (GAD), (Razavi dan Miller, 1995: 18).

Pendekatan GAD berbeda dengan pendekatan WID (dan juga WAD) dalam analisisnya terhadap asal dan struktur penindasan perempuan, serta bagaimana pendekatan itu dapat mengubah posisi perempuan Dunia Ketiga. Berbeda dengan pendekatan WID yang menekankan pentingnya persamaan (*equity*) kesempatan antara laki-laki dan perempuan, pendekatan GAD melihat keterpurukan perempuan disebabkan oleh relasi kekuasaan gender yang tidak adil antara laki-laki dan perempuan. Menurut pendekatan GAD, ketidakadilan relasi gender bukan hanya disebabkan oleh superioritas laki-laki, tetapi juga karena masih ada pola-pola tekanan dalam masyarakat akibat kolonialisme dan neo-kolonialisme. Pendekatan yang lahir dari pemikiran kaum feminis sosialis ini melihat sektor produksi dan reproduksi adalah basis penindasan perempuan. Oleh karena itu, pembebasan perempuan tidak cukup hanya dilakukan pada sektor reproduksi (domestik), tetapi juga pada bidang-bidang produktif (publik). Para penganjur pendekatan GAD, mengkritik teori-teori yang melahirkan pendekatan WID karena telah mendomestifikasi perempuan. Untuk mewujudkan emansipasi perempuan, pendekatan GAD memandang pentingnya partisipasi negara, bahkan negara berkewajiban melakukannya. Hal ini berkebalikan dengan pendekatan WID yang melihat negara sebagai pihak yang justru menuntut partisipasi perempuan dalam pembangunan yang dijalankan oleh negara (Harsono, 1997: 285, 293). Perbedaan antara pendekatan WID dan GAD bisa disimak pada tabel 2.1.

Pendekatan GAD masuk ke Indonesia pada pertengahan tahun 1990-an, ditandai oleh pelaksanaan

pelatihan-pelatihan gender oleh organisasi-organisasi perempuan, ornop-ornop, dan lembaga-lembaga donor secara intensif di seluruh pelosok Indonesia. Melalui pelatihan gender dan feminisme, mereka memperkenalkan isu-isu perempuan dan isu-isu gender, sehingga semakin banyak orang yang menaruh perhatian pada isu-isu perempuan. Peningkatan jumlah aktivis perempuan dan aktivis pro demokrasi yang menaruh perhatian pada isu-isu perempuan, menjadi faktor penting dalam perkembangan gerakan perempuan di Indonesia pada dekade 1990-an. Ketika kelompok-kelompok pro demokrasi di Indonesia mengangkat isu-isu hak asasi manusia pada pertengahan dekade 1990-an, organisasi-organisasi perempuan dengan mendapat pengaruh wacana GAD mengangkat isu hak-hak ekonomi dan politik bagi perempuan ke dalam wacana gerakan pro demokrasi. Mereka terutama menyoroti hubungan yang tidak adil antara laki-laki dan perempuan (Muchtar, 2000: 9, 11).

Tabel 2.1.
Perbedaan Pendekatan WID dan GAD

	WID	GAD
FOKUS	Partisipasi perempuan dalam pembangunan.	Relasi gender.
ASUMSI	Perempuan adalah kelompok termiskin dari yang miskin, kemiskinan sumber ketidakadilan bagi perempuan.	Subordinasi perempuan sumber ketidakadilan, perspektif pembangunan bukanlah sekedar pertumbuhan ekonomi.

TUJUAN	Memperbaiki pendapatan perempuan miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup mendasar (makanan, pakaian, tempat tinggal).	Pemberdayaan perempuan, transformasi struktur yang menindas.
STRATEGI	*Income-generating*, partisipasi ekonomi kolektif.	Penyadaran; pembentukan organisasi perempuan untuk mewujudkan kekuatan politik; peran negara, masyarakat, dan keluarga.
ORIENTASI STRATEGIS	Kesejahteraan dan efisiensi	Kesejahteraan untuk mewujudkan kesetaraan.

Penyebaran wacana GAD diperkuat oleh penyebaran isu hak asasi manusia di lingkup global. Pada tahun 1993, PBB menyelenggarakan Konferensi Internasional Hak Asasi Manusia di Wina. Konferensi yang menghasilkan Deklarasi dan Program Aksi Wina ini, pada butir ke-18 menyatakan bahwa hak asasi perempuan dan anak perempuan merupakan bagian integral dari hak asasi manusia secara universal. Partisipasi perempuan dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya di tingkat nasional, regional, dan internasional dan penghapusan semua bentuk diskriminasi seks menjadi prioritas utama masyarakat internasional. PBB menegaskan bahwa kekerasan berbasis gender dan semua bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual harus dihapuskan karena merupakan pelanggaran martabat umat manusia. Untuk itu, PBB mendesak pemerintah, lembaga-lembaga, organisasi pemerintah dan non-pemerintah mengintensifkan upaya-upaya perlindungan

dan promosi hak asasi perempuan dan anak perempuan. Seruan PBB, sebagaimana tertuang dalam Deklarasi dan Program Aksi Wina 1993, menjadi pendorong penyebaran wacana kesetaraan gender ke seluruh penjuru dunia sejak pertengahan dekade 1990-an.

Perhatian dunia pada isu gender kembali dibuktikan oleh PBB ketika pada tahun 1993 pula Majelis Umum PBB mengumumkan Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan. Hal ini membawa kemajuan yang sangat berarti dalam mengangkat isu-isu gender di tingkat global. Kelahiran Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan menjadi bukti bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan yang sebelumnya dianggap sebagai masalah non-politik telah digeser oleh pandangan bahwa masalah kekerasan terhadap perempuan adalah masalah politik yang perlu diperhatikan oleh dunia (Pettman, 2001: 594).

3. Penyebaran Isu Kesehatan Reproduksi

Bersamaan waktu dengan menyebarnya pendekatan GAD, persoalan kesehatan reproduksi berkembang menjadi isu yang banyak mendapat perhatian dari kalangan ornop perempuan. Isu kesehatan reproduksi mulai mengemuka sejak pertengahan dekade 1990-an setelah berlangsung konferensi internasional tentang kependudukan yang diselenggarakan oleh PBB di Kairo Mesir tahun 1994. Konferensi Kairo menghasilkan Program Aksi untuk mendukung upaya pemberdayaan perempuan, keadilan dan kesetaraan gender (butir 2), dan perwujudan hak-hak di bidang reproduksi dan kesehatan reproduksi bagi

perempuan sebagai bagian dari hak asasi perempuan (butir 5). Pada Bab VI dinyatakan bahwa hak reproduksi merupakan pengakuan hak mendasar dari semua pasangan dan individu untuk memutuskan secara bebas jumlah dan waktu untuk memiliki anak, mendapatkan perlindungan kesehatan reproduksi dan seksual, dan hak untuk membuat keputusan reproduksi yang bebas dari diskriminasi, penindasan, dan kekerasan sebagaimana tertuang dalam dokumen-dokumen HAM.

Program Aksi Kairo menjelaskan pengertian kesehatan reproduksi sebagai keadaan fisik, mental, dan sosial yang berhubungan dengan sistem, fungsi, serta proses reproduksi. Definisi ini mengandung pemahaman bahwa individu berhak memiliki kehidupan seks yang menyenangkan dan aman, memiliki kapabilitas untuk melakukan reproduksi dan kebebasan untuk memutuskan kapan dan bagaimana melakukannya. Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk mendapatkan informasi dan memilih alat KB yang cocok, aman, dan efektif. Perempuan juga memiliki hak dan akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan agar dapat hamil dan melahirkan dengan selamat, serta memiliki anak yang sehat.

Menurut Program Aksi Kairo, kampanye kesehatan reproduksi amatlah penting dilakukan mengingat masih banyak orang yang kurang memiliki pengetahuan seksualitas, kurang mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi, memiliki prevalensi perilaku seksual yang beresiko tinggi, mengalami diskriminasi praktik-praktik sosial, mengalami perlakuan buruk, terutama kaum perempuan dan anak-anak perempuan, serta keterbatasan perempuan dan anak-

anak perempuan dalam mengontrol sendiri kehidupan seksual dan reproduksi mereka.

Untuk menyukseskan implementasi kebijakan di bidang kependudukan sebagaimana tertuang dalam Program Aksi Kairo, PBB menyerukan agar organisasi-organisasi non-pemerintah, terutama yang bergerak di bidang kesehatan seksual, reproduksi dan keluarga berencana, dan organisasi-organisasi perempuan melakukan pendidikan masyarakat untuk menyukseskan pelaksanaan kebijakan-kebijakan di bidang kependudukan.

Seruan PBB tersebut disambut positif oleh organisasi-organisasi perempuan. Pada Konferensi Perempuan Sedunia Keempat di Beijing tahun 1995, isu kesehatan reproduksi menjadi salah satu agenda pokok yang dibahas dan kemudian dirumuskan dalam Rencana Aksi Beijing (*Beijing Platform of Action*). Konferensi Beijing mengakui bahwa HAM yang dimiliki perempuan meliputi hak untuk mengontrol dan memutuskan secara bebas semua hal yang berhubungan dengan seksualitas mereka, termasuk di antaranya kesehatan seksual dan reproduksi, penghormatan sepenuhnya pada integritas manusia, saling menghormati, dan tanggung jawab bersama dalam perilaku seksual.

B. Dinamika Agenda Gerakan Yasanti

1. Pengaruh Pendekatan WID

Kecenderungan gerakan perempuan menggunakan pendekatan *Women in Development* (WID) memengaruhi visi dan misi Yasanti pada dekade 1980-an. Implementasi

pendekatan WID yang menekankan isu ekonomi dan aspek-aspek yang bersifat *income-generating* mendorong Yasanti untuk melakukan pemberdayaan perempuan melalui program-program keterampilan yang memiliki nilai produktif untuk menghasilkan uang. Salah satu program keterampilan yang diberikan Yasanti adalah kursus menjahit untuk petani perempuan di Kebonrejo, Kulonprogo pada tahun 1985, buruh perempuan di Ungaran sejak tahun 1988, serta remaja putri putus sekolah dan pramuniaga di Yogyakarta sejak tahun 1987.

1.1. Strategi Masuk Komunitas

Sejak semula para aktivis Yasanti telah menyadari bahwa kelahiran Yasanti akan menimbulkan sinisme dari berbagai kalangan mengingat langkah untuk mewujudkar perubahan bagi kaum perempuan tidaklah mudah. Mereka melihat kondisi yang dialami perempuan telah menjadi sebuah tatanan sosial budaya yang kuat dan telah "disepakati" masyarakat, sehingga menjadikan gerakan Yasanti harus berbenturan dengan tatanan sosial budaya masyarakat.

Agar bisa masuk dengan mudah ke dalam komunitas perempuan dan tidak menimbulkan kecurigaan masyarakat, Yasanti melakukan strategi memanfaatkan organisasi PKK sebagai institusi yang diterima oleh pemerintah dan masyarakat. Kesengajaan Yasanti menggunakan organisasi PKK merupakan bagian dari strategi karena para aktivisnya menyadari bahwa mereka akan lebih mudah diterima masyarakat jika masuk melalui organisasi yang telah secara luas diakui oleh negara dan masyarakat. Meskipun pilihan

untuk masuk melalui PKK merupakan strategi Yasanti agar bisa membaur dengan mudah ke dalam komunitas perempuan dan tidak menimbulkan kecurigaan masyarakat, strategi itu telah membuat Yasanti mengalami kesulitan untuk secara langsung dan tegas mengajak kelompok dampingannya berdiskusi melancarkan kritik terhadap Orde Baru.

Organisasi PKK dimanfaatkan Yasanti sebagai wadah untuk memberdayakan kaum perempuan dengan jalan mengubah kegiatan PKK menjadi kegiatan yang positif dan bermanfaat. Di Kulonprogo pemberdayaan perempuan dilakukan dengan membina kegiatan keterampilan untuk anggota PKK yang sebagian besar terdiri dari ibu rumah tangga dan buruh petani agar bisa mandiri secara ekonomi

Yasanti memanfaatkan peluang yang tersedia dari pemerintah untuk mengembangkan kegiatan menjahit di Kulonprogo. Pada waktu itu, dalam rangka merespon penyebaran pendekatan WID, pemerintah mengadakan beberapa program pelatihan untuk meningkatkan pendapatan perempuan. Salah satu proyek yang dilakukan adalah program pelatihan untuk meningkatkan pendapatan perempuan melalui *mobile training unit* Balai Latihan Kerja Indonesia (BLKI) Departemen Tenaga Kerja. Yasanti berhasil mendapatkan bantuan pelatih menjahit secara gratis dari program tersebut.

Berkat dorongan Yasanti para perempuan di Kebonrejo, Kulonprogo, banyak yang tertarik untuk membentuk berbagai kelompok Usaha Bersama. Jenis usaha yang dilakukan sangat beragam, antara usaha konveksi mukena,

celana kolor dan seragam sekolah, ternak lele, penjualan barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari, dan lain sebagainya

Ketika Yasanti berdiri, wacana kesetaraan gender belum dikenal luas. Namun, Yasanti telah bertekad ingin membantu sesama perempuan dengan jalan memandirikan perempuan secara ekonomi. Yasanti tidak sekedar memberikan latihan keterampilan bagi kaum perempuan karena tujuan di balik itu adalah ingin menumbuhkan posisi perempuan dalam rumah tangga. Jika perempuan paham kalau secara ekonomis dia independen, maka dia akan bisa terlibat pengambilan keputusan dalam rumah tangga.

Untuk mewujudkan kemandirian ekonomi perempuan dan menumbuhkan posisi perempuan dalam rumah tangga, maka pertemuan PKK tidak semata-mata dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan Usaha Bersama atau program-program yang bersifat *income-generating*, namun juga dijadikan forum untuk melakukan penyadaran hak-hak perempuan.

Media yang dianggap lebih tepat bagi Yasanti untuk melakukan proses penyadaran hak perempuan adalah forum LDKW (Latihan Dasar Kelompok Wanita). Kegiatan ini pernah beberapa kali diselenggarakan Yasanti di Kebonrejo. LDKW berisi sesi-sesi pembentukan dan pengelolaan kelompok, kepemimpinan, dan penyadaran diri bagi perempuan, sehingga Yasanti melihat forum ini sangat bermanfaat untuk mendiskusikan persoalan kepemimpinan perempuan.

Keyakinan Yasanti bahwa kemandirian ekonomi

perempuan akan diikuti dengan kemandirian dalam pengambilan keputusan rumah tangga merupakan pencerminan dari pengaruh wacana global WID yang sedang mengemuka saat itu. Meskipun pada dekade 1990-an asumsi itu disadari sebagai suatu kekeliruan, perjalanan sejarah Yasanti memperlihatkan bahwa wacana keperempuanan yang sedang dominan di tingkat global maupun nasional telah membingkai pemikiran para aktivis Yasanti dalam menentukan agenda pemberdayaan perempuan di tingkat *grassroots*.

Sebagaimana akan dibahas lebih lanjut pada bagian analisis gerakan Yasanti, langkah Kusyuniati dan kawan-kawannya untuk menyisipkan pesan penyadaran hak perempuan menunjukkan bahwa dalam kerangka adopsi pendekatan WID keinginan untuk melunturkan masyarakat patriarkis yang mensubordinasikan perempuan telah dilakukan Yasanti dalam bentuk yang sederhana dan dilakukan secara perlahan-lahan.

1.2. Penolakan terhadap PKK

Ketika usaha menjahit (konveksi) di kelompok telah berkembang, Yasanti mendapatkan kesempatan untuk mulai mengkritik PKK dan sekaligus mempertanyakan apa yang didapat oleh perempuan dari kegiatan PKK. Namun, kondisi sosial politik yang dihadapi Yasanti pada saat itu tidak memungkinkan Yasanti melakukan kritik terhadap PKK (sebagai organisasi perempuan bentukan rezim Orde baru) secara terbuka, sehingga kritik terhadap PKK disampaikan untuk kalangan terbatas, terutama pada anggota PKK Kebonrejo.

Pada kesempatan yang lain dalam pertemuan, kaum perempuan Kebonrejo mengkritisi Orde Baru dengan mendiskusikan relevansi Panca Dharma Wanita (visi peran perempuan menurut rezim Orde Baru) dalam kehidupan sehari-hari perempuan Kebonrejo. Setelah mengikuti kegiatan-kegiatan Yasanti, lama-kelamaan banyak perempuan Kebonrejo tidak mau mendatangi pertemuan PKK. Jumlah peserta PKK kelurahan menjadi merosot, sehingga kegiatan PKK kelurahan lama-kelamaan kurang aktif.

Di dukuh Seling, Kebonrejo, Kulonprogo, Yasanti juga pernah ditolak oleh seorang anggota PKK yang secara kebetulan juga menjadi anggota kelompok UB Handayani. Ia tidak menghendaki kehadiran Yasanti dalam pertemuan kelompok karena menganggap Yasanti telah menanding kegiatan PKK. Menghadapi situasi semacam itu, Yasant kemudian mengambil keputusan untuk tidak mempertemukan Petugas Lapangan (PL) dalam forum UB, namun cukup menemui beberapa pengurus dan anggota kelompok UB. Terlebih lagi dalam kelompok tersebut ada motivator yang selalu melakukan komunikasi dengan Yasanti. Dalam perkembangannya, banyak anggota kelompok yang mengharapkan dampingan dari Yasanti, sehingga Yasanti kembali hadir dalam pertemuan kelompok

1.3. Ungaran: Menjahit sebagai *Entry-Point*

Strategi melalui organisasi PKK untuk melatih keterampilan menjahit sebagai sarana pemberdayaan perempuan juga diterapkan Yasanti di Ungaran. Strategi ini dilakukan agar Yasanti bisa masuk dengan mudah dalam komunitas buruh Ungaran. Semula, Kusyuniati dan kawan-

kawannya hanya melakukan acara *kumpul-kumpul* bersama buruh perempuan secara informal untuk menjalin keakraban dan mendengarkan keluh kesah pengalaman hidup mereka, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk mengadakan kegiatan kursus menjahit dalam wadah kegiatan PKK sebagai media mengumpulkan buruh.

Yasanti memiliki keyakinan bahwa pemberdayaan ekonomi melalui kegiatan menjahit bagi buruh perempuan di Ungaran dalam jangka panjang akan memberikan mereka kemampuan dan kepercayaan diri, sehingga pada akhirnya mampu menciptakan kesempatan pengembangan diri bagi buruh perempuan agar mendapatkan perlakuan yang sama dengan laki-laki.

Pemanfaatan organisasi PKK sebagai wadah untuk mengumpulkan buruh di Ungaran tidak berlangsung lama. Yasanti menilai upaya untuk mengumpulkan buruh perempuan melalui kegiatan PKK tidaklah efektif karena tidak semua buruh mengikuti kegiatan PKK. Akhirnya, kegiatan bersama buruh tidak lagi dilakukan dalam wadah PKK, namun melalui pembentukan atau pengorganisasian kelompok-kelompok buruh secara langsung.

Kursus menjahit bagi buruh di Ungaran juga bermanfaat sebagai media untuk mengajak agar buruh perempuan mau berkumpul dan mendiskusikan hak-hak mereka sebagai buruh. Kegiatan menjahit hanyalah menjadi titik masuk (*entry point*) sebagai media bagi Yasanti untuk membuat buruh perempuan agar tertarik berkumpul dan berorganisasi.

Proses penyadaran diakui oleh Yasanti bukanlah

sesuatu yang mudah dilakukan. Untuk menyadarkan buruh perempuan memerlukan waktu yang panjang karena buruh takut untuk diajak berkumpul akibat belum terbiasa berorganisasi. Proses penyadaran hak buruh perempuan tidak hanya dilakukan Yasanti dalam kegiatan latihan menjahit. Yasanti juga masuk ke dalam kelompok-kelompok pengajian yang terdapat buruh perempuannya. Forum pengajian tersebut sangat efektif untuk memberikan penyadaran tentang persoalan-persoalan sosial yang rawan menimpa perempuan.

1.4. Mobilisasi Dukungan Aparat Desa

Kelangsungan kegiatan Yasanti di Ungaran mendapat dukungan dari aparat desa setempat. Yasanti banyak dibantu oleh kepala dukuh dalam mengorganisir buruh perempuan. Secara kebetulan, kepala dukuh tersebut sudah dikenal oleh para aktivis Yasanti ketika mereka melakukan penelitian tentang buruh perempuan di Ungaran bersama-sama dengan Lembaga Studi Pembangunan (LSP). Kepala dukuh banyak membantu Yasanti karena ia juga merasa terbantu oleh keberadaan Yasanti di desanya karena merasa kewalahan menangani kasus-kasus para pendatang (sebagian besar buruh adalah pendatang).

Hubungan baik dengan kepala dukuh membuat kegiatan Yasanti menjadi aman dari kecurigaan masyarakat dan aparat. Tidak jarang rumah kepala dukuh dijadikan tempat untuk berkumpul dengan para buruh perempuan. Bahkan, oleh kepala dukuh, Yasanti juga diperkenalkan dengan aparat kelurahan, sehingga keamanan Yasanti lebih terjamin.

Keakraban Yasanti dengan pamong desa setempat dimanfaatkan Yasanti untuk menggerakkan buruh perempuan agar mau mengikuti kegiatan. Pamong desa dilibatkan dalam kegiatan Yasanti, salah satunya adalah dengan meminta mereka untuk memberikan sambutan atau motivasi pada pertemuan kelompok yang pertama kali. Bagi Yasanti, pendekatan semacam ini dirasakan penting untuk mendapatkan "legalitas" program Yasanti dan memperlancar gerak Yasanti lebih lanjut. Pamong desa bahkan turut membantu mendatangi rumah-rumah atau kos buruh dan memaksa mereka ikut dalam kegiatan kelompok. Kedekatan dengan pamong desa dirasakan Yasanti sangat berguna untuk menjalin komunikasi yang intensif, sehingga persamaan pemahaman dan persepsi lebih mudah dibentuk.

Berkat pendekatan-pendekatan dengan buruh dan dukungan pamong desa, pada tahun 1983 terbentuk tiga kelompok buruh perempuan dengan jumlah keseluruhan anggota sebanyak 80 orang. Akan tetapi, kelompok ini tumbuh bukan karena kesadaran para buruh. Kebanyakan dari para anggota masuk kelompok karena ikut-ikutan. Hanya sebagian kecil anggota yang benar-benar menyadari arti penting kelompok sebagai wadah aktivitas belajar dan pengembangan diri. Sebagian besar anggota kelompok bersikap pasif dalam menerima saran dari orang lain. Dalam banyak kasus, mereka hanya diam atau setuju terhadap saran atau keputusan, namun kemudian tidak mau melaksanakan keputusan itu. Pada awal tahun 1985, tumbuh empat kelompok yang beranggotakan sekitar 30-32 orang. Kelompok-kelompok ini terbentuk karena ada

persamaan kebutuhan yang dirasakan masing-masing anggota. Keberhasilan dan manfaat kegiatan yang mulai bisa dirasakan oleh anggota kelompok mulai menyebar ke tetangga-tetangga dan teman-teman sekerja. Keberhasilan tersebut memotivasi mereka untuk ikut membentuk kelompok-kelompok baru. Nama Yasanti kemudian mulai dikenal di lingkungan buruh perempuan di Desa Gedanganak, Ungaran.

Kegiatan pendampingan terhadap buruh dalam tahun-tahun berikutnya lebih lancar lagi karena beberapa pendekatan yang dilakukan lebih bisa diterima baik oleh kalangan buruh maupun lingkungan masyarakat di mana Yasanti melakukan kegiatannya. Yasanti juga terlibat dalam kegiatan komunitas di mana kantor Yasanti tinggal. Strategi yang dipilih juga disesuaikan dengan kebutuhan kelompok dan organisasi buruh yang ada. Mulai dari kegiatan diskusi rutin, kerjasama jaringan dengan organisasi buruh di kawasan Ungaran dan Semarang, lobi, *talkshow*, serta kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan yang ada..

1.5. Implikasi Konferensi Nairobi

Konferensi Perempuan Sedunia di Nairobi tahun 1985, berdampak positif bagi perkembangan Yasanti karena semakin banyak orang atau lembaga yang memiliki keprihatinan besar terhadap masalah yang dihadapi kaum perempuan. Gelombang perhatian pada perempuan diiringi dengan kesempatan mendapatkan dana dari lembaga-lembaga donor untuk membiayai program-program perempuan. Peristiwa ini mendorong pertumbuhan

LSM-LSM perempuan atau LSM perempuan yang sudah ada.

Pengaruh nyata konferensi Nairobi bagi perkembangan gerakan Yasanti juga terlihat pada pengembangan kerjasama jaringan, yaitu terbentuknya jalinan kerjasama antara Yasanti dengan LKBHuWK (Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga) dalam memberikan bantuan hukum bagi buruh perempuan di Ungaran.

Hasil-hasil yang dicapai dalam konferensi Nairobi juga memberi kesempatan pada Yasanti untuk memperkuat jaringan kerjasama antar-organisasi perempuan di wilayah regional Asia Pasifik. Sebagai anggota jaringan *Asia Pacific Forum on Women, Law, and Development* (APWLD), Yasanti merespon hasil-hasil konferensi Nairobi dengan melakukan tukar pengalaman dan informasi tentang penindasan perempuan di Asia.

2. Pergeseran Yasanti ke Pendekatan GAD

Pergeseran kecenderungan pergerakan perempuan di dunia pada dekade 1990-an menggunakan pendekatan GAD menggantikan WID membawa implikasi bagi Yasanti. Pengaruh ini terlihat pada agenda penyadaran kesetaraan gender yang dilakukan Yasanti untuk kelompok-kelompok dampingan secara terstruktur dan terprogram (tidak lagi terselubung) dan keikutsertaan Yasanti dalam kampanye-kampanye kesetaraan gender yang dilakukan melalui forum-forum jaringan.

Masuknya pendekatan GAD telah membuka kesadaran bahwa asumsi kemandirian ekonomi akan diikuti

dengan kemandirian dalam pengambilan keputusan merupakan suatu kekeliruan. Kemandirian ekonomi tidak menjamin perempuan akan diperlakukan secara kemandirian ekonomi tidak menjadi otomatis diikuti dengan kemerdekaan dalam pengambilan keputusan.

Pengimplementasian wacana kesetaraan gender ke dalam program aksi di level *grassroots* tidaklah mudah. Sesuai dengan kemampuan yang berbeda pada masing-masing kelompok, untuk kelompok buruh akan lebih mudah menerima wacana keadilan karena hubungannya dapat dilihat secara langsung dan dapat dirasakan. Namun, untuk kelompok yang lain seperti perempuan putus sekolah, buruh gendong, dan lain-lain akan lebih sulit menerima, sehingga memerlukan strategi dan pendekatan yang berbeda.

3. Perhatian Yasanti pada Isu Kesehatan Reproduksi

Isu global tentang kesehatan reproduksi yang mengemuka bersamaan waktu dengan penyebaran wacana GAD juga membawa pengaruh kepada Yasanti, sehingga menaruh perhatian pada persoalan kesehatan reproduksi. Isu internasional tersebut direspon oleh Yasanti dengan melakukan kampanye kesehatan reproduksi untuk kelompok-kelompok dampingan. Khusus bagi buruh perempuan di Ungaran, Yasanti menjadikan kampanye kesehatan reproduksi sebagai bagian dari kampanye kesehatan dan keselamatan kerja untuk buruh. Agenda kampanye kesehatan reproduksi ini, sekali lagi, membuktikan pengaruh wacana global bagi gerakan Yasanti (lihat

LSM-LSM perempuan atau LSM perempuan yang sudah ada.

Pengaruh nyata konferensi Nairobi bagi perkembangan gerakan Yasanti juga terlihat pada pengembangan kerjasama jaringan, yaitu terbentuknya jalinan kerjasama antara Yasanti dengan LKBHuWK (Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga) dalam memberikan bantuan hukum bagi buruh perempuan di Ungaran.

Hasil-hasil yang dicapai dalam konferensi Nairobi juga memberi kesempatan pada Yasanti untuk memperkuat jaringan kerjasama antar-organisasi perempuan di wilayah regional Asia Pasifik. Sebagai anggota jaringan *Asia Pacific Forum on Women, Law, and Development* (APWLD), Yasanti merespon hasil-hasil konferensi Nairobi dengan melakukan tukar pengalaman dan informasi tentang penindasan perempuan di Asia.

2. Pergeseran Yasanti ke Pendekatan GAD

Pergeseran kecenderungan pergerakan perempuan di dunia pada dekade 1990-an menggunakan pendekatan GAD menggantikan WID membawa implikasi bagi Yasanti. Pengaruh ini terlihat pada agenda penyadaran kesetaraan gender yang dilakukan Yasanti untuk kelompok-kelompok dampingan secara terstruktur dan terprogram (tidak lagi terselubung) dan keikutsertaan Yasanti dalam kampanye-kampanye kesetaraan gender yang dilakukan melalui forum-forum jaringan.

Masuknya pendekatan GAD telah membuka kesadaran bahwa asumsi kemandirian ekonomi akan diikuti

dengan kemandirian dalam pengambilan keputusan merupakan suatu kekeliruan. Kemandirian ekonomi tidak menjamin perempuan akan diperlakukan secara kemandirian ekonomi tidak menjadi otomatis diikuti dengan kemerdekaan dalam pengambilan keputusan.

Pengimplementasian wacana kesetaraan gender ke dalam program aksi di level *grassroots* tidaklah mudah. Sesuai dengan kemampuan yang berbeda pada masing-masing kelompok, untuk kelompok buruh akan lebih mudah menerima wacana keadilan karena hubungannya dapat dilihat secara langsung dan dapat dirasakan. Namun, untuk kelompok yang lain seperti perempuan putus sekolah, buruh gendong, dan lain-lain akan lebih sulit menerima, sehingga memerlukan strategi dan pendekatan yang berbeda.

3. Perhatian Yasanti pada Isu Kesehatan Reproduksi

Isu global tentang kesehatan reproduksi yang mengemuka bersamaan waktu dengan penyebaran wacana GAD juga membawa pengaruh kepada Yasanti, sehingga menaruh perhatian pada persoalan kesehatan reproduksi. Isu internasional tersebut direspon oleh Yasanti dengan melakukan kampanye kesehatan reproduksi untuk kelompok-kelompok dampingan. Khusus bagi buruh perempuan di Ungaran, Yasanti menjadikan kampanye kesehatan reproduksi sebagai bagian dari kampanye kesehatan dan keselamatan kerja untuk buruh. Agenda kampanye kesehatan reproduksi ini, sekali lagi, membuktikan pengaruh wacana global bagi gerakan Yasanti (lihat

dinamika agenda gerakan Yasanti pada tabel 2.2.).

Tabel 2.2.
Pengaruh Wacana Global bagi Agenda Gerakan Yasanti

WACANA GLOBAL	WAKTU	AGENDA PRAKSIS	MISI GERAKAN	PENYAMPAIAN MISI	MEDIA
WID	1980-an	Kursus keterampilan (menjahit)	Persamaan hak laki-laki dan perempuan	terselubung	PKK, kelompok perempuan
GAD	Sejak 1990-an	Sosialisasi kesadaran gender, kampanye kesetaraan gender	Relasi gender yang adil	terbuka	Kelompok perempuan dan laki-laki
Kesehatan reproduksi	Sejak 1990-an	Sosialisasi, kampanye kesehatan reproduksi	Hak reproduksi yang sehat	terbuka	Kelompok perempuan dan laki-laki

Isu kesehatan reproduksi sebagai bagian dari kampanye kesehatan dan keselamatan kerja bagi buruh menjadi perhatian Yasanti karena di lapangan, Yasanti melihat fasilitas kesehatan dan keselamatan kerja buruh perempuan masih sangat memprihatinkan. Disamping itu, buruh perempuan kurang memiliki kesadaran akan arti penting kesehatan reproduksi dan keselamatan kerja, sementara organisasi yang memerhatikan persoalan tersebut, baik dalam pengertian melakukan penyadaran maupun pembelaan hak kesehatan reproduksi dan keselamatan kerja bagi buruh, masih sangat sedikit.

Yasanti menaruh minat pada isu kesehatan reproduksi dalam program pemberdayaan buruh perempuan yang dilatarbelakangi juga oleh konferensi perempuan tentang kependudukan tahun 1994. Dalam konferensi tersebut, masalah kesehatan reproduksi juga menjadi topik pem-

bahasan. Hasil dari konferensi tersebut disebarluaskan dan Yasanti sebagai salah satu lembaga yang peduli terhadap hak kesehatan buruh, ikut memperjuangkan hak tersebut. Hak reproduksi adalah bagian dari hak buruh yang selama ini jarang tersentuh. Dalam perburuhan, yang dibicarakan biasanya mengenai upah dan kesehatan kerja secara umum dan belum menyentuh pada hak kesehatan reproduksi. Bahkan, dalam UU masalah kesehatan reproduksi belum diperhatikan.

Sebelum mengampanyekan kesehatan reproduksi bagi buruh pabrik, Yasanti juga melakukan penelitian tentang persoalan-persoalan di perusahaan yang berdampak merugikan bagi kesehatan reproduksi dan dari hasil penelitian tersebut ditemukan beberapa masalah yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi.

Sebagai bagian dari kampanye kesehatan reproduksi sejak tahun 1996, media advokasi *Swasti* yang diterbitkan oleh Yasanti, secara rutin memuat rubrik tentang kesehatan reproduksi. Rubrik ini memuat informasi tentang sistem seksualitas, arti penting kesehatan reproduksi, pengetahuan tentang menstruasi, mitos-mitos tentang menstruasi, bahaya penggunaan obat-obatan pelancar haid, hal-hal yang harus dilakukan pada saat menstruasi, serta petunjuk untuk menjaga alat reproduksi agar tetap sehat. Misalnya, dalam *Swasti* edisi X/11 tahun 1998, Yasanti menegaskan arti penting kesehatan dan gizi perempuan pada masa reproduksi. Usaha untuk menciptakan keadaan gizi yang baik bagi perempuan pada masa reproduksi akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan status sosial perempuan. Untuk mencapai gizi yang baik bagi perem-

puan selama masa reproduksi, dukungan-dukungan dari sisi hukum, ekonomi, sosial, dan budaya sangat diperlukan.



Bab 3

PERGESERAN STRATEGI GERAKAN

A. Penguatan Isu Hak Asasi Manusia

Sejak awal dekade 1990-an, isu Hak Asasi Manusia (HAM) kembali menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat dunia. Perhatian dunia pada isu HAM tidak terlepas dari konteks global yang mendukung penyebaran wacana HAM. Berakhirnya Perang Dingin antara negara-negara Barat, yaitu Amerika Serikat dengan sekutu-sekutunya dan negara-negara Sosialis yang dimotori Uni Soviet membawa dampak meredanya persaingan ideologi dan kekuatan militer antara dua blok yang berseberangan. Mencairnya ketegangan ideologi tersebut mendorong isu-isu global yang semasa Perang Dingin termarjinalkan, seperti demokratisasi, kepemerintahan yang baik (*good governance*), dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi menguat (Parnohadiningrat, 2004).

Perhatian dunia pada persoalan HAM ditunjukkan oleh PBB ketika pada tahun 1993 badan dunia tersebut menyelenggarakan Konferensi Internasional Hak Asasi Manusia di Wina, Italia. Konferensi HAM menghasilkan

kesepakatan dalam bentuk Deklarasi dan Program Aksi Wina. Kedua dokumen ini menegaskan komitmen semua negara di dunia agar menghormati dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua umat manusia sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB, instrumen-instrumen hak asasi manusia yang lain dan hukum internasional. Konferensi Wina mendesakkan perlunya kerjasama antara negara-negara di dunia dan organisasi-organisasi internasional, serta organisasi-organisasi non-pemerintah untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi penghormatan hak asasi manusia dan menghapuskan semua bentuk pelanggaran HAM di level nasional, regional, dan internasional.

Pada konferensi HAM di Wina tahun 1993, perbedaan persepsi tentang perlindungan HAM antara negara maju (Barat) dan negara berkembang berhasil dijembatani. Negara-negara Barat cenderung memandang HAM sebagai hak individu yang harus ditegakkan, bagaimanapun kondisinya. Sebaliknya, negara-negara sedang berkembang berpendapat bahwa nilai-nilai HAM terlalu individual, sehingga dapat membahayakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara (yang memerlukan kestabilan) untuk mendukung proses pembangunan. Upaya untuk mengakomodasikan perbedaan pandangan tentang HAM antara negara maju dan negara berkembang tercermin dari hasil akhir Konferensi Wina yang tidak saja menekankan arti penting memajukan hak-hak politik, hak-hak sipil, serta hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan, namun juga sekaligus hak untuk pembangunan (Parnohadiningrat, 2004).

Penguatan penyebaran isu HAM tidak terlepas dari peran ornop-ornop internasional (international NGO's). Ornop-ornop yang peduli dengan persoalan HAM, seperti *Amnesty International, Human Right Watch,* dan *International NGO Forum on Indonesian Development* (INFID), aktif membangun jaringan internasional dan melakukan persuasi untuk menekan kekuasaan dan represi negara. Tidak jarang tuntutan ornop agar negara-negara otoritarian menghormati HAM berbenturan dengan nilai-nilai HAM yang diacu oleh negara, terutama ketika ornop-ornop ini bersama-sama dengan gerakan-gerakan akar rumput menentang kekuasaan negara yang represif atau ketika gerakan mereka mendapatkan dukungan internasional (Falk, 2000).

B. Kebangkitan Kelompok Oposisi dan Isu HAM di Indonesia

Sejak akhir dekade 1980-an, konteks politik Indonesia diwarnai oleh kebangkitan gerakan-gerakan untuk menentang Orde Baru yang dilakukan para aktivis mahasiswa, buruh, aktivis ornop, kaum intelektual, jurnalis, dan seniman. Kebangkitan gerakan-gerakan oposisi dilatarbelakangi oleh konteks politik nasional Indonesia, yaitu terjadinya konflik antara Soeharto dengan kelompok militer. Konflik ini ditandai oleh beberapa peristiwa menarik. Panglima ABRI (PANGAB), Jenderal L.B. Moerdani, tiba-tiba diberhentikan dari jabatannya di tengah berlangsungnya Sidang Umum MPR tahun 1988, yang pada waktu itu sudah siap memilih kembali Soeharto sebagai presiden yang kelima kalinya. Moerdani seharusnya memegang

jabatan PANGAB hingga Sidang Umum MPR selesai. Pada waktu Sidang Umum berlangsung, John Naro, Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP), tiba-tiba diusulkan oleh partainya sebagai calon wakil presiden. Pencalonan ini diyakini oleh para pengamat politik mendapat dukungan dari kelompok militer yang menolak rencana Soeharto menunjuk Sudharmono sebagai wakil presiden. Ketika penunjukan Sudharmono secara resmi diumumkan di tengah-tengah Sidang Umum, Brigjen Ibrahim Saleh dari fraksi ABRI menyatakan ketidakpuasannya. Akan tetapi, sebelum selesai menyatakan protes ketidakpuasan, ia dipaksa duduk kembali. Suara-suara yang menentang pencalonan Sudharmono berhasil diredam. Naro menarik pencalonan dirinya sebagai wakil presiden dan fraksi ABRI pada akhirnya menyetujui pilihan Soeharto (Budiman, 1994: 230).

Kelompok-kelompok oposan Orde Baru banyak melontarkan kritik terhadap Soeharto dan pelanggaran HAM yang dilakukannya. Kritik atas pelanggaran HAM terutama dilakukan oleh para aktivis mahasiswa lewat aksi-aksi demonstrasi mahasiswa yang kembali marak sejak akhir 1980-an. Sebelumnya, aksi-aksi mahasiswa mengangkat isu yang berkaitan dengan persoalan internal kampus, seperti yang terjadi di Bandung ketika mahasiswa menolak kunjungan Menteri Dalam Negeri, Rudini, ke kampus ITB untuk memberikan ceramah karena dinilai bermuatan politis. Namun, isu kemudian meluas ke persoalan demokratisasi dan HAM. Mahasiswa menuntut terciptanya *good governance*, kebebasan berpendapat dan berserikat, adanya kepastian hukum, serta kelancaran pembangunan. Mereka juga mengkritik kebijakan Soeharto yang menindas rakyat

miskin, seperti yang dilakukan oleh kelompok studi mahasiswa yang dipimpin Bonar Tigor Naipospos di Yogyakarta. Di Semarang, sekelompok mahasiswa menyindir Soeharto dengan mengedarkan kalender berjudul "Tanah untuk Rakyat". Kalender bergambar Soeharto sedang duduk menunggangi petani, sedangkan Ibu Tien yang mengenakan bikini sambil mengayunkan tongkat golf dianggap menghina presiden, sehingga akhirnya dilarang beredar.

Kalangan buruh turut menyuarakan tuntutan HAM dalam bentuk aksi-aksi demonstrasi buruh. Gelombang aksi pemogokan buruh di berbagai kota meningkat sejak akhir 1980-an. Aksi mogok terbesar terjadi pada bulan Agustus 1991 ketika 12.000 buruh melakukan aksi di sepanjang jalan Kota Tangerang. Dalam rentang waktu 10 tahun (1987-1997), jumlah aksi mogok buruh dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1.
Angka Kasus Pemogokan Buruh

Tahun	Jumlah Pemogokan	Tahun	Jumlah Pemogokan
1987	37	1993	185
1988	39	1994	296
1989	19	1995	276
1990	61	1996	350
1991	130	1997	161
1992	251		

Sumber : Sri Kusyuniati, *Strikes in 1990-1996: an Evaluation of the Dynamics Indonesian Labour Movement.*
Disertasi pada Swinburne University, 1998. Hlm. 1986-7 dan Depnaker, Desember 1997.

Alasan buruh melakukan aksi pemogokan sangat beragam, mulai dari tuntutan normatif seperti kenaikan Upah Minimum Regional (UMR), upah lembur, pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek), cuti haid, cuti hamil dan cuti melahirkan, hingga tuntutan kepentingan buruh seperti kenaikan upah, uang makan, uang transportasi, pengobatan, pakaian kerja, pengadaan tempat ibadah, dan Tunjangan Hari Raya (THR).

Sorotan atas pelanggaran HAM oleh Orde Baru juga datang dari kalangan ornop. Pada Konferensi di Brussel tahun 1989, partisipan INGI (sekarang bernama INFID) menulis surat kepada Bank Dunia mempermasalahkan kelalaian Bank Dunia dalam mengawasi program *resettlement* masyarakat yang tergusur dari Kedung Ombo. Rezim Orde Baru telah mengorbankan rakyat karena tidak memberikan ganti rugi yang memadai bagi warga Kedung Ombo yang rumahnya tergusur. Bank Dunia kemudian mempertanyakan isi surat tersebut kepada pemerintah Indonesia yang menimbulkan kemarahan Soeharto, sehingga para pimpinan INGI dipanggil oleh Menteri Dalam Negeri untuk "dibina".

Todung Mulya Lubis, aktivis dari ornop Lembaga Bantuan Hukum (LBH), pernah melontarkan kritik terhadap pernyataan pemerintah bahwa perhatian pada persoalan HAM akan berdampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi. Todung mengecam pernyataan pemerintah tersebut sebagai kebohongan besar dan mencerminkan sikap "standar ganda" karena di satu pihak pemerintah Indonesia menerima bantuan asing, sementara di lain pihak tidak menerima kritik atas pelanggaran HAM yang dilaku-

kannya. Bagaimanapun, menurut Todung, negara-negara donor tidak menginginkan dana yang mereka berikan digunakan untuk mendanai praktik-praktik pelanggaran HAM (Schwarz, 1994: 257).

Faktor eksternal, yaitu tekanan Amerika Serikat, berpengaruh pada penguatan isu HAM di Indonesia. Kongres Amerika berulang kali menyoroti pelanggaran HAM rezim Soeharto dan meminta George Bush bersikap tegas terhadap Indonesia. Di bawah pemerintahan Clinton, Amerika kembali mengkritik keras pelanggaran HAM di Timor Timur dan tindakan represif rezim Soeharto terhadap para aktivis buruh. Pada pertemuan dengan Soeharto di Tokyo 7 Juli 1993, Clinton membicarakan isu HAM di Timor Timur. Clinton juga mengecam kebijakan perdagangan *Generalized System of Preferences* (GSP) yang diterapkan Indonesia dan mengkritik pelarangan organisasi buruh Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) karena merepresi buruh. Pada pertemuan APEC di Jakarta, November 1994, persoalan Timor Timur dan situasi HAM di Indonesia kembali menjadi topik utama yang dibicarakan Clinton dengan Soeharto (Uhlin, 1995: 91-92).

C. Pergeseran Strategi Gerakan Yasanti

1. Latar Belakang Pergeseran

Isu Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengemuka sejak akhir 1980-an memengaruhi banyak ornop, termasuk Yasanti menggeser konsentrasi gerakan pada isu HAM. Sejak akhir 1980-an, tidak ada ornop yang tidak berbicara tentang HAM, Yasanti sebagai lembaga yang peduli

terhadap hak-hak buruh juga menggunakan kecenderungan global tersebut untuk melakukan penguatan buruh melalui advokasi buruh.

Sejalan dengan konsentrasi pergerakan dunia pada isu HAM, Yasanti mengarahkan gerakannya pada pembelaan hak asasi buruh. Pengalaman yang telah diperoleh Yasanti selama bertahun-tahun mendampingi buruh semakin membuka kesadaran Yasanti akan kondisi buruh yang tertekan. Ketika realita ini bertemu dengan menguatnya isu HAM, maka Yasanti terdorong untuk melakukan pembelaan hak asasi buruh.

Konteks politik nasional Indonesia turut mendorong pergeseran strategi gerakan Yasanti. Maraknya kembali gerakan-gerakan anti-Soeharto yang mengusung isu-isu HAM, terutama gerakan-gerakan buruh di berbagai kota di Indonesia, memberi semangat Yasanti untuk memperkuat gerakan pembelaan bagi buruh perempuan tidak lagi sebatas penguatan ekonomi (*basic needs),* tetapi beralih pada kebutuhan strategis yang berbau politik seperti kebebasan berserikat. Terlebih lagi pengalaman dalam memberdayakan buruh selama sepuluh tahun (1982-1992) menyadarkan Yasanti bahwa kegiatan Usaha Bersama (UB) dengan kegiatan keterampilan menjahit tidak melahirkan proses penyadaran buruh. Oleh karena itu, setelah Yasanti mengubah strategi gerakannya ke arah politik Usaha Bersama hanya dijadikan sebagai kegiatan *entry point,* sementara kegiatan utama adalah melakukan diskusi UU Perburuhan dan memobilisasi aksi buruh, di samping melakukan penyadaran gender. Melalui diskusi perburuhan dan mobilisasi aksi, Yasanti mengharapkan buruh memahami

dan dapat memperjuangkan hak-hak mereka.

Pergeseran strategi gerakan Yasanti ke arah politik tidak lepas dari hubungannya dengan beberapa aktivis ornop yang lebih senior. Salah satunya adalah adanya masukan-masukan Roem Topatimasang, aktivis dari Indeco de Unie sebagai konsultan Yasanti ketika membantu Yasanti merumuskan Rencana Strategis pada tahun 1992.

Perubahan strategi ke arah politik diikuti dengan konsentrasi kegiatan Yasanti pada pembelaan buruh industri di Ungaran. Berbeda dengan program-program Yasanti untuk buruh gendong, pramuniaga, dan remaja putus sekolah di Yogyakarta, Yasanti melihat bahwa pengalaman pendampingan buruh di Ungaran melalui pengorganisasian yang sistematis dan terpadu dengan melakukan mobilisasi aksi buruh serta advokasi lebih mampu menciptakan gerakan buruh yang lebih kuat. Pengalaman di Ungaran juga meyakinkan Yasanti bahwa pengorganisasian dan mobilisasi aksi buruh di bidang industri strategis lebih mampu membawa dampak yang lebih besar dalam memengaruhi pendapat umum dan kebijakan, paling tidak di tingkat perusahaan tempat buruh bekerja.

2. Diskusi Perburuhan: Membuka Kesadaran Buruh

Upaya untuk melakukan mobilisasi aksi dan advokasi buruh diawali dengan mendiskusikan masalah-masalah yang dihadapi oleh buruh di perusahaan. Kebanyakan buruh tidak menyadari bahwa hak-hak mereka telah

diabaikan oleh perusahaan, padahal Yasanti mendapati kondisi buruh di Ungaran sangat memprihatinkan, tidak ada peralatan keselamatan kerja, upah rendah, fasilitas (makan, minum, transportasi, dan kesehatan) tidak diperhatikan. Pelanggaran jam kerja juga memberatkan buruh karena jika buruh menolak untuk lembur, gajinya akan dipotong. Kondisi itu sebagian besar tidak disadari oleh buruh. Kebanyakan buruh bahkan tidak mengetahui hak-hak yang semestinya mereka miliki. Organisasi buruh, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), yang semestinya memperjuangkan kesejahteraan buruh, hampir tidak pernah terdengar suaranya karena kebanyakan pengurus SPSI adalah kepanjangan tangan pengusaha yang berfungsi meredam suara buruh yang berusaha memperjuangkan nasibnya. Kondisi buruh yang memprihatinkan itu diangkat oleh Yasanti dalam diskusi-diskusi dengan buruh. Yasanti membuka kesadaran buruh akan ketidakadilan yang mereka alami melalui kajian UU Perburuhan, perhitungan upah dan lembur yang benar, serta hak cuti. Diskusi-diskusi penyadaran buruh diharapkan akan memperkuat pengorganisasian buruh yang bisa menyuarakan kepentingan buruh.

Pengorganisasian buruh di Ungaran dimulai dari pembentukan kelompok kader yang diberi nama kelompok Sekasese (Sekelompok Karyawan Senasib dan Sepenanggungan) sebagai kelompok yang berfungsi melakukan analisis masalah perburuhan dengan menggunakan media pertemuan buruh. Anggota kelompok kader kemudian mengembangkan kegiatan di perusahaan masing-masing maupun di lingkungan tempat dia tinggal.

Pengorganisasian juga dilakukan dengan membentuk kelompok khusus perempuan yang diberi nama Kelompok Solidaritas Perempuan (KSP). Dalam jangka panjang Yasanti mengharapkan kelompok ini bisa menyuarakan permasalahan buruh perempuan karena anggota kelompok ini juga menjadi anggota kelompok kader dan kelompok perusahaan yang secara rutin mengadakan diskusi perburuhan.

Usaha Yasanti dalam membuka kesadaran buruh membuahkan hasil yang antara lain ditandai oleh peningkatan munculnya kelompok-kelompok basis. Mereka sering meminta pendampingan Yasanti. Anggota kelompok basis juga merasakan pengorganisasian buruh yang dilakukan Yasanti telah membuka kesadaran bahwa sebagai buruh mereka memiliki hak. Suyati, buruh perempuan yang mulai bekerja di Ungaran sejak tahun 1989, mengemukakan, "Sebelum saya mengenal Yasanti, saya sangat pemalu dan sama sekali tidak tahu bahwa ternyata sebagai buruh, sebenarnya saya punya hak." Sugiyanti, buruh perempuan yang juga bekerja di Ungaran menyatakan bahwa diskusi perburuhan yang dipandu Yasanti sangat berarti baginya. Ia menjadi mengerti fungsi SPSI dan hak-hak yang semestinya ia miliki sebagai buruh. Setelah mengenal Yasanti, ia merasakan adanya jalur alternatif untuk menyelesaikan persoalan perburuhan. Demikian pula dengan Winarsih, salah seorang buruh yang mulai aktif mengikuti kegiatan di Yasanti sejak tahun 1991, mengakui bahwa penyadaran hak-hak buruh yang dilakukan Yasanti telah menimbulkan keberaniannya untuk melawan ketidakadilan yang ia alami di perusahaan tempat

ia bekerja. "Pelatihan tentang perburuhan yang pernah diadakan Yasanti bagi saya sangat berarti," demikian pengakuan Winarsih. Karena keberaniannya itu, Winarsih pernah menjadi sorotan di perusahaan tempat ia bekerja dan dianggap sebagai tokoh pemberontak.

3. Mobilisasi Aksi Buruh

3.1. Mobilisasi Aksi Buruh PT Batamtex

Diskusi-diskusi perburuhan pada gilirannya memotivasi para buruh melakukan aksi-aksi demonstrasi untuk menuntut hak-hak mereka. Aksi pemogokan buruh yang pertama dimobilisasi oleh Yasanti adalah aksi pemogokan buruh PT Batamtex, Ungaran, yang kedua pada akhir tahun 1992. Pemogokan ini terjadi pada tanggal 18 Agustus 1992 akibat para buruh merasa tuntutan yang diajukan pada pemogokan pertama belum dikabulkan seluruhnya. Mobilisasi aksi buruh dilakukan Yasanti dengan dukungan para aktivis mahasiswa dan aktivis ornop, terutama pada saat melakukan perencanaan aksi mogok buruh, pada waktu berlangsung aksi, dan ketika berlangsung perundingan antara perwakilan buruh dengan pihak perusahaan yang difasilitasi Depnaker pasca-aksi pemogokan.

Malam menjelang pemogokan salah seorang buruh menginformasikan bahwa pihak pengusaha telah mengetahui rencana pemogokan tersebut dan juga telah menyuap para sopir langganan karyawan antara Rp 100.000 hingga Rp 150.000 per orang agar pada sopir tersebut langsung memasukan mobil antarjemput karyawan ke dalam pabrik. Biasanya, sopir hanya mengantar karyawan sampai di depan pintu gerbang pabrik.

Tanggal 18 Agustus 1992 pada pukul 06.00 WIB, buruh yang masuk pagi telah berkumpul di pasar Babadan di samping perusahaan. Mereka berjumlah sekitar 50 persen dari jumlah buruh karena sebagian telah masuk ke dalam pabrik diantar langsung oleh sopir-sopir perusahaan. Buruh kemudian menggelar beberapa tuntutan: (1) penyingkiran beberapa staf personalia karena dianggap tidak bisa melaksanakan UU Perburuhan sebagaimana mestinya, (2) penyingkiran ketua umum SPSI unit kerja karena tidak membela kepentingan karyawan, bahkan ikut memihak perusahaan dan mendukung sepenuhnya tindakan pengusaha jika ada karyawan yang di PHK, (3) menuntut pemberian Astek, cuti haid, kelebihan jam kerja, kesejahteraan karyawan, dan (4) penyusunan serta pelaksanaan kesepakatan bersama tentang kenaikan uang makan dan uang transportasi. Buruh mengancam jika tuntutan tidak dikabulkan sampai pukul 10.00 WIB, mereka akan pulang ke rumah masing-masing dan melakukan mogok kerja selama 3 atau 4 hari, bahkan seminggu, sampai mereka mendengar kabar dari media massa bahwa tuntutan mereka dikabulkan.

Tidak lama setelah menggelar aksi, buruh yang berkumpul di samping pabrik berhasil dibubarkan oleh aparat keamanan dan dihalau agar tidak memasuki kawasan pabrik. Mereka kemudian berpencar karena dibubarkan oleh aparat keamanan. Beberapa jam kemudian para buruh yang telah bubar berkumpul di rumah salah seorang karyawan dan membicarakan rencana aksi gelar poster pada pukul 14.00 WIB, yaitu pada saat pergantian *shift*. Pukul 14.00 kurang lima menit aksi gelar poster telah dimulai

dan sebagian besar buruh yang masuk *shift* siang telah berkumpul. Pada saat itu, aparat keamanan bertindak cepat langsung membubarkan buruh yang berkumpul sambil melakukan penangkapan dan penamparan, sehingga buruh yang lain merasa ketakutan dan mereka pun bubar karena aparat menggunakan gas air mata dan anjing pelacak. Setelah berlangsung aksi pemogokan, para buruh masih melakukan diskusi dalam rangka mempersiapkan perundingan dengan Depnaker dan perusahaan.

Yasanti kemudian mendampingi mereka hingga ke tingkat perundingan dengan Departemen Tenaga Kerja. Semula Yasanti bersama-sama dengan para aktivis mahasiswa dari Yogyakarta, Salatiga, dan Semarang, wakil LBH Semarang dan Yogyakarta berkoordinasi mendampingi buruh PT Batamtex (melalui perwakilan), baik yang masih berstatus dalam proses PHK maupun buruh yang masih aktif bekerja untuk menemui Menteri Tenaga Kerja. Namun, dengan pertimbangan bahwa setelah perwakilan mahasiswa Salatiga memberikan pernyataan sikap kepada Menaker tentang kasus di PT Batamtex dan pihak Depnaker berjanji akan memerhatikan pernyataan sikap tersebut, maka keputusan rapat di Yogyakarta untuk menemui Menaker ditangguhkan dan dialihkan ke kanwil Depnaker Semarang.

Ketika para wakil buruh PT Batamtex mendatangi Kanwil Depnaker Semarang, pihak Depnaker tidak bersedia menerima mereka dengan alasan belum ada pemberitahuan sebelumnya. Depnaker hanya bersedia menerima setelah mereka membuat surat resmi tertulis dan setelah itu mereka akan dipanggil untuk pertemuan. Aktivis Yasanti

yang mendampingi buruh pada saat itu mendesak pihak Kanwil agar tidak mengecewakan wakil buruh yang sudah datang. Kanwil Depnaker Semarang akhirnya bersedia menerima para wakil buruh yang terdiri dari 3 orang buruh, seorang wakil mahasiswa dan seorang wakil dari Yasanti.

3.2. Aksi Mogok di PT Nissin Biscuit

Mobilisasi aksi pemogokan buruh yang kedua dilakukan di PT Nissin Biscuit, Ungaran, pada tahun 1993. Pada tahun itu, terjadi kasus PHK terhadap beberapa orang buruh yang dianggap mendalangi aksi mogok. Yasanti kemudian mengajak mereka berdiskusi. Dalam diskusi muncul keluhan-keluhan buruh tentang keadaan perusahaan yang semakin menekan para buruh, janji-janji dari perusahaan yang tidak pernah ditepati serta kasus PHK yang menimpa 5 orang buruh karena dianggap mendalangi aksi mogok. Ketidakpuasan itu mendorong para buruh kembali merencanakan aksi mogok agar persoalan mereka diperhatikan oleh perusahaan. Perencanaan aksi demonstrasi dimulai dengan mengadakan diskusi dengan perwakilan dari setiap departemen. Diskusi kemudian dilanjutkan dengan mempersiapkan kader cadangan untuk mengantisipasi jika terjadi sesuatu dengan kader yang telah dipersiapkan. Buruh diingatkan agar bisa kompak dalam mempertanyakan hak-hak mereka.

Diskusi mengenai strategi pelaksanaan aksi mogok buruh PT Nissin Biscuit, Ungaran, dilakukan di kantor Yasanti Yogyakarta pada tanggal 31 Oktober 1993. Pertimbangan faktor keamanan menyebabkan perencanaan aksi mogok buruh Ungaran dilakukan di kantor Yasanti Yogya-

karta. Kantor Yasanti di Ungaran tidak lagi menjadi tempat yang aman untuk merencanakan aksi pemogokan karena kantor di sana pernah dimasuki oleh orang tak dikenal dan membongkar serta mengobrak-abrik *file-file* yang ada.

Perencanaan aksi mogok membicarakan analisis risiko, mengecek kesiapan organisasi, penajaman tuntutan, kesiapan tim perunding, dan teknik pelaksanaan lapangan. Setelah mendiskusikan strategi, para buruh dampingan Yasanti diminta untuk mengatur sendiri persiapan di lapangan karena mereka dianggap lebih mengetahui kondisi lapangan. Belajar dari pengalaman aksi mogok di PT Batamtex, maka Yasanti menekankan arti penting strategi dan mengupayakan agar melakukan tawar-menawar dengan perusahaan.

Keesokan paginya, tanggal 2 November 1993, buruh melakukan aksi mogok kerja. Sejak pukul 5 pagi para buruh sudah bersiap-siap di sekitar perusahaan untuk mencegah para buruh yang masuk pagi bekerja dan menahan agar buruh yang masuk malam (hari sebelumnya) tidak pulang. Tidak lama kemudian , pihak kepolisian didatangkan dan menyuruh agar para buruh bekerja, namun mereka tetap tidak mau bekerja.

Perundingan akhirnya dilakukan antara 9 orang wakil buruh, wakapolresta, 9 orang anggota DPRD, Depnaker, DPC SPSI, pengusaha, Koramil, wartawan, staf personalia, dan wakil SPSI. Perundingan menghasilkan KKB, namun tidak memuaskan para buruh karena dinilai mengambang, tidak jelas waktu, dan kesepakatan kesanggupan pelaksanaannya oleh perusahaan.

3.3. Aksi Mogok di PT Koryo Puspita Indonesia

Sebagian anggota kelompok kader yang didampingi Yasanti melalui diskusi perburuhan berhasil mengembangkan kegiatan di kelompok-kelompok perusahaan tempat mereka bekerja. Di kelompok-kelompok ini mereka juga mengadakan diskusi setiap bulan sekali untuk membahas UU Perburuhan maupun permasalahan-permasalahan lain yang mereka hadapi di perusahaan. Salah satunya adalah kelompok buruh di PT Koryo Puspita Indonesia yang mulai gusar dengan persoalan UMR dan menu makanan yang tidak pernah berhasil diselesaikan lewat SPSI. Lama-kelamaan, kekecewaan buruh semakin tak terbendung. Akhirnya, beberapa orang buruh dampingan Yasanti atau kader yang telah dikenal akrab oleh massa buruh mendesak untuk mengadakan aksi demonstrasi di luar pabrik.

Kader-kader Yasanti berhasil mengumpulkan buruh untuk melakukan rapat-rapat persiapan menjelang aksi demonstrasi. Yasanti mendatangkan tokoh buruh di PT Batamtex yang menuturkan pengalaman-pengalamannya, sehingga menimbulkan semangat untuk melakukan aksi. Karena kebanyakan buruh PT Koryo Puspita masih awam dengan UU Perburuhan, maka Yasanti mengajak mereka untuk mendiskusikan UU Perburuhan, terutama tentang jam kerja, perhitungan upah, dan upah lembur yang benar dan bagaimana mencari dukungan ketika melakukan aksi.

Setelah melakukan persiapan selama hampir dua bulan, pada tanggal 16 Mei 1994 aksi demonstrasi digelar dengan jalan mogok kerja. Para buruh duduk-duduk di jalanan sambil membawa poster, gambar, selebaran yang

berisi tuntutan UMR dan hak cuti, serta spanduk-spanduk bertuliskan *"Udan deres payungan koran, bayaran ngenes kesejahteraan kurang/kakean aturan"*, *"Penuhilah hak-hak kami buruh miskin"*, *"Penuhilah UMR karyawan"*, *"Mana hak cuti kami Pak?"*. Namun belum lama demonstrasi berlangsung, pihak militer dan aparat pemerintah datang. Aksi pun terhenti dan kemudian terjadi perundingan oleh 12 orang sebagai tim perunding yang antara lain melibatkan polsek, Depnaker, SPSI, Koramil, Pemda, DPC SPSI. Sementara itu, para buruh yang mengikuti aksi demonstrasi kemudian membentuk kelompok dengan nama APACE (*Anane Paseduluran Amargo Cupet Ekonomi* – Adanya Persaudaraan karena Himpitan Ekonomi)

3.4. Teror dan Kecurigaan dari Perusahaan dan Aparat Militer

Yasanti mengakui cukup menghadapi kesulitan dalam mengorganisir aksi mobilisasi buruh. Meskipun Yasanti telah mengambil peran sebagai fasilitator aksi, sementara aktor aksi mogok adalah buruh sendiri, namun di lapangan sering terjadi tumpang tindih peran. Buruh sering mengharapkan peran yang lebih dari Yasanti, tidak sekedar menjadi fasilitator, tetapi juga terlibat dalam aksi. Seringpula Yasanti baru mempelajari kondisi komunitas buruh, tetapi buruh sudah membawa persoalan yang mereka hadapi di perusahaan ke Yasanti. Akibatnya, perusahaan menaruh kecurigaan yang besar kepada Yasanti, sementara informasi tentang Yasanti yang masuk ke aparat atau pemerintah lebih banyak berasal dari perusahaan. Imbas dari kecurigaan tersebut, kantor Yasanti di Ungaran dibongkar oleh orang

tak dikenal. Pemerintah maupun perusahaan-perusahaan di Ungaran mulai mencurigai Yasanti sebagai penggerak aksi-aksi mogok di Ungaran. Aparat militer telah mengetahui bahwa Yasanti berada di belakang aksi-aksi demonstrasi buruh di Ungaran. Namun, belum pernah seorang pun aktivis Yasanti dipanggil, diinterogasi, atau ditahan oleh aparat militer. Ancaman aparat lebih ditujukan kepada para buruh yang mengikuti kegiatan Yasanti.

Kecurigaan aparat yang secara langsung dihadapi oleh Yasanti terjadi ketika pada suatu saat Yasanti sedang berlatih teater buruh di sebuah lapangan terbuka. Pada waktu yang bersamaan, ada pasukan tentara sedang berlatih pula di daerah itu. Peristiwa itu oleh Yasanti dianggap bukan suatu kebetulan. Waktu itu kegiatan-kegiatan yang melibatkan buruh berupa pertemuan atau diskusi akan dicurigai sebagai gerakan melawan pemerintah.

Insiden yang pernah dialami Yasanti berkaitan dengan ketidaksenangan perusahaan pada kegiatan Yasanti adalah kasus pencurian dokumen teater buruh. Kantor Yasanti di Ungaran selalu kosong pada hari Sabtu dan Minggu karena aktivisnya pulang ke Yogyakarta. Pihak aparat kelurahan di Ungaran sebenarnya tidak mempermasalahkan keberadaan Yasanti dan bahkan mendukung kegiatan Yasanti. Namun, Yasanti tetap mengambil peran sebagai fasilitator dalam aksi-aksi yang dilakukan buruh.

3.5. Strategi Kelangsungan Gerakan

3.5.1. Pendekatan pada Aparat Desa

Setelah terjadi kasus pembongkaran dokumen oleh

orang tak dikenal di kantor Yasanti menyusul aksi mogok buruh PT Batamtex, maka Yasanti melakukan pendekatan intensif dengan aparat desa. Yasanti sering bertandang ke kantor kelurahan untuk mengakrabkan diri dengan aparat desa dan kadang-kadang meminjam tempat untuk melakukan kegiatan. Sebaliknya, lurah juga sering datang ke kantor Yasanti di Ungaran. Petugas Lapangan (PL) Yasanti dan aparat kelurahan sering berbincang-bincang tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan Yasanti. Lurah juga mendukung kegiatan Yasanti karena membantu meningkatkan keterampilan masyarakatnya. Tidak jarang lurah ikut membantu mendorong dan mengorganisir masyarakat yang sebagian besar adalah buruh pabrik untuk mengikuti kursus dan pelatihan yang diberikan Yasanti. Kebetulan, dua kelurahan yang jadi lokasi Yasanti lurahnya masih muda dan mendukung kegiatan Yasanti, jadi Yasanti dapat berkomunikasi dengan baik.

Meskipun demikian, sebelum tahun 1997 (masa kekuasaan Soeharto), selalu ada perasaan was-was atau ketakutan untuk melakukan diskusi dengan buruh di Ungaran karena dapat memicu munculnya kecurigaan penduduk terhadap kegiatan yang dilakukan Yasanti bersama para buruh. Rumah yang disewa sebagai kantor Yasanti di Ungaran memiliki jendela dengan kaca memanjang dari atas sampai bawah, sehingga kegiatan yang dilakukan bisa terlihat dari luar. Diskusi buruh yang dilakukan pada malam hari akan dianggap sebagai sesuatu yang asing karena masyarakat sekitar biasanya hanya berkumpul jika ada kematian dan pengajian. Kegiatan yang hanya menghadirkan para buruh dapat mengundang pertanyaan orang

kampung. Perusahaan pun bisa mengetahui kegiatan itu dan melarang buruhnya mengikuti diskusi buruh.

1.5.2. Kegiatan Kamuflase Politis

Agenda memfasilitasi penguatan buruh di Ungaran Yasanti harus dilakukan secara berhati-hati agar tidak dicurigai oleh aparat. Untuk menyamarkan aksinya, Yasanti tetap melakukan kegiatan kursus menjahit dan kursus-kursus keterampilan yang lain di Ungaran, Yogyakarta, maupun Sukoharjo. Kursus keterampilan akhirnya tidak saja dijadikan sebagai *entry point* dalam pengorganisasian buruh, tetapi juga berfungsi sebagai kamuflase bagi kegiatan mobilisasi aksi buruh. Yasanti menyadari bahwa setelah berlangsung aksi mogok buruh aktivis Yasanti dan buruh selalu mengalami ketakutan psikologis untuk melakukan kegiatan karena aparat keamanan selalu mencari pihak ketiga di belakang aksi. Dalam situasi penuh kekhawatiran kursus keterampilan untuk buruh perempuan yang juga diikuti oleh warga lingkungan setempat, membuat Yasanti lebih diterima lingkungan masyarakat secara umum. Hal ini juga dilakukan karena pada saat itu ornop (LSM) sering dianggap sebagai musuh pemerintah, sehingga dari istilah yang dipakai pun ketika memperkenalkan dengan masyarakat sekitar tidak sebagai ornop atau LSM, melainkan Yayasan yang melakukan kegiatan keterampilan.

Untuk menyebarluaskan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Yasanti dan mencari kelompok-kelompok pendukung, Yasanti masuk ke instansi pemerintah melalui kelompok Dharma Wanita. Keberadaan Yasanti di tengah-

tengah organisasi pemerintah berawal dari permintaan Ketua Dharma Wanita Pengadilan Agama Ungaran untuk mengembangkan keterampilan, yaitu membuat tas dari benang nilon di organisasinya. Yasanti merespons permintaan itu sebagai peluang yang baik untuk menguatkan keberadaan Yasanti di wilayah Ungaran karena di samping penguatan akar ke bawah, pengembangan ke atas juga sangat diperlukan. Yasanti mengharapkan kelompok Dharma Wanita mau mengenali dan ikut menyuarakan persoalan-persoalan buruh.

Untuk mengakrabkan anggota kelompok, sekaligus menunjukkan pada warga kampung (desa tempat tinggal buruh) bahwa kegiatan yang dilakukan dalam pertemuan buruh bukanlah kegiatan yang negatif, Yasanti juga melakukan kegiatan anjangsana antarburuh. Dalam kenyataannya, kegiatan ini mendapat dukungan dari warga masyarakat. Dengan adanya dukungan warga lingkungan buruh terhadap gerakan buruh, maka gerakan buruh akan semakin kuat.

Keberadaan kelompok-kelompok dampingan di Yogyakarta, yaitu pramuniaga, remaja putri putus sekolah, dan buruh gendong turut meminimalkan Yasanti dari kecurigaan pemerintah terhadap aktivitas pendampingan buruh yang dilakukan Yasanti. Kelompok-kelompok dampingan ini mengikuti kegiatan UB simpan pinjam dan kursus-kursus keterampilan. Kegiatan-kegiatan keterampilan tersebut juga sebagai *entry-point* kegiatan diskusi perburuhan bagi pramuniaga di Yogyakarta. Sebagai sebuah ornop, Yasanti juga pernah beberapa kali diminta untuk melakukan pendaftaran ulang di kantor Direktorat

Sosial Politik (Ditsospol) DIY. Untuk keperluan mendaftar ulang, ada dokumen-dokumen dan laporan aktivitas kegiatan Yasanti yang memuat kegiatan keterampilan.

4. Yasanti di Sukoharjo

4.1. Pendampingan melalui SPSI

Di Sukoharjo, pembelaan kasus-kasus perburuhan telah dimulai sejak tahun 1992. Munculnya kasus-kasus biasanya berawal dari pembicaraan ringan antara teman sampai mereka (para buruh) merasa perlu untuk mengadakan pertemuan rutin guna membahas persoalan-persoalan yang mereka hadapi di perusahaan. Mereka kemudian membentuk kelompok-kelompok kecil untuk membicarakan berbagai masalah di tempat kerja maupun di luar tempat kerja. Dari beragam masalah kelompok, kemudian diidentifikasi persoalan-persoalan mana yang mendesak untuk diselesaikan. Dalam proses penyelesaian masalah, Yasanti melihat bahwa para buruh banyak belajar mendokumentasikan penyelesaian kasus yang secara tidak langsung dapat melatih mereka untuk menganalisis dan berpikir kritis.

Para buruh akhirnya terbiasa mengutarakan segala persoalan yang mereka hadapi di perusahaan. Mereka juga mengetahui banyak tentang berbagai peraturan dan hukum perburuhan, sehingga banyak di antara mereka semakin kritis dan mulai berani mempertanyakan hak-hak mereka kepada pengusaha. Hal itu, antara lain, terlihat dalam pemilihan pengurus SPSI yang beberapa anggota kelompok inti terpilih menjadi pengurus SPSI, yaitu sebagai sekretaris SPSI dan koordinator BUMK (Badan Musyawarah Unit

Kerja) SPSI di sub unit departemennya. Dengan terpilihnya mereka, secara tidak langsung program serta susunan pengurus SPSI disusun sesuai aspirasi buruh.

Kedekatan Yasanti dengan pengurus SPSI menjadikan Yasanti sebagai strategi penguatan buruh di sana, yaitu dengan menyusun materi pelatihan buruh bersama-sama SPSI. Yasanti memodifikasi materi perburuhan dari SPSI dengan memasukkan beberapa materi tentang kedisiplinan dan motivasi, kepemimpinan, kesehatan dan keselamatan kerja, sanitasi, dinamika kelompok, dan materi-materi pengorganisasian. Dalam setiap materi yang diberikan, Yasanti selalu menyisipkan isu gender. Modifikasi ini diharapkan bisa memperluas wawasan buruh tentang hukum perburuhan dan menumbuhkan kemampuan buruh untuk berpikir kritis. Yasanti juga mendesakkan sistem pelatihan yang partisipatif, yaitu dengan jalan melibatkan peran peserta dalam pelatihan, sehingga permasalahan yang dirasakan oleh buruh bisa terungkap dalam pelatihan, sekaligus dapat dicari pemecahannya

Dengan pengurus SPSI PT Sritex, Yasanti juga mendiskusikan dan mencari jalan keluar atas kasus-kasus yang menimpa buruh. Kasus yang pernah didiskusikan SPSI dengan Yasanti adalah kasus PHK secara sepihak lima buruh bagian gudang persediaan yang tertidur di gudang pada jam kerja. Lima buruh tersebut semula hanya berniat untuk beristirahat sebentar. Namun, karena kecapaian, mereka tertidur. Pekerjaan mereka sebenarnya sudah selesai, tetapi jam kerja masih tersisa beberapa jam. Menurut peraturan PT Sritex, buruh yang sengaja tidur

pada jam kerja dianggap melanggar peraturan. Nasib sial menimpa lima buruh tersebut karena satpam melihat mereka tertidur. Satpam kemudian melaporkan kejadian itu kepada manajer, sehingga kelima buruh itu di PHK. Kelima buruh itu kemudian melaporkan ke SPSI yang kemudian mendiskusikannya dengan Yasanti. Akhirnya, kasus itu dibawa ke Depnaker.

Pada pertengahan tahun 1995, atas inisiatif beberapa buruh PT Sritex yang ingin mengajukan tuntutan kenaikan UMR, Yasanti mendiskusikan gagasan itu dengan para buruh dan SPSI. Setelah melakukan diskusi dan konsultasi, pada bulan Oktober 1995, beberapa buruh membuat surat pengaduan yang ditujukan kepada PUK SPSI PT Sritex. Selanjutnya, para penandatangan surat tersebut dipanggil oleh manajer personalia untuk berunding. Dalam perundingan, hadir 5 orang buruh (penanda tangan surat), pihak SPSI, dan personalia Sritex. Perundingan berlangsung hingga empat kali dan berakhir dengan membuat kesepakatan. Sambil menunggu pihak perusahaan yang telah berjanji akan meningkatkan UMR, para buruh dan SPSI membentuk tim perumus. Hal itu dilakukan untuk menanggulangi pengusaha ingkar janji.

Hubungan baik Yasanti dengan pengurus SPSI PT Sritex juga memungkinkan Yasanti mengadakan diskusi-diskusi perburuhan. Walaupun demikian, upaya untuk memandirikan buruh belum mendapatkan hasil yang maksimal. Hal ini karena mobilitas buruh sangat tinggi, termasuk buruh yang berasal dari PT Batamtex pun sudah banyak yang berpindah ke perusahaan lain di Jakarta, Bandung, Ungaran, dan lain-lain. Metode pendekatan juga

masih mencari format yang efektif, mulai dari kegiatan tari, karawitan, UB, arisan, namun hasilnya belum maksimal. Pendekatan yang dilakukan adalah diskusi reguler.

4.2. Muncul Gerakan-gerakan Buruh

Pada saat yang bersamaan dengan keberadaan Yasanti di Sukoharjo, organisasi buruh independen (di luar bentukan rezim Orde Baru) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) melakukan aktivitas yang sama di komunitas buruh PT Sritex. Pada saat itu juga, muncul kelompok-kelompok mahasiswa pro buruh, yaitu Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID), Pusat Perjuangan Buruh Indonesia (PPBI), dan Partai Rakyat Demokratik (PRD). Keberadaan gerakan dan kelompok pro buruh menimbulkan pertanyaan aparat mereka mencari informasi mengenai hubungan antara Yasanti dengan SBSI, serta kelompok kelompok lain pro buruh.

4.3. Tekanan Aparat dan Strategi Yasanti

Munculnya aktivis yang pro buruh memengaruhi tingkat peristiwa aksi mogok buruh setiap kegiatan yang dilakukan di kawasan pabrik, termasuk kegiatan Yasanti selalu dicurigai. Kelompok dampingan Yasanti diinterogasi oleh pengusaha maupun aparat keamanan karena mengikuti kegiatan Yasanti. Aparat keamanan yang ditugaskan untuk mengamati kegiatan Yasanti sering bertanya kepada buruh tentang apa yang dilakukan di Yasanti dan siapa saja yang ikut. Perusahaan bahkan melarang para buruhnya mengikuti kegiatan di Yasanti serta menyuruh salah seorang buruh menjadi mata-mata untuk mengikuti kegiatan yang dilakukan Yasanti dan membuat laporan ke perusa-

haan.

Yasanti meyakini bahwa aparat keamanan yang dibayar perusahaan sebenarnya sudah mengetahui apa yang dilakukan Yasanti karena sebagian buruh yang mengikuti kegiatan Yasanti adalah teman mereka terutama setelah terjadi peristiwa aksi demonstrasi di PT Sritex para buruh yang mengikuti kegiatan Yasanti selalu diawasi oleh polisi perusahaan yang diberi tugas untuk mengawasi kegiatan Yasanti.

Aparat kemanan yang dibayar perusahaan juga sering bertanya kepada anak pemilik rumah yang disewa oleh Yasanti tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan Yasanti. Di Sukoharjo, Yasanti menyewa bagian belakang rumah, sedang bagian depan rumah digunakan untuk membuka toko kecil yang dijaga oleh anak pemilik rumah. Lurah bahkan meminta pemilik rumah untuk mengusir Yasanti dan tidak memperbolehkan rumahnya disewa sebagai kantor Yasanti.

Sementara itu, reaksi ketidaksenangan pihak perusahaan terhadap Yasanti karena menggerakan buruh dilakukan dengan cara mengancam dan menekan Yasanti melalui aparat desa. Staf Yasanti dipanggil ke hadapan aparat desa dan dimintai keterangan mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Namun, untuk menghindari kecurigaan, Yasanti mengadakan pendekatan ke masyarakat dan aparat kelurahan dengan cara berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan, seperti mengisi hiburan dalam acara perayaan tujuh belas Agustus. Masyarakat Jetis Sukoharjo kebetulan sangat berminat dengan seni karawitan dan tari. Karenanya, Yasanti mengajak mereka untuk mengikuti

kegiatan menari dan karawitan yang diadakan Yasanti. Salah satu kelompok dampingan Yasanti selalu mengadakan kegiatan karawitan di rumah salah satu penduduk yang menyewakan perangkat gamelan kepada masyarakat. Penduduk setempat tidak segan-segan bergabung dengan para buruh dan ikut melatih mereka. Latihan karawitan dan menari dilakukan sebagai strategi Yasanti untuk lebih diterima keberadaannya di lingkungan masyarakat sekitarnya.



Bab 4

YASANTI DI TENGAH GERAKAN SOSIAL PASCAREZIM ORDE BARU: MERETAS STRATEGI BARU ADVOKASI BURUH

A. Perubahan Sosial Politik dan Strategi Gerakan

Pascajatuhnya Soeharto pada Mei 1998, situasi sosial politik di negeri ini mengalami perubahan. Tumbangnya kekuasaan represif otoritarian Soeharto menandai perubahan tersebut. Kran demokratisasi terbuka lebar, sehingga memungkinkan kebebasan pers, berpendapat, dan berserikat mengalir deras. Situasi ini di satu sisi memberikan peluang cukup besar terhadap elemen gerakan sosial melanjutkan agenda-agenda perubahan. Namun pada sisi lain, perubahan sosial politik tidak setepat sebagaimana telah diagendakan semula disebabkan muncul tantangan-tantangan baru yang lebih kompleks dan berskala besar.

Prediksi awal terkait tumbangnya rezim otoritarian Orde Baru akan membawa dampak signifikan terhadap

pembebasan masyarakat dari belenggu "pembisuan", tetapi pada tahap berikutnya ternyata tidak serta-merta menjadikan situasi berubah lebih baik. Orde Baru mewariskan tidak saja kondisi perekonomian yang carut marut, melainkan juga rezim korup yang tersistem dari hulu ke hilir, sehingga bangsa ini didera kemiskinan multidimensi yang kronis. Pada titik ini, nasib buruh berada di ambang ketidakpastian. Para buruh untuk kali kesekian kembali harus menerima nasibnya ketika diperlakukan tidak adil, bahkan diabaikan dan dimarjinalkan hak-haknya.

Fenomena tersebut mendorong segenap elemen gerakan sosial untuk merumuskan ulang strateginya, termasuk aktivis pembela hak-hak buruh. Fakta robohnya rezim otoritarian harus disikapi dengan segera menciptakan iklim kondusif bagi munculnya negara demokratis pro rakyat agar kekuatan rezim lama tidak sempat merapatkan barisan, lantas menelikung secara diam-diam. Strategi elemen gerakan sosial yang tadinya tegas-tegas melakukan advokasi *vis a vis* bergeser ke strategi kooperatif terhadap negara. Situasi sosial politik riil saat itu sangat membutuhkan upaya-upaya mendorong munculnya institusi negara yang kuat, sehingga mampu melindungi dan menjamin kesejahteraan rakyat. Pada aras lokal, model-model mobilisasi dalam konteks advokasi berganti ke arah penyadaran kritis masyarakat. Masyarakat merupakan mitra strategis, bukan lagi sebatas kelompok-kelompok dampingan. Partisipasi dan belajar bersama diberi ruang yang luas. Masyarakat sendirilah yang kemudian membangun kesadaran kritisnya, mengolah

pengalamannya, dan lantas mengembangkan menjadi agenda-agenda perjuangan hak-hak rakyat.

B. Kondisi Buruh Perempuan di Tengah Kecamuk Situasi Pasca-Orde Baru

Pada setiap taktik perubahan di negeri ini, peran buruh selalu dialpakan. Beragam kebijakan pasca-perubahan sosial-politik tidak lantas menjamin kehidupan buruh ke arah lebih baik. Fenomena ini dirasa lebih berat dan buruk di kalangan buruh perempuan. Gelombang perubahan Pasca-Orde Baru yang menghela angin keterbukaan beserta derasnya arus demokratisasi ternyata belum mampu membawa aspirasi pemenuhan hak dan kebutuhan buruh perempuan. Buruh perempuan dipaksa lagi mengakrabi situasi tidak adil, perlakuan eksploitatif, sistem yang mengamini ketidaksetaraan, mekanisme kontrak-pengupahan-praktik *outsourcing* yang membelenggu, dan kebijakan-kebijakan lain yang bias gender serta memarjinalkan buruh perempuan.

Ombak besar demokratisasi pasca-Orde Baru belum mampu mengikis batu karang kepentingan kapital. Apabila merujuk UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, terlihat bahwa pasal demi pasalnya lebih mengaspirasi kepentingan para pemilik modal. Bercermin melalui UU tersebut, negara secara meyakinkan telah abai terhadap fungsi dan kewajibannya melindungi kepentingan buruh (perempuan). Kecamuk situasi pada masa transisi demokrasi dari era orde baru ke reformasi dimanfaatkan benar oleh para pemilik modal untuk menekan para buruh demi mengeruk keuntungan sebesar-besarnya

dengan mengabaikan hak-hak dan nasib buruh. Kondisi ketidakpastian ekonomi pada galibnya berpotensi menambah daftar pengangguran dan jumlah orang miskin. Saat itu masyarakat membutuhkan pekerjaan. Keadaan *jobless* menempatkan masyarakat dan buruh pada posisi terbawah dalam relasi kepentingan dan kuasa. Mereka ini tidak memiliki *bargaining position*. Mereka harus bertahan hidup. Alasan ini menjadi hal utama bagi mereka untuk mengiyakan apa pun tawaran yang ada, meski peluang bekerja sebagai buruh yang dibuka oleh para pemilik modal pada akhirnya nanti justru memperburuk kondisi mereka. Hal ini tidak disadari oleh para buruh, namun dimanfaatkan oleh para pemilik modal. Hasilnya, antara lain: pengupahan tidak layak tetap berjalan, pembiaran sistem eksploitatif, pemecatan dan pemutusan hubungan kerja secara sepihak atau semena-mena tidak pernah ditindak tegas, dan serentetan ketidakadilan lain yang menimpa buruh di Indonesia, terlebih kepada buruh perempuan.

Perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan perempuan dalam berbagai sektor industri, seperti makanan, garmen, alat-alat kesehatan, plastik, dan elektronik seringkali menggunakan standar berbeda saat melakukan perekrutan, yakni tidak mensyaratkan keterampilan (*skill*) sebagaimana yang terjadi pada buruh laki-laki. Hal ini dimaksudkan agar perusahaan dapat membayar buruh perempuan *unskill* dengan upah sangat murah. Selain itu, buruh perempuan tersebut juga tidak mendapatkan jaminan kesehatan, keselamatan kerja, dan pengembangan karier. Meski situasinya amat tidak menguntungkan buruh

perempuan, para buruh ini masih saja dituntut tetap produktif dan patuh. Para pengawas (supervisor dan mandor) sengaja dipilihkan laki-laki. Fenomena ini apabila dikaji ulang, sebenarnya merupakan pelanggengan struktur patriarki melalui penundukan dan subordinasi buruh perempuan. Budaya kepatuhan sengaja diciptakan supaya para perempuan tidak mempertanyakan tindakan eksploitatif terhadapnya.

Fakta sosial tersebut dialami oleh buruh perempuan maupun laki-laki, sehingga buruh menjadi tidak berdaya menghadapi ketidakadilan sistem perburuhan berupa sistem kontrak dan borongan. Sistem ini sengaja dilegalisasi sebagai prinsip sistem ketenagakerjaan baru. Padahal notabene tidak menguntungkan kaum buruh, karena menciptakan ketergantungan yang tinggi terhadap pemilik modal dan memperlemah *bargaining power* kaum buruh atas hak dan kebutuhannya. Terkait sistem kontrak dan borongan, sistem kontrak mengharuskan para buruh memperpanjang kontraknya, misalnya per semester (6 bulan). Biasanya diberlakukan waktu jeda yang cukup lama baru rekruitmen dibuka kembali oleh perusahaan. Buruh yang habis kontrak kerjanya, setelah melampaui masa jeda, mereka harus melamar kembali kepada perusahaan. Status bekerja sebagai buruh tidak lantas otomatis, meskipun sebelumnya tercatat menjadi buruh di tempat yang sama. Dalam sistem borongan, masa kerja ditentukan secara semena-mena, misalnya 12 jam, sehingga kerja buruh dimulai pukul 07.00 pagi hingga pukul 19.00 malam dengan alokasi jeda waktu istirahat yang sangat pendek. Terkadang masih dibebani *overtime*

berupa kerja lembur. Upah kerja borongan seringkali belum mencukupi pemenuhan kebutuhan pokok buruh, baik harian maupun per bulan, sehingga tawaran kerja lembur menjadi alternatif bagi para buruh. Sistem kerja seperti ini tentu saja memperlemah kondisi fisik dan psikis buruh, namun para buruh tidak memiliki opsi lain.

Selain sistem kontrak dan borongan, terdapat sistem lain yang tidak memihak buruh, yakni sistem *outsourcing*. Korban dari sistem *outsourcing* terutama buruh perempuan. Perjuangan serikat buruh menolak sistem *outsourcing* sebenarnya telah dimulai jauh sebelum Undang-undang No. 13 tahun 2003 disahkan. Berbagai macam aksi protes maupun demonstrasi besar-besaran secara serempak dilakukan berbagai serikat buruh di seluruh Indonesia untuk menolak praktik *outsourcing* tersebut. Kecaman terhadap pemerintah yang melegalisasi UU tersebut datang dari beragam kalangan, mulai dari elemen masyarakat, serikat buruh, praktisi hukum, hingga kalangan akademisi (mahasiswa). Dasar argumentasi penolakan UU No. 13 tahun 2003 ialah undang-undang ini lebih mementingkan pemodal dan menjadi perpanjangan tangan sistem kapitalisme global yang menjadikan buruh Indonesia sebagai "budak" terlegalisasikan negara.

Sebenarnya, praktik *outsourcing* telah ada jauh sebelum UUK 13/2003 disahkan. Pada masa itu, sistem *outsourcing* sudah dijalankan oleh perusahaan-perusahaan garmen modal asing yang besar dan berskala ekspor (*export processing zones*). Sistem *outsourcing* tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari kebijakan ekonomi rezim ORBA dengan menitikberatkan pada industri yang ber-

orientasi ekspor (*export oriented industry*). Pada perkembangannya kemudian, sistem *outsourcing* lebih menyerupai "perbudakan modern" yang terlegalisasikan melalui hukum negara. Pengoperasian sistem ini lagi-lagi menempatkan buruh perempuan sebagai pihak penderita. Strategi eufimisme bahasa dalam wacana politis menjadi semacam kanal simbolik yang memerangkap buruh perempuan. Misalnya saja penggunaan istilah "fleksibilitas tenaga kerja" yang ditaburi dengan jargon "penyamaan hak untuk bekerja" (buruh perempuan dengan buruh laki-laki) dan demi "penciptaan dan perluasan lapangan kerja" menjadi wacana imperatif yang menggiring kaum perempuan mengakses lapangan kerja. Sayangnya, kaum perempuan ini sengaja dibiarkan *unskill*, maka sembari melecut produktivitas buruh perempuan, *cost* yang dikeluarkan juga minim mengingat buruh tanpa spesifikasi *skill* dan keterampilan memadai tidak layak diupah secara layak. Rendahnya keterampilan yang dimiliki buruh perempuan tersebut menjadi alasan pemodal untuk menjadikan buruh perempuan ini sebagai alat mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Bahkan, demi pencapaian prinsip fleksibilitas, maka dibuka peluang lebih besar kepada perempuan untuk masuk ke dalam pasar kerja. Setelah itu, disiapkan paket algojo berupa sistem kerja kontrak, borongan, dan *outsourcing* yang perlahan dan pasti menyiksa buruh perempuan.

Fenomena itu tercermin melalui kondisi buruh perempuan di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Semarang. Kondisi mereka sama buruknya dengan buruh perempuan di daerah lain yang terjebak sistem *outsourcing*. Awalnya

sistem *outsourcing* terkesan pro buruh perempuan dan bakal menjamin peningkatan kesejahteraan mereka. Sistem ini meniadakan proses rekruitmen berbelit. Buruh-buruh perempuan tersebut banyak yang dapat masuk dalam dunia kerja dengan mudah. Beberapa perusahaan bahkan merekrut buruhnya tanpa melalui proses yang jelas, misalnya tidak mensyaratkan ijazah, penguasaan *skill* tertentu, maupun keterampilan apa pun. Mudahnya prosedur tentu saja disambut antusias buruh perempuan. Namun, dibalik segala kemudahan tersebut sebenarnya tersembunyi sifat jahat sistem *outsourcing*. Kesederhanaan prasyarat bagi buruh perempuan, ternyata dimaksudkan jika terjadi masalah, buruh tersebut tidak memiliki bukti apa pun bahwa mereka pernah bekerja di perusahaan tersebut. Selanjutnya, buruh-buruh perempuan sengaja dikondisikan *unskill* agar perusahaan dapat mengupah mereka secara murah dan tidak protes terhadap sistem kerja kontrak. Perusahaan membuat peraturan yang mewajibkan para buruh memperbarui kontrak setiap tahun tanpa klausul jaminan apa pun dari perusahaan. Kecurangan ini tidak berhenti sebatas di awal-awal pekerjaan, tetapi berlanjut sepanjang kontrak kerja berjalan. Pada saat bekerja, buruh perempuan harus memenuhi jam kerja yang panjang, lebih dari 10 jam per hari dengan upah yang rendah. Mereka seringkali dipaksa lembur dan tidak dibayar dengan alasan sebagai skorsing karena mereka tidak dapat menyelesaikan target yang dimaui oleh perusahaan.

Praktik ekploitasi terhadap buruh perempuan merambah pula ke kontrol terhadap tubuh perempuan

berupa pengabaian hak-hak reproduksinya. Buruh perempuan ini tetap dikenai *shift* malam walaupun sedang hamil. Bahkan, meski dalam keadaan hamil, mereka tidak mendapatkan cuti melahirkan. Siasat perusahaan ketika mendekati waktu melahirkan, buruh diberhentikan secara sepihak dengan alasan memberi waktu istirahat. Sepintas, alasan perusahaan masuk di akal. Namun, sebenarnya hanya akal-akalan saja karena selepas masa nifas atau si buruh telah merasa sehat lagi, ia tidak bisa kembali bekerja. Ia harus menunggu rekruitmen perusahaan dibuka dan menjalani proses awal mendaftar sebagai buruh dengan membuat lamaran pekerjaan baru. Fenomena lain terkait pengabaian hak-hak reproduksi kaum buruh tercermin melalui kebijakan perusahaan mengonversi cuti haid menjadi izin sakit. Buruh perempuan kehilangan hak cuti karena tidak ada lagi. Haid dikategorikan sama halnya dengan kejadian sakit lainnya. Karena termasuk golongan izin sakit, maka haid bukan cuti, sehingga perlakuan pun berbeda. Hal izin ini menjadi penilaian tersendiri yang menentukan rapor buruh, semakin banyak izin akan dianggap berkinerja di bawah standar perusahaan, sehingga dampaknya dapat terjadi pemecatan sewaktu-waktu. Pada titik ini, buruh perempuan mengalami diskriminasi dan ketidakadilan secara berlapis.

Selain buruh *outsourcing*, ada pula buruh perempuan yang bekerja membuat dan memproses barang atau menyediakan jasa di rumah mereka sendiri untuk mendapatkan upah. Buruh jenis ini dikenal dengan istilah *home base workers*. Buruh model ini melakukan aktivitas pekerjaan di rumahnya. Pekerjaan yang dilakukan, misalnya

perantara, subkontraktor, hingga majikan. Jenis pekerja seperti ini biasanya dibayar secara borongan tatkala pekerjaan telah selesai.

Home base workers disebut pula dengan istilah-istilah, antara lain buruh tergantung, buruh subkontrak, buruh borongan, dan buruh berupah yang tak tampak. Risiko buruh perempuan *home base workers* lebih tinggi dibandingkan dengan buruh perempuan yang berstatus kontrak dan bekerja di pabrik karena sama sekali tidak mendapatkan jaminan. Buruh perempuan *home base workers* harus menyediakan sendiri peralatan untuk memproduksi barang tersebut. Apabila terjadi kecelakaan kerja, buruh ini berobat sendiri. Pemakaian listrik dalam proses produksi menjadi tanggungan sendiri dan biaya rekening pun dibayar sendiri. Upah yang diterima sangat rendah apabila dibandingkan dengan kuantitas dan kualitas produk (kualitas ekspor) yang dihasilkan.

Fenomena buruh perempuan *home base workers* tersebut dapat dijumpai di wilayah Kabupaten Semarang, salah satunya ialah perusahaan sepatu skala ekspor milik warga negara asing yang membayar buruh perempuan rumahan dengan upah sangat rendah, yaitu per sepuluh (10) pasang sepatu diberi upah Rp 17.000,00 dan per sepuluh (10) pasang sandal diupah Rp 14.000,00. Upah diterimakan tidak secara otomatis, melainkan harus dengan catatan hasil kualitas jahitan sesuai standar pabrik. Apabila tidak sesuai standar, upahnya dikurangi. Jika sampai rusak, buruh yang merusakkan harus mengganti kerusakan yang ditimbulkannya.

Sampai saat ini, banyak perusahaan-perusahaan baru

berdiri di Kabupaten Semarang. Selain perusahaan baru, ada pula perusahaan lama yang berganti nama disebabkan pailit atau telah berganti kepemilikan. Perubahan-perubahan tersebut bukannya tidak berdampak merugikan kaum buruh, justru kian menambah derita para buruh. Secara otomatis, status buruh di perusahaan lama tersebut berubah menjadi buruh yang baru dan berganti status menjadi buruh kontrak. Ironisnya, hak pekerja untuk mendapatkan pesangon di perusahaan yang lama tidak diberikan.

Persoalan lain yang dihadapi buruh perempuan berlanjut lagi di ranah domestik. Buruh perempuan yang telah menikah, beberapa di antaranya memiliki suami pengangguran. Suami yang juga buruh ini menganggur karena mengalami PHK (pemutusan hubungan kerja). Selain PHK, banyaknya suami dari buruh perempuan yang berstatus pengangguran cukup lama dipicu oleh minimnya lapangan/kesempatan kerja. Perusahaan lebih mengutamakan memberi kesempatan kerja kepada perempuan demi menekan biaya mengupah buruh laki-laki.

Situasi tersebut jelas-jelas memosisikan buruh perempuan sebagai penanggung beban ganda (*double burden*). Di satu sisi bekerja sebagai buruh pabrik dengan beragam beban kerja berat, pada sisi lain masih pula bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga yang wajib mengurusi pekerjaan domestik. Fenomena ini sengaja dimapankan, setidaknya oleh pemilik modal melalui bermacam sistem kerja yang tujuan utamanya mengekploitasi buruh perempuan. Kenyataan buruh perempuan menjadi tulang punggung perekonomian keluarga tidak lantas

menaikkan status sosial perempuan sebagai penafkah utama, justru tetap dianggap sebatas pencari nafkah tambahan. Meski suami merupakan pengangguran, tapi tetap saja diakui sebagai kepala keluarga. Nilai sosial ini kemudian diadopsi pula oleh perusahaan demi pelanggengan sistem pengupahan yang tidak adil terhadap buruh perempuan.

Prioritas kesempatan kerja kepada buruh perempuan didasari pula oleh asumsi bahwa perempuan lebih memiliki kedekatan terhadap kultur kepatuhan dibandingkan dengan laki-laki. Kultur kepatuhan ini mampu menyekat kemungkinan buruh perempuan membentuk serikat buruh. Sekat tersebut kian tebal dikarenakan adanya beban ganda buruh perempuan, sehingga mereka tidak memiliki waktu mengorganisir diri melalui serikat pekerja. Gelombang rekruitmen buruh perempuan di perusahaan-perusahan dengan demikian tidak lain merupakan kerja-kerja penyiasatan patriarki demi mengontrol dan menyubordinasi perempuan.

Hal itu tampak melalui ketiadaan serikat pekerja atau organisasi independen milik buruh perempuan di perusahaan-perusahaan, meskipun buruh perempuan adalah mayoritas pekerja di perusahaan tersebut. Terkadang terdapat perusahaan yang menginisiasi berdirinya serikat pekerja, namun hal ini sebatas "organisasi boneka" yang dapat dimainkan seenaknya oleh perusahaan. Padahal esensi pendirian serikat pekerja buruh perempuan merupakan organisasi dari-oleh-untuk buruh yang memiliki fungsi melindungi kepentingan dan memperjuangkan hak-hak kaum buruh. Esensi tersebut seolah hal utopis bagi buruh

perempuan mengingat status mereka yang sengaja disamarkan oleh perusahaan, ada secara nyata namun tidak diakui. Hal ini mempersulit terbentuknya wacana serikat pekerja sebagai media advokasi para buruh perempuan. Tanpa serikat pekerja, posisi tawar buruh perempuan tidak saja lemah, tetapi nyaris tidak ada. Akibatnya bisa ditebak, perusahaan setiap saat dapat bertindak semena-mena, misalnya memakai isu serikat pekerja untuk memecat para buruh. Buruh perempuan yang ditengarai menggagas tentang pentingnya organisasi sebagai wadah berserikat para buruh, seringkali langsung diberhentikan atau kontraknya tidak diperpanjang lagi oleh perusahaan dengan alasan tidak jelas dan dibuat-buat.

Pembiaran demi pembiaran praktik kekerasan, eksploitasi, dan ketidakadilan terhadap buruh perempuan menyebabkan mereka mengalami fase keterputusan dari segala akses yang dibutuhkan buruh perempuan demi perubahan ke arah lebih baik lagi. Wajar apabila buruh perempuan merasa takut membentuk serikat pekerja ataupun menjalankan strategi dan agenda-agenda advokasi mandiri. Pangkal soalnya tidak terletak di kesadaran para buruh, melainkan pada relasi kepentingan yang timpang. Sistem perburuhan selama ini dengan demikian justru menjadikan perempuan sebagai korban utama. *Alih-alih* demi mewujudkan fleksibilitas tenaga kerja, buruh perempuan ternyata hanya menyebatas dianggap laiknya komoditas.

Situasi tersebut tentunya menjadi tantangan riil yang harus dihadapi oleh para aktivis pembela buruh. Strategi penguatan buruh perlu dirumuskan ulang mengingat adanya perubahan sosial-politik pasca-Orde Baru berupa

keterbukaan akses, tidak lagi mengharuskan aktivitas sembunyi-sembunyi. Selain itu, advokasi hak-hak buruh perempuan penting sekali mengintegrasikan wacana kesetaraan gender untuk membongkar praktik budaya patriarki, serta berjejaring dengan media massa demi kampanye menggalang dan memenangi opini publik. Meluasnya wacana global semisal MDG's merupakan amunisi lain yang sebenarnya mendukung gerakan advokasi buruh melalui forum-forum internasional.

Fenomena kekinian yang sempat terekam dan penting dimasukkan di sini ialah peristiwa momentum pemilu, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden tahun 2009. Momentum politik ini dimanfaatkan para kandidat dan politikus untuk mendongkrak perolehan suara dengan menggunakan slogan-slogan pembelaan buruh sebagai salah satu platformnya. Kenyataan tersebut mengandung dua makna, *pertama*, praktik komersialisasi dan politisasi isu-isu perburuhan. *Kedua*, munculnya komitmen politik para politisi dan calon pengambil kebijakan. Agar poin kedua lebih mengedepan daripada poin pertama, segenap elemen gerakan sosial dan aktivis buruh perlu mengawal momentum pemilu tersebut, sehingga komitmen politik benar-benar tercapai demi sebenar-benarnya pembebasan buruh dari belenggu penindasan dan ketidakadilan.

C. Yasanti Pascareformasi: Meretas Strategi Baru Advokasi Buruh Perempuan

Lengsernya Soeharto diikuti meredupnya *power* Rezim Orde Baru telah menerbitkan asa baru atas Orde Reformasi yang demokratis. Momentum perubahan ini mendorong

Yasanti melakukan transformasi strategis secara internal. Angin keterbukaan era reformasi secara tidak langsung membukakan peluang-peluang Yasanti untuk terang-terangan bergerak leluasa mengambil peran utama dalam gerakan advokasi buruh perempuan. Yasanti secara terbuka dan intensif menggelar diskusi-diskusi perburuhan dengan beragam kalangan, termasuk memotivasi para buruh berkumpul untuk *sharing* pengalaman pengorganisasian dan mengkritisi kebijakan-kebijakan yang tidak adil terhadap kaum buruh. Yasanti juga mendorong kaum perempuan, terutama buruh perempuan, untuk terlibat dalam kerja-kerja perjuangan kepentingan politik perempuan. Strateginya, antara lain: memfasilitasi pendidikan politik bagi buruh perempuan untuk meningkatkan kesadaran politiknya, mengenalkan wacana advokasi kepada buruh perempuan sebagai strategi perjuangan hak-hak politik para buruh, serta menjalin *networking* demi penguatan advokasi buruh perempuan. Salah satu jaringan Yasanti ialah menginisiasi adanya media dialog interaktif di radio. Kegiatan ini diikuti oleh beragam kalangan, yakni kelompok perempuan, para buruh, aktivis buruh, dan ornop. Aktivitas tersebut terutama berjalan di kawasan industri Jawa Tengah, seperti Ungaran, Bawen, Karangjati, Salatiga, dan Semarang. Dialog interaktif rutin digelar, selama ini lebih difokuskan ke tema-tema kesadaran politik perempuan, hambatan perempuan dalam politik, perempuan dan politik, serta hukum di Indonesia dan peran perempuan dalam politik.

Yasanti menyadari bahwa advokasi buruh perempuan memerlukan retasan strategi-strategi baru yang integral,

yakni (1) pendidikan kritis dan advokasi melalui pelatihan-pelatihan advokasi serta pendidikan politik, (2) membuka akses informasi dan komunikasi melalui inisiasi dialog interaktif di radio serta diskusi-diskusi di mitra buruh perempuan, (3) kampanye-kampanye melalui media, berupa: kartu pos, poster, *leaflet*, selebaran-selebaran, serta pembuatan media komunitas, (4) mengembangkan usaha-usaha berbasis komunitas dalam kerangka pemberdayaan ekonomi, (5) memperluas jejaring mitra di beragam kota-kota di Pulau Jawa, semisal Semarang, Yogyakarta, Bandung, Jakarta, Tangerang, Bekasi, dan Surabaya, serta (6) mengubah filosofi pengorganisasian dari "dampingan" ke "pola kemitraan", sehingga kelompok-kelompok buruh perempuan mampu mengagendakan advokasi mandiri.

Strategi advokasi pascareformasi yang diretas Yasanti masih perlu disokong oleh organisasi-organisasi buruh perempuan yang independen. Oleh karena itu, Yasanti intensif mendorong tumbuh-semainya serikat pekerja buruh perempuan di perusahaan-perusahaan. Serikat pekerja buruh perempuan ini tidak bisa bekerja sendirian, melainkan perlu membangun jaringan kerja sama dengan organisasi buruh lain di beragam kota dari tingkat pusat hingga level lokal. Hal ini *urgent* dilakukan sebagai basis penguatan advokasi kebijakan perburuhan secara menyeluruh dan berjenjang. Harapannya, advokasi buruh perempuan bakal bergelombang dan bertebaran di segenap penjuru, sehingga mampu merobohkan singgasana ketidakadilan di Bumi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulhadi, Rabab, "The Palestinian Women's Autonomous Movement: Emergence, Dynamics and Challenges" dalam *Gender and Society*, (Volume 12, Nomor 6, Desember 1998).

Aditjondro, George, "Tergusurnya Ornop oleh LSM" dalam *Suara Merdeka*, 4 Januari 1993.

Ali, Denny Januar, "Understanding the Indonesian Student Movement in the 1980's" dalam *Prisma* (No 47, September 1989).

Ali, Fachry, *Mahasiswa, Sistem Politik di Indonesia dan Negara*, (Jakarta: Inti Sarana Aksara,1985).

Alvarez, S., *Engendering Democracy in Brazil: Women's Movements in Transition Politics*, (Princeton: Princeton University Press, 1990).

Anderson, Ben, "Current Data on The Indonesian Military Elite" dalam *Indonesia*, (No. 45/April, 1988).

Barrosso, Carmen, "The Women's Movement, the State and Health Policies in Brazil" dalam Geertje Lycklama a

Nijeholt, *Towards Women's Strategies in the 1990s*, (London: Macmillan, Ltd., 1991).

Basu, Amrita, *The Challenge of Local Feminism: Women's Movements in Global Perspective*, (Boulder: Westview Press, 1995).

Blackburn, Susan, "Gender Interest and Indonesia Democracy" dalam David Bourchier dan John Legge (eds.), *Democracy in Indonesia 1950s and 1990s*, (Clayton: Centre of Southeast Asian Studies Monash University, 1994).

Booth, Anne, "Pembangunan: Keberhasilan dan Kekurangan" dalam Donald K. Emmerson, *Indonesia Beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama dan The Asia Foundation, 2001).

Bresnan, John, *Managing Indonesia*, (New York: Columbia University Press, 1993).

Budiman, Arief, "From Lower to Middle Class: Political Activities before and after 1988" dalam David Bourchier dan John Legge (eds.), *Democracy in Indonesia 1950s and 1990s*, (Clayton: Centre of Southeast Asian Studies Monash University, 1994).

Chhachhi, Amrita, "The State, Religious Fundamentalism and Women in South Asia" dalam Geertje Lycklama a Nijeholt, *Towards Women's Strategies in the 1990s*, (London: Macmillan, Ltd., 1991).

Emmerson, Donald K, *Indonesia Beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001).

Fakieh, Mansour, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi*

Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).

Falk, Richard, "Sovereignty and Human Rights: The Search for Reconciliation" dalam *IIP E-Journals*, Diakses 8 Januari 2005.

Ferre, Myra Marx, Carol Mueller, "Feminism and The Women's Movement: A Global Perspective", paper dipersiapkan sebagai naskah dalam David A. Snow, Sarah A. Soule, Hanspeter Kriesi (eds.), *The Blackwell Companion to Social Movement*, 2002.

Gamson, William, David S. Meyer, "Framing Political Opportunity" dalam Doug McAdam, John D.McCarthy dan Mayer N. Zald, eds., *Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities*, Mobilizing Structures and Cultural Framing, (Cambridge: Cambridge University Press, 2004).

Gelinas, Jacques B., *Juggernaut Politics: Understanding Predatory Globalization*, (London & New York: Zed Books, 2003).

Hadad, "Development and Community Self-Help in Indonesia" dalam *Prisma*, (No. 28, Juni 1983).

Hadiz, Vedi R., "Challenging State Corporatism on the Labour Front: Working Class Politics in the 1990s" dalam David Bourchier dan John Legge, *Democracy in Indonesia: 1950s and 1990s*, (Clayton: Centre of Southeast Asian Studies Monash University, 1994).

Hafidz, Wardah, "Sumbangan Gerakan Perempuan dalam Proses Demokratisasi Masyarakat Indonesia" dalam Fauzie Ridjal, Lusi Margiyani dan Agus Fahri Husein, *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993).

_____, "Gerakan Perempuan Dulu, Sekarang, dan Sumbangannya kepada Transformasi Bangsa, dalam Fauzie Ridjal, Lusi Margiyani dan Agus Fahri Husein, *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993).

Hariyadhie, *Perspektif Gerakan Mahasiswa 1978 dalam Percaturan Politik Nasional* , (Jakarta: Golden Terayon Press, 1994).

Harman, Chris, "Anti-Capitalism: Theory and Practice" dalam *International Socialism*, (No. 88, 2000).

Harsono, Rebeka, "Gerakan Perempuan: Antara Kepentingan Perempuan dan Politik Gender" dalam Irwan Abdullah, *Sangkan Paran Gender*, (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 1997).

Hendrata, Lukas, "Bureaucracy, Participation and Distribution in Indonesia Development" dalam *Prisma*, (No. 28, Juni 1983).

Hikam, Muhammad A.S., *Politik Kewarganegaraan Landasan Redemokratisasi di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1999).

Jocelyn, "Re-viewing Mainstream Theories: Political Opportunity Structure" dalam http://www.wsu.edu/~jmsilva/epstuff1.html~12k. Diakses 22 April 2003.

Jung, Eunsook, *Indonesian Women NGOs in Transition: The Roles and Limits of Women NGOs in Indonesia*, Tesis, (Seoul: Seoul National University), 2001.

Kumar, Radha, "From Chipko to Sati: The Contemporary Indian Women's Movement" dalam Amrita Basu, *The Challenge of Local Feminism: Women's Movements in Global Perspective*, (Boulder: Westview Press, 1995).

Liddle, R. William, "Rezim: Orde Baru" dalam Donald K. Emmerson, *Indonesia Beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama dan The Asia Foundation, 2001).

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, (Thousand Oaks: Sage Publications, 1994).

McAdam, Doug, *Conceptual Origins, Current Problems, Future Directions*, dalam Doug McAdam, John D. McCarthy, Mayer N. Zald, *Comparative Perspectives on Social Movements*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2004).

McAdam, Doug, John D. McCarthy, Mayer N. Zald, McAdam, Doug, John D. McCarthy, Mayer N. Zald, "Social Movements" dalam Neil J. Smelser (ed.), *Handbook of Sociology*, (Newbury Park: Sage Publications, 1988).

_____, *Comparative Perspectives on Social Movements*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2004).

McCarthy, John D, Mayer N. Zald, "Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory" dalam *American Journal of Sociology*, (Volume 82. Nomor 6, Mei 1977).

Molyneux, Maxine, "Mobilization without Emancipation? Women's Interests, State and Revolution"dalam R.R. Fagen, C.D. Deere dan J.L. Coraggio (eds.), *Transition and Development: Problems of Third World Socialism*, (New York: New York Monthly Review Press, 1986).

Mosse, Julia Cleves, *Gender dan Pembangunan*, (Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Center dan Pustaka Pelajar, 2003).

Muchtar, Yanti, *The Genesis of the Women's Movement in the New Order State and Its Gender Interest*, Makalah dalam Konperensi WIVS : Indonesian Women and Crises: Past and Present; Opportunities and Threats 9-12 Desember 2000, KITLV, Leiden.

Murniati, Nunuk, *Gerakan Anti Kekerasan terhadap Perempuan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998).

Nasikun, "Penanggulangan Kemiskinan: Kebijakan dalam Perspektif Gerakan Sosial" dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, (Vol. 6, No. 1), Juli 2002.

_____, "Komodifikasi dan Industrialisasi (Tubuh) Perempuan, Siapa Takut", Bahan Diskusi Bedah Buku *Penghibur(an)*, Komunitas Bunderan, Yogyakarta, 18 Mei 2006.

Naipospos, Bonar Tigor, "Mahasiswa Indonesia dalam Panggung Politik" dalam *Prisma*, (Nomor 7 Tahun XXV Juli 1996).

Notosusanto, Smita, *Indonesia Women: A Potrait of Women in Politics*, (Jakarta: Program Studi Kajian Wanita Universitas Indonesia, 1993).

Nusantara, Ariobimo A, Masri Sareb Putra dan Y.B. Sudarmanto, *Aksi Mahasiswa menuju Gerbang Reformasi*, (Jakarta; Grasindo, 1998).

Olesen, Virginia, "Feminism and Models of Qualitative Research" dalam Norman K. Denzin, *Handbook of Qualitative Research*, (Thousand Oaks: Sage Publications, Inc., 1994).

Ollenburger, Jane C., Helen A. Moore, *Sosiologi Wanita* , Terjemahan oleh Budi Sucahyono dan Yan Sumaryana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996).

Parnohadiningrat, Sudjadnan, *Good Governance dalam Perspektif Diplomasi Kontemporer*, Naskah Ceramah pada Peserta Program Pilihan KRA XXXVII LEMHANNAS Kelompok Departemen Luar Negeri, Jakarta, 5 Oktober 2004.

Pettman, Jan Jindy, "Gender Issues" dalam John Baylis dan Steve Smith, *The Globalization of World Politics*, (New York: Oxford University Press, 2001).

Pinney, Andrew, "Partners in Development? The Government and Non-Government Organization in Indonesia" dalam *Prisma*, (No. 28, Juni 1983).

Poerwandari, E. Kristi, "Organisasi Wanita Kristen di Indonesia: Dari Politik ke Kerja Sosial" dalam Mayling Oey-Gardiner, Mildred Wagemann, Evelyn Suleeman, Sulastri, *Perempuan Indonesia: Dulu dan Kini*, (Jakarta: PT Gramedia, 1993).

Poster, Winifred R., "The Challenges and Promises of Class and Racial Diversity in the Women's Movement: A Study of Two Women's Organizations" dalam *Gender and Society*, (Volume 9 Nomor 6, Desember 1995).

Rahayu, Ruth Indiyah, "Politik Gender Orde Baru: Tinjauan Organisasi Perempuan sejak 1980-an" dalam *Prisma* (Nomor 5, Mei, 1996).

Raharjo, Dawam, *Indonesia di Tengah-Tengah Perekonomian Dunia Dewasa Ini*, Ceramah pada Ulang Tahun XXX Universitas Tujuh Belas Agustus (UNTAG) Jakarta, 2 Agustus 1982.

Razavi, Shahrashoub, Carol Miller, *From WID to GAD: Conceptual Shift in the Women and Development Discourse*, (Jenewa: UNRISD, 1995).

Reese, Ellen, "Maternalism and Political Mobilization: How California's Postwar Child Care Campaign was Won" dalam *Gender and Society*, (Volume 10, Nomor 5, 1996).

Reimann, Kim D, "Politik, Norma-Norma dan Pertumbuhan NGO-NGO Sedunia" dalam *Wacana*, (XVI/2004).

Robinson, Kathryn, "Wanita: Dikotomi Versus Keragaman" dalam Donald K. Emmerson, *Indonesia Beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama dan The Asia Foundation, 2001).

Rosenfeld, Rachel A., Kathryn B. Ward, *The Contemporary U.S. Women's Movement: An Empirical Test of Competition Theory*, (Paper pada Pertemuan Tahunan Asosiasi Sosiologi Amerika, September 1988).

Rumansara, Agustinus, "Pengalaman INFID dalam Advokasi dan Kerjasama Internasional" dalam Rustam Ibrahim, *Agenda LSM Menyongsong Tahun 2000*, (Jakarta: CESDA-LP3ES, 1997).

Safa, H., "Women's Social Movements in Latin America" dalam *Gender and Society*, (Volume 4, Nomor 3, 1990).

Setiawan, Bonnie, "Organisasi Non-Pemerintah dan Masyarakat Sipil" dalam *Prisma*, (Nomor 7, 1996).

Shiva, Vandana, "Globalization and Poverty" dalam Veronika Bennholdt-Thomsen, Nicholas Faraclas, Claudia von Werlhof, *There is an Alternative: Subsistence and Worldwide Resistance to Corporate Globalization*, (London, New York: Zed Books, 2001).

Smyth, Ines, "Ä Critical Look at the Indonesia Government's Policies for Women" dalam Jan-Paul Dirkse, Frans Husken dan Mario Rutten (eds.), *Development*

and Social Welfare: Indonesia's Experiences under The New Order, (Leiden: KITLV Press, 1993),

Snow, David A, Robert D. Benford, "Ideology, Frame Resonance and Participant Mobilization, dalam *International Social Movement Research* (1, 1988).

Stake, Robert E, "Case Studies" dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, eds., *Handbook of Qualitative Research*, (Thousand Oaks: SAGE Publications, 1994).

Stammers, Neil, "Social Movement and The Social Construction of Human Right"dalam *Human Rights Quarterly* 21 (4, 1999).

Stanley, Liz, Sue Wise, "Method, Methodology and Epistemology in Feminist Research Processes" dalam Liz Stanley, *Feminist Praxis: Research, Theory and Epistemology in Feminist Sociology*, (London: Routledge, 1990).

Stanley, Liz, "Feminist Praxis and the Academics Mode of Production" dalam Liz Stanley, *Feminist Praxis: Research, Theory, and Epistemology in Feminist Sociology*, (London: Routledge, 1990).

Sundstorm, Lisa McIntosh, "Foreign Assistance, International Norms, and NGO Development: Lessons from the Russian Campaign" dalam *journals.cambridge.org/action/displayfulltext?type=1&fid=301417&jid=ino&volumeId=59&issue...* Diakses 7 September 2005.

Supriyanto, Didik, *Perlawanan Pers Mahasiswa: Protes Sepanjang NKK/BKK*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998).

Suryakusuma, Julia I., "Seksualitas dalam Pengaturan Negara", *Prisma*, (Nomor 7, Juli 1991).

Tarrow, Sidney, *Power in Movement: Social Movement, Collective Action and Politics*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1994).

Taylor, Verta, "Gender and Social Movements: Gender Processes in Women's Self-Help Movements" dalam *Gender and Society*, (Volume 13, Nomor 1, Pebruari 1999).

Taylor, Verta, Nancy E. Whittier, "Collective Identity in Social Movement Communities: Lesbian Feminist Mobilization" dalam Aldon D. Morris, Carol Mc. Clurg Mueller, *Frontiers in Social Movement Theory*, (New Haven: Yale University Press, 1992).

Thomas, Jan E., "Everything about Us is Feminist: The Significance of Ideology in Organizational Change" dalam *Gender and Society*, (Volume 13, Nomor 1, Februari 1999).

Tilly, Louise A.,"Women's Collective Action and Feminism in France 1870-1914" dalam Louise A. Tilly dan Charles Tilly, *Class Conflict and Collective Action*, (Beverly Hills: SAGE Publications, 1981).

Triwijati, Endah, "LSM Perempuan Transformatif: Gerakan Alternatif Pemberdayaan Perempuan" dalam Mayling Oey-Gardiner, Mildred Wagemann, Evelyn Suleeman, Sulastri, *Perempuan Indonesia: Dulu dan Kini*, (Jakarta: PT Gramedia, 1993).

Uhlin, Anders, *Democracy and Diffusion: Transnational Lesson-Drawing among Indonesian Pro-Democracy Actors*, (Lund: Lund University, 1995).

Waylen, Georgina, "Women and Democratization" dalam Patrick Dunleavy dan Jeffrey Stanyer, *Contemporary Political Studies 1994 Volume One*, (Belfast: The Political Studies Association of The United Kingdom, 1994).

West, Guida, Rhoda Lois Blumberg, "Reconstructing Social Protest from a Feminist Perspective" dalam Guida West dan Rhoda Lois Blumberg *Women and Social Protes*, (New York: Oxford University Press, 1990).

White, Aaronette M., "Talking Feminist, Talking Black: Micromobilization Process in a Collective Protest againt Rape" dalam *Gender and Society*, (Volume 13, Nomor 1, Februari 1999).

Wieringa, Saskia Eleonora, "Aborted Feminism in Indonesia: A History of Indonesian Socialist Feminism" dalam Saskia Wieringa, *Women's Struggles and Strategies*, (Aldershot : Gower, 1988).

_____, *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*, terjemahan oleh Hersri Setyawan, (Jakarta: Garba Budaya, 1999).

Wolf, Leslie, Leslie R. dan Jennifer Tucker (1995) "Feminism Lives: Building a Multicultural Women's Movement in the United States" dalam Amrita Basu, *The Challenge of Local Feminism: Women's Movements in Global Perspective*, Westview Press, Boulder.

Yasanti, "Yasanti dari Periode ke Periode" dalam Dadang Juliantara, Amin Muftiyanah, Istiyatun, *Pergulatan Hidup Buruh Perempuan – Refleksi Perjalanan Yasanti dalam Mendampingi Buruh*, (Yogyakarta: Yasanti & LP3ES (USAID), 1998).

_____, "Komentar Buruh Perempuan (Dampingan Yasanti)" dalam Dadang Juliantara, Amin Muftiyanah, Istiyatun, *Pergulatan Hidup Buruh Perempuan – Refleksi Perjalanan Yasanti dalam Mendampingi Buruh*, (Yogyakarta: Yasanti & LP3ES (USAID), 1998).

Yuval-Davis, Nira, Floya Anthias, "Introduction" dalam Floya Anthias dan Nira Yuval-Davis, *Woman-Nation-State*, (London: Macmillan, Press Ltd, 1989).

Surat Kabar dan Majalah

Kompas, 6 Agustus 1989, "Pangab Sesalkan LSM yang Menjelekkan Bangsa Sendiri."

_____, 30 September 1994, "Menhankam Mensinyalir Ada LSM Mengemas Isu untuk Menekan Negara."

Tempo, 8 Juli 1989, "De Koning dan Bantuan Swasta".

_____, 8 Desember 1979, " Mengapa Mereka Tidak Setuju".

_____, 21 Maret 1978, "Mereka Ziarah, Lalu Mengerek Spanduk Merah".

_____, 22 April 1978, "Mencari Cara ke Suasana Normal".

Dokumen dan Laporan

Akte Kelahiran Yayasan Annisa Swasti, 1982.

Annisa, (No 6, 1997).

Kebijakan dan Strategi Dasar Arah Pengembangan Program Yayasan Annisa Swasti 1992-1994.

Laporan kepada *The Asia Foundation*: Proyek Peningkatan Peranan Buruh Wanita melalui Gerakan Koperasi Produsen di Kawasan Industri Ungaran Jawa Tengah, Tanpa Tahun.

Laporan Program Ungaran, Kulon Progo dan Kota Tahun 1990.

Laporan Pembinaan Ungaran 1992.

Laporan Akhir Tahun Kegiatan Lapangan di Ungaran Tahun 1993.

Laporan Kegiatan Lapangan Divisi Aksi dan Advokasi di Ungaran Tahun 1993.
Laporan Divisi Penelitian, Penerbitan dan Dokumentasi Tahun 1994.
Laporan Kegiatan Divisi Pendidikan dan Latihan Tahun 1994.
Laporan Kegiatan Divisi Aksi dan Advokasi Tahun 1994.
Laporan Aksi dan Advokasi di Ungaran Tahun 1994.
Laporan Divisi Aksi dan Advokasi Sukoharjo Tahun 1994
Laporan Kegiatan Aksi Advokasi Ungaran Tahun 1995.
Laporan Kegiatan Aksi Advokasi Sukoharjo Tahun 1995.
Laporan Kegiatan Pramuniaga Yogyakarta Tahun 1995.
Laporan Perkembangan Kelompok Remaja Putus Sekolah (RPS) Tahun 1995.
Laporan Kegiatan Buruh Gendong Pasar Beringharjo Yogyakarta Tahun 1995.
Laporan Kegiatan Pengorganisasian Ungaran Tahun 1996.
Laporan Kegiatan Pengorganisasian Sukoharjo Tahun 1996.
Laporan Kegiatan Perempuan Usia Produktif (PUP) Tahun 1996.
Laporan Pengorganisasian Buruh Gendong Pasar Beringharjo Tahun 1996.
Laporan Semester I Tahun 1996 Divisi Pendidikan dan Pelatihan (Diklat).
Laporan Perjalanan Staf Yasanti Tahun 1996.
Laporan Divisi Penguatan Kelompok Yasanti Tahun 1998.
Laporan Kegiatan Pengorganisasian Buruh Ungaran Tahun 1998.
Laporan Pertemuan ORNOP Perempuan Indonesia Persiapan Konperensi Perempuan Sedunia di Beijing di Jakarta 4-7 Juni 1995.

Laporan *The First Asia-Europe NGO Conference* di Bangkok Thailand, 27-29 Pebruari 1996.

Laporan *Training Human Rights on Trafficking Women* oleh GAATW (*The Global Alliance against Traffic in Women*) di Bangkok 10-20 Juni 1996.

Laporan Kegiatan *Post Beijing Consultation of Trafficking, Prostitution and Violence against Women* di Jakarta 2-4 Nopember 1996.

Laporan *Training* Advokasi Hukum Berperspektif Perempuan di Bandung 25-28 Nopember 1996.

Laporan Pertemuan Gerakan Perempuan Tahun 1996.

Latihan Manajemen Pengembangan Masyarakat bagi Motivator Wanita Angkatan Kedua Tahun 1987.

Leaflet Yasanti.

Notulensi Evaluasi Akhir Tahun 1993 Yayasan Annisa Swasti.

Notulensi Rapat Yayasan Annisa Swasti Tahun 1994.

Notulensi Evaluasi Akhir Yasanti Tahun 1995.

Notulensi Rapat Yayasan Annisa Swasti Tahun 1996.

Notulensi Evaluasi Akhir Tahun 1996 Yayasan Annisa Swasti di Parangtritis 20-23 Desember 1996.

Rumusan Hasil-Hasil Semiloka tentang Hasil Konperensi Beijing yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi LSM/Ormas untuk Perempuan, 13-14 Desember 1995.

Swasti, (No I, 1996), "Lelaki Juga Wajib Momong Anak".

_____, (No IV/1, 1998), "Berbagi Pekerjaan Rumah Tangga".

_____, (No X/11, 1998), "Pemantauan Gizi selama Masa Reproduksi".

_____, "Buruh dan Keselamatan Kerja I ".

Daftar Wawancara

Wawancara dengan Budi Wahyuni, 30 Januari 2003.

_____, 16 Juni 2003.

Wawancara dengan Noordjanah Djohantini, 21 Maret 2003.

Wawancara dengan Siti Muslimah Widyastuti, 19 Maret 2003.

Wawancara dengan Sri Kusyuniati, 12 Juli 2003.

_____, 23 Januari 2005.

Wawancara dengan Amin Muftiyanah, 28 Januari 2003.

_____, 18 Pebruari 2003.

_____, 3 Maret 2004.

_____, 11 Mei 2004.

Wawancara dengan Umi Asih, 3 Maret 2004.

Wawancara dengan Nadhroh Assariroh, 10 Juni 2003.

Wawancara dengan Ibu Sutaryo, 4 Juli 2003.

Wawancara dengan Rubiyah, 4 Juli 2003.

Wawancara dengan Habib Chrizin, 12 Juli 2003.



LAMPIRAN FOTO



Gambar 1. Diskusi Buruh Industri di Ungaran Jawa Tengah



Gambar 2. Buruh Gendong melakukan aksi di Yogyakarta



Gambar 3. Buruh Industri melakukan aksi di Ungaran Jawa Tengah



Gambar 4. Yasanti terlibat dalam kegiatan jaringan GWG
(Gender Working Grup)



Gambar 5. Kegiatan ketrampilan merangkai janur untuk buruh industri di UngaranJawa Tengah



Gambar 6. Lokakarya buruh perempuan dan kesehatan reproduksi di Yogyakarta



Gambar 7. Pelatihan kepemimpinan bagi buruh di Ungaran Jawa Tengah



Gambar 8. Latihan karawitan buruh industri di Sukoharjo Jawa Tengah



Gambar 9. Pentas seni buruh di Sukoharjo Jawa Tengah



Gambar 10. Latihan kesehatan kerja bagi buruh di Yogyakarta



Gambar 11. Demo buruh di sebuah perusahaan di Ungaran



Gambar 12. Pertemuan jaringan kerja buruh perempuan Yogyakarta dan Jawa Tengah di Kaliurang Yogyakarta



Gambar 13. Pertemuan jaringan pekerja Yogyakarta dan Jawa Tengah



Gambar 14. Diskusi Perburuhan di Ungaran Jawa Tengah



Gambar 15. Pertemuan kelompok tani Kebonrejo Temon Kulonprogo Yogyakarta



Gambar 16. Pelatihan kepemimpinan Buruh Gendong Yogyakarta



Gambar 17. Pelatihan kepemimpinan Buruh Rumahan di Yogyakarta



Gambar 18. Seminar "Sistem *Outsourcing* bagi buruh" di Semarang Jawa Tengah



Gambar 19. "Decent Work Decent Wage" bunyi kampanye yang dipakai Perempuan Pekerja dalam acara Jaringan di Yogyakarta



Gambar 20. Diskusi Pramuniaga di "Gajah Kembar" Jalan Solo Yogyakarta